

Segelas Cokelat *Hillary*

Jika anak-anak yang tumbuh menjadi penerus generasi tua diibaratkan bibit, maka yang menyemai adalah para orang tua di rumah agar kelak tumbuh menjadi pohon yang kuat dengan hasil yang maksimal.

Jadi kalau kita kecewa dengan kondisi saat ini yang masih serba penuh dengan berita-berita korupsi, maka rumahlah satu-satunya tempat untuk mengubah keadaan tersebut. Sehingga tidak ada lagi kasus korupsi saling bergantian muncul.

("Generasi Baru")

Setiap tulisan yang disajikan dalam buku ini selalu faktual, menginspirasi, dan mudah dicerna. Itji Diana Daud berusaha menyuguhkan tulisan yang enak dibaca, singkat tapi padat sehingga menjadi jendela informasi yang ideal bagi setiap pembacanya. Saya harus mengatakan bahwa saya bangga memiliki sahabat yang ulet, kreatif, inovatif namun selalu rendah hati. Saya pikir sikap pribadinya ini sekaligus mengimplementasikan betapa perlunya gender itu dibangun bersama-sama.

(H. Abd Latief Jusuf)

Itji Diana Daud

Segelas Cokelat

Hillary

Kolom "Swara Setara" Harian FAJAR

Itji Diana Daud

**Segelas
Cokelat
Hillary**

Nala Cipta Litera
2011

Segelas Cokelat Hillary

**Kumpulan Esai Swara Setara Harian Fajar
Prof. Itji Diana Daud**

Diterbitkan oleh:

Nala Cipta Litera

Jl. Sehati no. 14 Makassar 90232

Cetakan pertama:

Nopember 2011

Editor:

Muhary Wahyu Nurba

Desain Sampul dan Isi:

Tim Kreatif Nala

Pemeriksa Aksara:

Sunarti Sain

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Daud, Itji Diana, SEGELAS COKELAT HILLARY:

Kumpulan Kolom Swara Setara, Nopember 2011, Nala Cipta Litera

218 halaman: 13x19 cm

ISBN: 978-602-8003-24-7

Pengantar Penulis

Assalamu Alaikum Wr Wb.

Puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT karena atas rahmatNya buku ini dapat tersusun dan hadir di tangan pembaca. Buku ini merupakan kumpulan tulisan saya yang dimuat di kolom "Suara Setara" Harian Fajar Makassar yang terbit setiap hari Kamis. Oleh sebab itu wajar jika di ruang ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alwi Hamu, Bapak Sukriansyah S. Latief, dan tim Redaksi Fajar yang mengundang dan memilih saya mengisi kolom tersebut.

Tulisan ini merupakan hasil pengamatan setiap hari tentang peristiwa, momen atau issue-issue penting yang berkembang di tengah masyarakat/komunitas selama seminggu. Sesuai nama kolomnya, maka saya berusaha mengemukakan sesuai yang berfungsi untuk mengajak pembaca agar memandang sebuah momen, peristiwa bahkan issue menjadi setara, membuat issue negatif menjadi positif, yang marginal menjadi terakui, yang korban diskriminatif mendapatkan haknya. Saya mengharapkan setiap issue atau peristiwa dapat dilihat dari sudut pandang positif dengan melakukan *searching* data. Saya sadari bahwa sebagai sebuah tulisan masih jauh dari

kesempurnaan tetapi mudah-mudahan bagi pembaca ada yang bisa dimengerti walau hanya satu kata.

Buku ini saya persembahkan bagi ibu saya tercinta Roos Amin yang tidak pernah berhenti mensupport dan berdoa untuk kami anak-anaknya. Roos Amin is *very great mother*.

Itji Diana Daud

Daftar Isi

Harga BBM Turun Lagi	7
Suara Rakyat Penentu Caleg Perempuan	11
Kekerasan di Rumah Rakyat	15
Segelas Cokelat Hillary	19
Puyer Politik	23
Perpeloncoan	27
Kaun Banega Crorepati	31
Jalan Gelap Para TKI	35
Daripada Golput, Contreng Perempuan	39
Bunga Masa Depan	43
Kotak Susno	47
Artis Senayan	51
Kartini	55
Koalisi Feminin dan Maskulin	59
Mimpi Jupe	63
Korban atau Inspirasi	67
Generasi Baru	70
Koalisi Tanpa Perempuan	73
Belajar dari Kesalahan	78
Obama dan JK	81
Petani Mempertanyakan Pemimpin	85
Menuntut Ilmu Pengetahuan Gratis	88
Virgin Queen	92

Laura dan Euna	96
Belajar dari Guangzhou	101
Merdeka dari Ketidakmandirian	105
Perempuan Xiao	109
Fitri	113
Wakil Rakyat	117
Krisis Listrik	121
Gusur	125
Menteri Perempuan	129
Sumpah Orang-orang Muda	133
Sayap-Sayap Patah	138
Rajin di Kantor dan Rumah	142
Berkurban	146
Century	150
Hari Anti Korupsi	154
Ibu yang Terbaik di Dunia	157
Mimpi Anak Kita	161
Pahlawan	165
Produk China	169
Pernikahan	173
Menjaga Kepercayaan	177
Freedom Flotilla	181
Goal	185
Sepak Bola Perempuan	189
Bersiap Puasa	193
Satu Cabai Seribu Rupiah	196
Perempuan Korban Kriminalitas	199
Solidaritas Ramadan	202
Siti Walidah	206
Pinera	210

Harga BBM Turun Lagi

Harga bahan bakar minyak, khususnya bensin, turun lagi mulai 15 Januari 2009, dari harga Rp 5.000 menjadi Rp 4.500 per liter. Penurunan ini adalah keputusan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla untuk ketiga kalinya, setelah pada 1 Desember 2008 terjadi penurunan pertama dari Rp 6.000 per liter menjadi Rp 5.500 per liter dan yang kedua tanggal 15 Desember 2008 turun menjadi Rp 5.000 per liter.

Bisa dipastikan bahwa semua konsumen merasa senang dengan kebijakan tersebut. Terutama bagi mereka yang menghabiskan belanja bensin Rp 3 juta per bulan (asumsi tiga mobil dan mengisi Rp 100 ribu setiap tiga hari), karena bisa berhemat lebih dari 10 persen. Tetapi bagaimana bagi mereka yang tidak punya

kendaraan, atau PNS yang hanya punya satu motor? Mereka tentunya hanya bisa berharap kebijakan penurunan harga BBM bisa menekan harga sembilan bahan pokok dan menurunkan tarif angkutan kota agar beban hidup bisa berkurang.

Sayangnya, kenyataan di lapangan, harga makanan tidak otomatis turun. Sudah jamaknya, jika terlanjur naik, sangat sulit untuk turun kembali. Begitupula tarif angkutan kota, selalu butuh waktu yang lama untuk menyesuaikan harga bahan bakar. Alasan pedagang atau pengusaha, komponen biaya bahan bakar hanya sebagian kecil dari modal atau biaya operasional. Jadi, kebijakan pemerintah tidak ada pengaruhnya.

Jika pedagang makanan dan pengusaha angkutan bersikap demikian, ini berarti kebijakan penurunan harga BBM tidak berarti apa-apa bagi mereka. Hal ini juga menunjukkan pemerintah melanggar logikanya sendiri waktu ingin menaikkan harga BBM. Pemerintah beranggapan bahwa kenaikan yang terjadi adalah upaya pengalihan subsidi dari orang kaya kepada orang miskin.

Pemerintah selalu mengatakan ingin mengembalikan subsidi kepada orang-orang yang berhak menerima, yakni kepada mereka yang betul-betul miskin tak punya kendaraan bermotor atau mereka yang tak punya mobil mewah, berupa dana Bantuan Langsung Tunai. Apa yang terjadi? Dana BLT yang mereka terima belum mampu menutupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Suara Rakyat Penentu Caleg Perempuan

Di sebuah koran nasional, seorang kartunis menggambarkan mengapa seseorang begitu ngotot ingin memilih caleg perempuan pada saat pemilu nanti. Tokoh dalam kartun tersebut memberikan alasan bahwa hingga saat ini, belum ada anggota atau mantan anggota DPR perempuan yang terbukti atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Kartun tersebut bisa menjadi inspirasi bagi caleg-caleg perempuan untuk melakukan kampanye setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Mahfud MD memutuskan pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif. MK memutuskan penetapan caleg terpilih dalam satu parpol yang meraih kursi di DPR berdasarkan caleg yang meraih suara terbanyak.

Keputusan MK membatalkan kompromi politik soal penetapan calon anggota legislatif terpilih bagi kelompok perempuan. MK memastikan suara rakyat harus dihormati dan jadi satu-satunya faktor penentu. Bagi caleg perempuan, persaingan akan berjalan ketat dan itu berarti kian mahal. Ada tiga tingkat persaingan, pertama dalam satu parpol, kedua antarpol untuk meraih kursi DPR, dan ketiga di dalam internal partai untuk meraih suara terbanyak.

Putusan MK yang membatalkan pemakaian sistem nomor urut dalam penetapan calon anggota legislatif dinilai merugikan caleg perempuan. Pasalnya, penghapusan sistem nomor urut membuat perlakuan khusus terhadap perempuan melalui kuota 30 persen menjadi tidak efektif. Putusan itu dinilai melanggengkan nilai patriarkis di masyarakat yang masih menganggap pemimpin laki-laki masih lebih baik dibandingkan perempuan.

Dampak keputusan MK tersebut langsung dirasakan caleg-caleg perempuan di lapangan karena suasana kampanye pun langsung berubah. Pertarungannya bukan hanya antara caleg beda parpol, tetapi dalam satu parpol ikut berperang. Bahkan, yang beda parpol justru terasa masih lebih etis daripada dari satu parpol. Bahkan, ada caleg perempuan yang mengaku tim pemenangannya mendapat ancaman fisik dan tekanan psikologis dari rekan separtol.

Kembali soal karikatur yang disinggung di atas, caleg perempuan sepertinya bisa memakai tema tersebut sebagai alat kampanye. Fakta menunjukkan tak satu pun perempuan di DPR yang melakukan korupsi, mereka menjaga amanah konsituen.

Hasil penelitian Bank Dunia yang dipaparkan dalam *Engendering Development* yang dilakukan tahun 2001, pada pemerintahan dan ruang publik ditempatkan banyak perempuan dalam tingkat pengambil keputusan maka tingkat korupsi menurun. Kemudian, berdasarkan sebuah analisis yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dalam *World Value Surveys*, dari 18 negara pada tahun 1981 dan dari 43 negara pada tahun 1991 menunjukkan bahwa perempuan tidak mau atau tidak setuju terhadap perbuatan tidak jujur dan yang bersifat ilegal dibandingkan dengan laki-laki. Laporan ini menyebutkan bahwa memang variasi di antara negara-negara yang disurvei, yaitu pada tujuh dari 43 negara yang disurvei tahun 1991, lebih banyak laki-laki yang tergoda untuk menerima sogok.

Penelitian lain yang disebutkan oleh laporan Bank Dunia juga menunjukkan bahwa korupsi berkurang secara nyata ketika proporsi perempuan di parlemen meningkat, mengontrol pendapatan negara dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya korupsi, termasuk kebebasan warga negara, keterbukaan perdagangan, dan perpecahan etnis.

Meskipun berbagai penelitian lanjutan masih

diperlukan, tetapi hasil-hasil yang ada memberi tambahan dukungan tentang pentingnya meningkatkan jumlah perempuan dalam politik serta di dalam angkatan kerja, karena mereka bisa menjadi kekuatan efektif untuk terbentuknya pemerintahan yang baik serta kepercayaan bisnis. Jadi sekarang, apakah tidak layak jika perempuan menginginkan 30 kursi di DPR?
(*)

29 Januari 2009

Kekerasan di Rumah Rakyat

Kepergian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara Abdul Azis Angkat, bukan hanya meninggalkan duka bagi keluarganya, tetapi juga bagi bangsa Indonesia karena kasus tersebut menjadi potret masih buruknya kehidupan berdemokrasi di negeri ini. Bayangkan, amuk di Medan itu sampai menyebabkan meninggalnya wakil rakyat (kalau pun akibat serangan jantung, tentu dipicu karena aksi brutal dari pengunjuk rasa).

Kita semua tentu tersentak mendengar, membaca, dan melihat berita bagaimana Abdul Azis Angkat diperlakukan para pengunjuk rasa. Bahkan truk polisi yang berusaha melarikan Abdul Azis Angkat ke rumah sakit karena sudah tak sadarkan diri, masih dihadang dan dilempari para pengunjuk rasa.

Dalam kasus DPRD Sumatera Utara, patut dipertanyakan kenapa kita menjadi bangsa yang sangat mudah marah? Kita begitu sulit menghargai orang atau kelompok lain dan hanya mampu melakukan kekerasan demi kekerasan. Apakah kita masih perlu belajar lebih banyak lagi setelah kita hidup lama pada masa Orde Baru yang menjadi orde seragam yang menolak perbedaan. Apakah kita memang sulit sekali untuk berekonsiliasi atau sekadar berdialog dengan pihak lain?

Selain itu, kita kini bermutasi menjadi bangsa yang tergesa-gesa? Jika merasa tidak cocok dan bisa berdiri sendiri, langsung minta pemekaran, tanpa peduli aturannya harus begitu atau begini. Demokrasi adalah suatu proses. Jika rakyat hanya diagitasi, digodok cepat-cepat, artinya tidak diikuti dalam proses pengolahan perbedaan pendapat secara damai dan rasional, rakyat akhirnya merasa tidak berpartisipasi dalam proses politik. Akibatnya, mereka akan menjadi apatis, lalu tidak peduli lagi siapa yang akan berkuasa. Pada akhirnya, kekerasan yang berujung pada jatuhnya korban, menjadi tak terhindarkan.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkin kita perlu mencermati bahwa masyarakat yang terlibat dalam kekerasan dilatarbelakangi oleh tekanan kehidupan, lemahnya peran lembaga politik, dan kesenjangan sosial ekonomi yang menempatkan masyarakat pada posisi sulit. Pada satu sisi, pendidikan melahirkan aspirasi baru berupa kehidupan yang lebih baik, partisipasi politik yang

lebih luas, serta kebebasan pribadi dalam berdemokrasi. Namun di sisi lain, kondisi riil ekonominya tidak mendukung realisasi perkembangan aspirasi tersebut.

Kita masih sering melihat bagaimana pengerahan massa dalam setiap aksi untuk membawa aspirasi ke wakil rakyat di DPRD. Sepertinya, “adegan” berdemokrasi dengan mengerahkan massa jauh lebih “disukai” ketimbang berdialog. Meskipun ciri dalam berdemokrasi adalah memaklumi budaya beda pendapat, namun hal itu sesungguhnya hanya proses untuk musyawarah. Budaya beda pendapat sesungguhnya awal menuju budaya dialog untuk akur. Jadi berbeda pendapat, apalagi sampai harus mengerahkan massa dan anarkis bukan menjadi syarat mutlak bagi terselenggaranya demokrasi.

Memang kita wajib mengakui adanya perbedaan pendapat, diakui pula adanya keberagaman, adanya keunikan-keunikan di tengah masyarakat. Sebab itulah pintu masuk elemen demokratisasi yang intinya adalah pengakuan hak sekaligus kewajiban setiap orang untuk menyatakan pendapat. Tetapi, kita harus ikut mengembangkan semangat membuka diri terhadap tuntutan masyarakat dan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, suatu keharusan kalau yang dikembangkan adalah dialog.

Mengapa? Dialog mengandalkan berkembangnya semangat memberi dan menerima, dan hal itu juga sejalan dengan prinsip menerima perbedaan pendapat.

Kultur demokrasi perlu dimasyarakatkan, perlu dijadikan elemen kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Kultur itu adalah kebiasaan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan musyawarah untuk mufakat; menyelesaikan persoalan bukan dengan kekerasan; mengakui perbedaan pendapat sebagai realisasi hak-hak asasi, dan bukan memaksakan kehendak.

Sebaliknya, dalam kehidupan masyarakat yang mengembangkan kekerasan sebagai cara menyelesaikan persoalan, yang berkembang bukan kehidupan demokratis melainkan kehidupan barbar. Kehidupan barbar itu tidak mengizinkan terjadinya dialog, sebaliknya kehidupan demokratis selalu tampil dengan ciri *non-violence*, antikekerasan.

Sehubungan dengan kasus Ketua DPRD Sumatera Utara, semoga semua komponen bangsa bisa belajar untuk lebih bijak dalam melihat persoalan. Belajar untuk tidak melakukan tindak kekerasan dalam setiap perbedaan pendapat. Bahwa siapa pun yang melakukan tindak kekerasan harus ditindak. Tindak kekerasan adalah pelanggaran demokrasi paling berat.(*)

5 Februari 2009

Segelas Cokelat Hillary

Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Hillary Clinton ke Indonesia memiliki arti khusus bagi negara ini di mata internasional. Sebagai negara yang ekonominya cukup menjanjikan, kedatangan Hillary seolah-olah mengumumkan kepada khalayak internasional bahwa Indonesia adalah negara penting untuk diperhitungkan.

Bagi rakyat kecil di pelosok desa, termasuk di Sulawesi Selatan (Sulsel), tentulah kunjungan Hillary tidak dapat dirasakan faedahnya secara langsung karena sama sekali tidak akan mengubah nasib mereka. Hal itu berbeda dengan kebanggaan pejabat, diplomat atau mereka yang sempat diundang untuk makan bersama dengan mantan ibu negara AS ini.

Tetapi sesungguhnya ada kaitan langsung antara Hillary dengan masyarakat Sulsel, karena konon mantan pesaing Barrack Obama dalam perebutan tiket calon presiden AS dari Partai Demokrat ini, suka *ngemil* cokelat atau minum cokelat hangat di saat santai. Semoga Hillary dan masyarakat AS mengetahui bahwa sebagian dari cokelat yang mereka konsumsi, besar berasal dari Indonesia.

Jadi salah satu alasan mengapa Indonesia penting bagi AS adalah karena Indonesia merupakan salah satu produsen biji kakao terbesar di dunia dengan jumlah produksi 181.122 ton pada tahun 2007. Indonesia berada di urutan ketiga setelah Ghana dan Pantai Gading yang masing-masing mampu menghasilkan 1,2 juta ton dan 700.000 ton biji kakao per tahun. Sebanyak 80 persen dari produksi kakao nasional berasal dari Sulawesi, terutama Sulsel.

Saat ini, biji kakao yang dihasilkan dunia 3 juta ton per tahun. Tetapi sayangnya, Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) mencatat produksi dari kakao Sulawesi menurun dari 220.185 ton di tahun 2006 menjadi 181.122 ton di tahun 2007. Sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel menyebutkan bahwa nilai ekspor kakao Sulawesi menurun dari 332,56 juta dolar AS di tahun 2006 menjadi 326,18 juta dolar AS di tahun 2007.

Penurunan ini tak terlepas dari kerusakan yang melanda 70 persen dari 800.000 hektare lahan kakao di Sulawesi pada saat ini. Hal itu berdampak pada

pendapatan petani yang terpaksa kehilangan potensi produktivitas kakao sebesar 40 persen. Kebun petani yang memproduksi bahan dasar pembuatan cokelat, menghadapi serangan hama dan penyakit berupa penggerek buah kakao (*Cocoa pod borer* atau PBK), penyakit busuk buah (*Black pod*), serta penyakit kanker batang (*Vascular streak dieback* atau VSD).

Mars Incorporated yang berdiri pada tahun 1911 adalah salah satu konsumen cokelat produksi dari Sulawesi Selatan. Perusahaan makanan di negeri Paman Sam ini memproduksi cemilan nikmat terbuat dari cokelat dengan merek Mars, Snicker, Milky Way, atau M&M (beberapa di antaranya dijual di Indonesia), mengaku mengolah 17.000 ton biji kakao dari Sulawesi setiap tahun. Sebanyak, 3.000 ton di antaranya bahkan langsung dibeli dari petani. Sisanya, sekitar 14.000 ton, dibeli dari para pedagang kakao lokal yang mengumpulkan biji kakao dari para petani.

Tentu banyak alasan mengapa Barrack Obama meminta Hillary berkunjung ke Indonesia. Namun yang terpenting adalah kita mengetahui diharganya kita, dan bagaimana memanfaatkan kepercayaan untuk dianggap penting tersebut dengan terus berupaya mencapai mimpi menjadi kenyataan.

Mimpi menjadi produsen cokelat nomor satu di dunia bukan tidak mungkin dan harus tetap dikejar untuk dijadikan kenyataan. Setidaknya, meskipun sulit, paling tidak mempertahankan sebagai produsen kakao

nomor tiga. Hal ini tidak akan sulit dicapai jika pemerintah provinsi bertekad mewujudkan mimpi tersebut untuk rakyatnya. *Toh* Sulsel punya segudang ahli kakao di Universitas Hasanuddin dan petani yang tangguh. Kini tinggal jalan ke depan dengan rasa percaya diri karena kedatangan Hillary merupakan simbol bahwa AS saja mengakui kita bisa! Tinggal kita harus berubah agar impian menjadi kenyataan.(*)

19 Februari 2009

Puyer Politik

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari sudah mengakhiri polemik mengenai penggunaan obat puyer yang ramai di masyarakat, terutama *website* dengan mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia masih membutuhkan obat yang diracik langsung oleh dokter praktik tersebut. Dengan pernyataan yang diutarakan di salah satu stasiun televisi, pemerintah menegaskan puyer masih diperbolehkan, tentu dengan syarat sesuai takaran dan standar kebersihannya.

Puyer (*powder*) atau *pulvis* adalah salah satu bentuk obat yang biasanya didapat dengan menghaluskan atau menghancurkan obat tablet atau kaplet yang biasanya terdiri atas sedikitnya dua macam obat. Obat jenis ini, paling mudah diberikan oleh dokter, terutama di

daerah-daerah terpencil, yang mungkin tidak memiliki banyak apoteker.

Puyer diragukan karena diracik di tempat praktik dokter yang mungkin kurang memenuhi standar kebersihan, ketepatan takaran, dan tidak didaftarkan ke pemerintah. Selain itu, isi obat puyer biasanya sulit diketahui dengan mudah oleh orang lain karena ketiadaan label sehingga jika terjadi masalah, misalnya alergi, keracunan, atau interaksi, sulit untuk mengetahui zat aktif obat yang mana yang menyebabkannya.

Selain karena kemajuan teknologi yang menghasilkan berbagai bentuk sediaan obat baru yang lebih aman, mudah digunakan, dan nyaman bagi pasien, obat “puyer” dianggap bersifat kurang stabil. Dengan demikian, lebih mudah rusak, takaran kurang akurat, dan penggunaannya juga menimbulkan rasa kurang nyaman (pahit).

Obat puyer juga memiliki “turunan”, yaitu obat kapsul dan obat sirup yang diracik/dikemas sendiri oleh dokter/apoteker dengan memasukkan puyer ke dalam cangkang kapsul atau mencampurkannya dengan sirup dan air.

Penggunaan obat puyer dan sejenisnya di Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu kala, jauh sebelum pengobatan modern hadir di sini. Jamu sebagai ramuan obat asli Indonesia sejak ratusan tahun lalu, salah satu bentuknya adalah mirip puyer.

Bahkan pada awal pengobatan modern barat, puyer merupakan salah satu bentuk pasokan yang luas digunakan di seluruh dunia, terutama untuk penggunaan obat racikan/campuran. Namun, dengan kemajuan teknologi, lambat laun persediaan puyer semakin jarang digunakan di seluruh dunia.

Saat orang-orang mempersoalkan keamanan dari obat puyer, sebenarnya rakyat saat ini tak menyadari kalau mereka sedang disodori “puyer” oleh partai-partai politik untuk menyelesaikan sekadar menyenangkan mereka. Semua partai menjanjikan kemakmuran kepada rakyat lewat janji-janji politik, tetapi sama sekali tidak memberikan kepastian apakah semuanya bisa jadi kenyataan. Semua ucapan dan janji manis mereka cuma *lip service* belaka, menguap begitu saja di udara.

Seiring dengan waktu, partai politik sekarang tidak bisa sekadar berjanji saja dengan berbagai macam trik dan aneka “puyer”nya, tetapi harus bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Janji politik yang gombal juga tidak akan laku lagi di negara yang pendidikan politik warganya sudah maju. Makanya tak mengherankan partai-partai politik sekarang ini berlomba mengemas iklan-iklan politik mereka lebih manis lagi agar bisa menyentuh hati pemilih.

Namun, kini masyarakat awam kini perlahan-lahan mulai belajar mengukur dan tahu mana janji-janji yang

masuk akal dan mana yang palsu. Mereka tidak akan mau lagi dikecewakan dalam menentukan pilihan.

Karena itu, rakyat seharusnya sudah dididik untuk memperoleh pendidikan politik yang lebih baik agar lebih mantap keikutsertaan mereka dalam setiap perayaan pemilu. Sebagaimana untuk urusan medis, mereka juga harus mengetahui pengobatan yang aman bagi mereka. Mereka berhak mengetahui bahwa penggunaan puyer seharusnya sudah digantikan obat yang racikannya lebih terukur dan sudah pas untuk umur dan penyakit pasien.

26 Februari 2009

Perpeloncoan

Tim kepolisian pada pekan-pekan terakhir ini sibuk memeriksa dan meminta keterangan beberapa orang terkait tewasnya mahasiswa Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung, Dwiyanto Wisnu Nugroho dalam acara *long march* yang diadakan di kampusnya.

Kita tentu bertanya-tanya mengapa kekerasan masih terjadi pada lembaga yang seharusnya menjadi tempat aman kampus adalah tempat menuntut ilmu. Ibu Dwiyanto tidak pernah menyangka anaknya akan tewas di tempat ia belajar. Dari kasus tersebut, kita semakin sadar bahwa hawa kekerasan telah menjalari negeri ini bahkan di kampus-kampus sekalipun.

Pemberitaan kasus-kasus kekerasan tersebut menjadi *warning* bagi kita semua, sebab berapa banyak

jumlah kampus dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang perlu mengambil hikmah dari kasus ITB. Terutama tudingan bahwa acara yang menjadi penyebab tewasnya Dwiyanto berbau perpeloncoan. Masa orientasi yang seharusnya untuk sosialisasi kampus malah menjadi ajang kekerasan bagi Dwi yang berujung kematian.

Perpeloncoan selalu dibungkus dengan serbaneka nama dan yang populer adalah dengan sebutan Masa Orientasi Studi. Ada pula yang membungkus perpeloncoan itu dengan nama-nama lain, namun dengan serbaneka nama itu secara tak sadar seolah mempragakan definisi atas kerancuan pemahaman mereka tentang pengalaman belajar dan pendidikan, justru sejak titik awal tahun pelajaran.

Jika diamati pada perspektif psikodinamika, terlihat betapa praktik perpeloncoan, terutama yang keterlaluhan menyakiti secara fisik atau jiwa, bahkan menyebabkan cedera atau kematian, pada hakikatnya adalah ajang proyeksi dari hasrat-hasrat agresi, kekerasan, balas dendam, kebutuhan untuk menguasai, dan kebutuhan untuk disanjung yang berada di dalam jiwa sebagian murid senior. Semua keinginan dan kebutuhan psikologis tersebut sulit diekspresikan secara sehat dan wajar di tengah kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya, hal itu juga terkait, bahkan menjadi cerminan realitas relasi psikososial di tengah kehidupan kita.

Kaun Banega Crorepati

Kaun Banega Crorepati” tak lain adalah acara kuis berhadiah uang miliaran versi India yang sebenarnya juga populer di Indonesia dengan title “*Who Wants to be a Millionaire*”. Jika di sana dipandu artis terkenal Amitabh Bachchan, maka di sini dipandu oleh presenter kondang Tantowi Yahya.

Namun masyarakat internasional tentu lebih tahu mengenai kegilaan pemirsa televisi di India terhadap acara tersebut ketimbang minat orang-orang Indonesia. Hal itu tak lain karena film *Slumdog Millionaire* berhasil memborong piala Oscar. Dalam film tersebut, menceritakan seorang remaja miskin bernama Jamal yang mendadak jadi kaya gara-gara kuis “Kaun Banega Crorepati”.

Jamal seorang *office boy* yang berasal dari kawasan kumuh (slum) kota Mumbai yang belajar dari setiap detik kehidupannya. Film ini menegaskan bahwa masa depan seseorang sangat ditentukan apa yang dialami dan dipelajari dari setiap waktu kehidupannya. Bahkan dalam kehidupan yang sangat sulit dan berat sekali pun, ada ilmu yang dapat dipakai di masa depan. Jadi bukan hanya “*who wants to be*” tetapi menjadi “*who knows to be*”.

Jamal yang hanya mendapat pendidikan di bangku sekolah dasar, ternyata bisa menjawab semua pertanyaan yang mungkin sulit dijawab oleh orang kebanyakan. Bahkan, hingga tahap hadiah utama 20 juta rupee atau sekitar Rp 4,6 miliar. Bagi Jamal sendiri, semua terasa mudah karena semua pertanyaan yang dilemparkan membawanya ke masa lalu yang merupakan “*milestone*” atau jejak kehidupannya.

Masih teringat di masa-masa orde baru, sering sekali ketika muncul profil pejabat atau orang-orang pintar di negara ini, pasti kita akan bergumam “siapa sangka” anak petani atau pejabat menjadi orang. Namun sekarang kalau ada pejabat, kebanyakan mereka adalah anak dari jenderal anu, putra menteri ini, atau pewaris sebuah kerajaan bisnis. Kalau toh ada anak petani yang jadi pembesar saat ini, tentu memiliki talenta atau spesialisasi yang sangat luar biasa sehingga tidak terkendala oleh ketatnya persaingan yang relatif semakin berat.

Hal ini tidak terlepas dari cara pandang melihat pembiayaan pendidikan yang dijadikan sebagai “barang” privat, bukan semata barang publik. Jika pendidikan sebagai barang publik berarti pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, tetapi sebaliknya sebagai barang privat, maka warga harus membayar guna memperoleh pendidikan.

Makanya tak heran pada saat ini, pendidikan dasar pra Taman Kanak-kanak sudah merupakan usaha waralaba asing, hingga ke perguruan tinggi. Biayanya tentu sangat mahal karena tenaga pengajarnya pun dari luar negeri. Bayangkan jika lulusan sekolah dasar negeri di kampung terpencil harus bersaing dengan mereka yang lulusan sekolah internasional yang jumlahnya sudah ratusan. Nyaris, tak akan ada lagi yang bisa melejit untuk berkompetisi.

Seperti kita lihat pada penerimaan pegawai di salah satu stasiun televisi yang sempat tercatat dalam museum rekor Indonesia sebab jumlah pesertanya mencapai ribuan orang. Padahal mereka hanya memperebutkan puluhan lowongan dan dengan persyaratan yang relatif tinggi.

Kini di saat kesenjangan pendidikan kian tinggi, pemerintah tidak bisa tinggal diam agar pemerataan kesempatan tetap terjaga, agar seluruh anak bangsa bisa mendapat tempat dengan biaya pendidikan yang murah. Tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan di tanah air harus senantiasa dipertanyakan. Jadi bukan

sekadar soal murah atau gratis, tetapi juga soal kualitas pendidikan. Pemerintah tak boleh sekadar berkewajiban membiayainya, tetapi termasuk memajukan kualitasnya sehingga melahirkan generasi penerus yang bernas di masa datang.(*)

5 Maret 2009

Jalan Gelap Para TKI

Saya tidak pernah bisa menahan kesedihan setiap kali berjumpa dengan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sewaktu memenuhi undangan Allah swt untuk berangkat ke tanah suci, saya secara kebetulan serombongan dengan mereka, yang diberi julukan Para Pahlawan Devisa.

Sejak di ruang tunggu, sebagian besar dari mereka tampak baru pertama kali melihat tempat seluas dan seramai bandara Soekarno Hatta ini. Di kampung mereka, mereka hanya akrab dengan alam pedesaan yang sejuk dan damai. Jauh dari hiruk pikuk. Saat menatap mata mereka, ada kecemasan dan ketakutan menggantung. Mereka seperti tidak pernah tahu seperti apa kehidupan di perantauan sana, di Arab Saudi. Mereka hanya berharap ada keberuntungan yang akan

menaungi mereka di sana dan mengubah hidup keluarga mereka di kampung menjadi lebih baik.

Sesungguhnya sangat wajar jika mereka takut, apalagi sebagai perempuan yang tanpa didampingi muhrim berangkat ke tempat yang jauh dan asing. Bukan cuma itu, menurut catatan Organisasi Hak Asasi Manusia, Amnesty International, Arab Saudi memiliki rekor terburuk dalam pelanggaran hak asasi perempuan, dan korban terbesar adalah buruh migran perempuan.

Bila semata-mata hanya melihat risikonya, maka tidak mungkinlah kita memahami kepergian mereka. Tetapi kita haruslah memandang mereka sebagai sebuah bagian dari kasus kemanusiaan. Di desanya, perempuan-perempuan tersebut hidup dalam kemiskinan. Kondisi tersebut yang membuat para TKI memutuskan pergi ke negeri kaya minyak itu, meninggalkan suami dan anak mereka untuk menjadi pembantu rumah-tangga.

Namun catatan panjang penderitaan para TKI tidak sepanjang cerita keberhasilan sebagai penghasil rupiah bagi keluarga di kampung. Cerita-cerita keluarga TKI yang punya gedung bertingkat permanen dan sawah berhektar-hektar, cepat sekali buyar ketika muncul berita TKI yang disiksa majikan, ditipu perusahaan yang memberangkatkan mereka, atau terancam hukuman gantung karena membunuh majikan.

Sesungguhnya, pangkal dari masalah TKI terjadi sejak di tanah air, sejak niat untuk menjadi calon TKI

muncul. Kasus yang terjadi di Indonesia begitu khas. Niat menjadi TKI lebih banyak didominasi masalah uang agar bisa lepas dari belenggu kemiskinan. Niat baik itu tidak diikuti pendidikan memadai sehingga menjadi TKI lebih didorong kenekatan. Nekat mengadu nasib di negeri orang dengan bayaran uang asing, yang tentu lebih besar dari pekerjaan serupa di negeri sendiri. Karena memutuskan menjadi TKI seperti sebuah kenekatan saja, akhirnya mereka tidak berusaha untuk mengenal lebih jauh mengenai kultur yang sering menciptakan kesalahpahaman antara pekerja dan majikan. Misalnya di Arab Saudi tak diperbolehkan untuk bercengkerama sesama pekerja seperti di tanah air. Hal itu karena secara budaya negara yang dituju bersifat individualistis. Akibatnya, mempengaruhi tingkat kebetahan bekerja. Kekerasan bisa diakibatkan karena ketidakbetahan pekerja yang membuat majikan marah. Ini diperparah oleh kondisi pemukiman yang jarak antar rumah di Arab relatif cukup jauh dan lingkungan kerja yang tertutup seperti benteng.

Hal lain adalah minimnya pengetahuan tentang aturan hukum yang berlaku dan ke mana mengadu, membuat banyak pekerja, terutama perempuan yang sering menjadi korban kekerasan. Jika harus kabur dan kemudian tertangkap, maka penjara balasannya. Tampaknya, ketika berangkat dari Indonesia, perusahaan yang mengirim mereka bekerja tidak memberikan pengetahuan memadai mengenai hukum di Arab Saudi. Apalagi bekal dan perlindungan hukum bagi

mereka. Tetapi sepanjang tak ada masalah, seolah masalah TKI ini bukan persoalan yang menjadi perhatian pemerintah. Padahal menyangkut hubungan antarnegara dan konvensi internasional, khususnya yang menyangkut perlindungan terhadap pekerja asing. Di beberapa negara, secara resmi pemerintahnya mengumumkan sudah tidak ada perbudakan.

Perbudakan ini sudah menjadi perhatian sejak Kongres Perempuan tanggal 22 Desember 1928, dengan terbentuknya Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak. Namun dalam tiga dekade belakangan, bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak telah menjadi bagian dari kegiatan pengerahan buruh migran ke luar negeri, meskipun tidak selalu kasat mata. Terlihat gejala-gejala perdagangan perempuan, antara lain perekrutan buruh migran dengan menggunakan janji-janji palsu, penipuan atau jerat utang, pemalsuan dokumen dan langkanya dokumen perjanjian kerja, serta panjangnya jam kerja.

Pemerintah harus serius melihat persoalan ini, terutama di saat jumlah kemiskinan bertambah banyak. Jangan sampai negara menyangka mendapatkan devisa dari TKI, tetapi ternyata biaya sosial politik yang ditanggung pemerintah dan masyarakat Indonesia jauh lebih besar. (*)

18 maret 2009

Daripada Golput, Contreng Perempuan

Pemilu tinggal seminggu lagi. Masa kampanye tinggal tiga hari lagi sebelum memasuki masa tenang. Tentunya, para calon pemilih sudah menentukan partai dan caleg yang akan dicontreng pada 9 April nanti. Namun tentu masih banyak di antara kita yang juga memutuskan tidak datang ke tempat pemungutan suara atau menjadi golput.

Jika melihat perkiraan dari banyak pengamat politik, pemilu kali ini akan memecahkan rekor jumlah golput. Alasannya, banyak pemilih yang kecewa dengan perilaku wakil rakyat di DPR yang melakukan tindakan tercela, mulai dari menerima suap hingga perbuatan asusila. Selain itu, golput juga akan disebabkan oleh masalah teknis karena KPU dituding lalai dalam menyelenggarakan pemilu.

Namun ada yang menarik dari pemilu kali ini, adalah keterlibatan perempuan yang lebih besar karena adanya *affirmative action* yang mewajibkan setiap partai menempatkan calon legislatif perempuan dalam setiap urutan dua caleg laki-laki pada daftar caleg. Dan hal baru lainnya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Jadi sesungguhnya, keberadaan perempuan yang lebih banyak dalam daftar caleg partai merupakan hal baru dalam pesta demokrasi di Indonesia. Sehingga pemilih yang memutuskan untuk golput karena kecewa dengan wakil rakyat di DPR, sebaiknya mempertimbangkan gerbong baru dari kaum hawa. Perempuan yang masuk di dalam daftar caleg, rata-rata pendatang baru dan beberapa di antaranya memiliki kapabilitas yang tak kalah dari laki-laki atau pemain lama.

Terserah mau memilih partai mana atau caleg yang mana, tetapi hak pilih sebaiknya jangan disia-siakan. Daripada mubazir, berikan saja hak suara kita kepada perempuan untuk mencegah masuknya caleg yang sebenarnya membuat orang-orang jadi apatis dan enggan memilih wakil rakyat. Apalagi, golput dipastikan hanya akan semakin melanggengkan orang-orang yang tidak kredibel untuk duduk di lembaga yang sangat terhormat tersebut.

Permintaan atau harapan memilih perempuan sebenarnya bukan berarti perempuan meminta belas

kasihan seperti anggapan banyak orang bahwa afirmasi adalah sebuah pemberian atas belas kasihan terhadap perempuan. Namun, sesungguhnya perempuan memang harus diberikan kekhususan karena selama ini masih sering menerima perlakuan tidak seimbang karena urusan gender.

Harus diakui bahwa masyarakat memang kecewa dengan politikus dan partai politik karena gagal memenuhi harapan rakyat. Tetapi, membiarkan para caleg yang berpotensi mengkhianati rakyat juga bukan sebuah solusi.

Paling tidak bagi pemilih perempuan tidak memilih untuk jadi golput, tetapi menunjukkan solidaritas untuk memilih caleg perempuan yang dianggap berkualitas dan memiliki kemampuan memperjuangkan hak perempuan. Gerakan ini akan signifikan karena 51 persen dari total pemilih adalah kaum perempuan. Namun tidak ada data berapa besar perempuan yang sudah memutuskan untuk golput. Tetapi kalau perempuan golput mengubah pilihannya untuk datang ke bilik suara dan mencontreng perempuan, maka tidak kecil kemungkinan jumlah perempuan di legislatif akan memenuhi kuota 30 persen.

Alasan perempuan mendukung caleg perempuan sudah jelas, minimnya alokasi anggaran negara untuk kepentingan peningkatan kesehatan perempuan. Jika lebih banyak perempuan di DPR, maka anggaran bisa disetir agar lebih sadar terhadap isu gender. Misalnya

anggaran kesehatan reproduksi dan dana untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Sekarang kita semua berharap, perempuan memilih caleg perempuan. Tetapi tidak memilih perempuan yang hanya dijadikan sebagai kendaraan partai politiknya. Dari sekian banyak caleg perempuan, banyak di antaranya yang memiliki *track record* yang dapat meyakinkan kita semua. Oleh karena itu, mari mencontreng! (*)

2 April 2009

Bunga Masa Depan

Menteri Pendidikan Nasional M Nuh menyebut mahasiswa sebagai bunga di masa depan yang disiapkan hari ini. Mereka dititipkan oleh orang tua mereka di kampus untuk dididik oleh dosen dengan kasih sayang agar kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Jika proses pendidikan tidak bernuansa kasih sayang, tanpa toleransi, tidak saling menghargai, maka kita akan menghasilkan alumni yang sosio-idiot dan teknikal-idiot. Alumni yang kehilangan kepercayaan dan inovasi, alumni tanpa kasih sayang, tidak toleransi, tidak tahu menghormati orang lain, tidak tahu menghargai, sibuk dengan diri sendiri, tidak mempedulikan kepentingan orang lain. Padahal, Unhas memakai nama Hasanuddin, seorang yang mempunyai jiwa juang yang

tinggi tanpa mementingkan diri sendiri. Beliau hidup sampai usia 39 tahun dan oleh VOC digelari Ayam Jantan Dari Timur karena kecerdasan, keberanian menghilangkan keterjajahan, kebodohan, kemiskinan, ketergantungan. Menteri yakin dibawa kepemimpinan Prof Idrus masyarakat telah menitipkan anaknya untuk dididik dengan kasih sayang oleh dosen, tidak akan kecewa. *The flower tomorrow, seed today.*

Kalau mahasiswa adalah bibit unggul, maka kampus memang selalu menjadi ladang untuk tumbuh menjadi agen pembangunan yang akan terjun ke tengah masyarakat. Tentu dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat, yakni untuk menyejahterakan masyarakat pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam hal ini, mahasiswa menjadi agen perubahan untuk melakukan suatu perbaikan di berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Menjadi seorang mahasiswa adalah suatu kebanggaan tersendiri karena Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi tahun 2007 secara nasional adalah 17,26. Artinya, persentase yang tidak dapat merasakan bangku kuliah jauh lebih besar. APK terbesar berada DI Yogyakarta dan DKI Jakarta dengan masing-masing sekitar 63 persen dan terendah di Kalimantan sebesar 6,42 persen. Meskipun jumlah sarjana yang menganggur juga tidak sedikit, pada tahun 2007 menjadi 409.890 orang. Ditambah dengan pemegang gelar diploma I, II, dan III yang menganggur, berdasarkan

pendataan tahun 2007 lebih dari 740.000 orang.

Meskipun sebagian masyarakat memandangnya hanya sebagai sekelompok orang yang suka demo atau tawuran, sejatinya mahasiswa adalah masyarakat intelektual. Seorang mahasiswa harus selalu meng-*update* pengetahuannya terhadap persoalan yang terjadi agar bisa membuat perubahan. Seperti dalam sejarah Indonesia, mulai dari gerakan angkatan 66 yang menjatuhkan rezim orde lama dan aksi mahasiswa yang menurunkan rezim orde baru.

Tentu untuk aksi-aksi mahasiswa yang sudah kehilangan arah dan bahkan berbuah rusuh, membuat masyarakat kecewa sebab tindakan mereka sangat mengganggu aktivitas masyarakat umum. Sebaiknya, aksi yang mengatasnamakan aspirasi rakyat dicermati kembali, apakah sudah sejalan keinginan rakyat. Kita selalu berharap gerakan mahasiswa berada dalam posisi kontrol terhadap pemerintah, terutama pada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum.

Beberapa pengamat juga menilai gerakan mahasiswa mengalami disorientasi karena tujuan dan target terkadang tidak jelas. Aksi-aksi yang muncul sering terpengaruh oleh trauma pemerintahan masa lalu yang cenderung otoriter, tetapi sekarang menjadi lebih demokratis. Jadi mahasiswa harus memiliki pedoman jelas dalam melakukan aksi agar tidak mudah terpancing emosi untuk berbuat keributan. Terutama untuk men-

cegah aksi anarkis, merusak kampus sendiri, atau saling serang.

Pada masa lalu, gerakan mahasiswa tak mudah terpancing karena mempunyai agenda setting yang jelas. Oleh karena itu, gerakan mahasiswa harus menemukan pola perjuangan yang sesuai dengan masanya. Bila perlu, tidak lagi sekadar mengkritisi, tetapi juga disertai aksi nyata meringankan beban rakyat banyak.

8 April 2009

Kotak Susno

Dalam mitologi Yunani, kotak Pandora adalah tabung besar yang dipegang oleh gadis bernama Pandora yang sewaktu-waktu dapat dibuka dan mengeluarkan hal-hal buruk pada manusia berupa berbagai penyakit. Tetapi kotak Pandora tidak hanya mengeluarkan hal-hal buruk, melainkan juga harapan.

Kotak pandora inilah yang seakan dipegang oleh mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Susno Duadji dalam membongkar praktik makelar kasus di sejumlah lembaga, di antaranya Ditjen Pajak dan Polri. Pengungkapan praktik markus diibaratkan kotak terlarang yang dibuka oleh Pandora dalam mitologi Yunani. Segala keburukan berhamburan berupa terbukanya bopeng-bopeng di lembaga hukum dan Ditjen Pajak.

Namun, di dalam kotak Susno ada harapan untuk memberantas praktik makelar kasus dan membuat jera para pelaku korupsi.

Terlepas dari kontroversi dan teka-teki kasus Susno Duadji, keberanian jenderal polisi ini dalam mengungkap praktik-praktik yang menyimpang dari hakikat eksistensi Polri telah menumbuhkan harapan baru serta menjanjikan era baru Polri yang tidak saja bersih, tetapi juga menjadi teladan. Oleh karena itu, untuk saat ini, masyarakat Indonesia pasti memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada Susno untuk terus mengungkap kebobrokan di dua lembaga tersebut.

Susno Duadji mengungkap kasus korupsi dan pencucian uang senilai Rp 25 miliar dengan tersangka pegawai pajak Gayus Tambunan. Dalam pengungkapan tersebut, Susno Duadji bak membuka kotak Pandora karena juga menyebut keterlibatan beberapa jenderal dari Polri sebagai markus. Bahkan, inisial dari pihak-pihak yang diindikasikan turut menikmati aliran dana tersebut diumumkan secara terbuka.

Sebagai pembuka kotak Pandora, Susno Duadji menghadapi tekanan yang tidak ringan. Bukan hanya dituduh sebagai tukang pencari sensasi dan pencemar nama baik institusi, tetapi sempat diamankan dari bandara saat akan berangkat ke luar negeri untuk berobat. Paling menyakitkan bagi Susno Duadji, tentu sebutan sebagai “maling teriak maling”.

Tetapi kita harus akui bahwa secara kumulatif, praktik mafia kasus di Ditjen Pajak sangat merugikan negara dan rakyat karena penerimaan negara yang diselewengkan. Oleh karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar dilakukan pembersihan praktik mafia secara menyeluruh. Tidak hanya di Ditjen Pajak, tetapi juga di sejumlah instansi pemerintah lainnya. Bahkan Presiden menyebut bahwa praktik mafia hukum yang terjadi saat ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi adalah pengkhianatan terbesar kepada negara.

Kalau kita menyadari bagaimana buruknya dampak dari korupsi, maka wajar jika kita membenci para makelar kasus. Kasus korupsi pajak, contohnya, tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menyakiti hati masyarakat.

Fenomena korupsi yang diduga dilakukan aparat pajak, Gayus HP Tambunan, yang menjadi makelar kasus pajak senilai Rp 25 miliar, sangat memalukan. Gayus telah mempertontonkan kebobrokan dan praktik kotor yang terjadi kepada aparat pemerintah. Seolah-olah apa yang berkembang di tengah masyarakat mendapat pembenaran, bahwa praktik korupsi yang seperti dilakukan Gayus sudah seperti rahasia umum. Semua orang tahu, korupsi dan perilaku kotor semacam itu sebetulnya puncak gunung es. Malah dikatakan Indonesia perlu waktu 30 tahun lebih untuk menghilangkan semua itu.

Sekarang kita berharap, terbukanya kotak Susno akan memutarbalikkan keadaan dengan menekan praktik korupsi di tanah air. Tetapi tergantung bagaimana hukum membuat pelaku jera dan calon pelaku takut untuk korupsi. (*)

15 April 2009

Artis Senayan

Ada mata rantai antara kekuasaan dan materi dalam dunia politik, sehingga memunculkan dua tipe manusia. Yaitu, mereka yang menguasai kekayaan lebih dahulu lalu terjun ke dunia politik atau berpolitik dulu untuk mencapai puncak sebagai wakil rakyat lalu menumpuk kekayaan. Makanya tak heran banyak yang mengandalkan materi untuk meraih kursi di parlemen, atau sebaliknya banyak yang menjadi kaya mendadak setelah di parlemen.

Namun pemilu yang baru lewat, ternyata mengubah keadaan dengan lolosnya sejumlah caleg dari kalangan artis. Tentu mereka jauh dari ukuran politikus ulung atau senior karena direkrut menjelang pencalonan. Mereka juga tidak mengandalkan materi untuk dicalon-

kan karena partai mengundang para artis hanya sebagai pendulang suara.

Tak dapat dipungkiri, fenomena yang sudah berkembang sejak zaman orde baru tetapi mulai marak sejak pemilu tahun 2004 ini, partai politik selalu memanfaatkan daya pikat selebriti untuk mempengaruhi pemilih. Ada sebagian selebriti yang memang sudah lama bergabung dengan parpol tertentu, tetapi ada pula wajah baru lewat jalur khusus. Mungkin partai berpikir untuk daerah yang sudah pasti sulit meraih suara, mengapa tidak mencoba artis yang sudah pasti populer di masyarakat. Kuncinya, yang penting dapat kursi di Senayan.

Tetapi kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap gerbong artis, sebab semua orang memiliki hak politik yang sama. Meskipun perekrutan para selebriti ini ada hubungan langsung dengan kegiatan “hiburan” di lapangan, terutama semasa kampanye. Sebab kita selalu berharap, para artis ini bisa belajar cepat dan bisa mengubah perilakunya, dari dunia gemerlap ke dunia yang butuh kerja keras membela kesejahteraan rakyat.

Memang tidak dapat dibayangkan, bagaimana seorang artis lenong seperti Mandra bisa memberikan masukan terhadap pembuatan satu undang-undang yang menyangkut hidup orang banyak. Sebab dalam membahas satu rancangan undang-undang, para legislatif harus banyak membaca dan butuh referensi yang jika ditumpuk maka tingginya hampir satu meter.

Dokumen itu bukan hanya perlu dibaca cepat, tetapi harus segera dipahami. Tetapi kita tentu berharap Mandra cepat mengikuti kursus singkat dan banyak berbagi ilmu dengan seniornya jika benar-benar terpilih.

Sebab kalau artis yang hanya mau dimanfaatkan sebagai pajangan oleh parpol dengan ganjaran segudang fasilitas dan hak istimewa, ya selebriti tersebut benar-benar termasuk golongan orang bodoh. Seharusnya dia memiliki sikap sebagai wakil rakyat ketika duduk di DPR, karena ukuran kebahagiaan orang apalagi seorang artis yang sudah bergelimangan kekayaan dan publisitas, bukan lagi fasilitas dan hak istimewa.

Mungkin seorang artis yang terpilih dapat memulai dengan hal-hal sederhana. Jika mereka serius sebagai wakil rakyat dan lebih sering berada di tengah rakyat dan mau mendengarkan keluh kesah konstituen, pasti akan mendapat kepercayaan. Selain itu, artis mampu membangkitkan semangat perubahan kepada para pendukung mereka. Sebagai artis yang memiliki peran sebagai *public figure*, bukan cuma dandanan rambutnya yang akan ditiru, tetapi perilakunya sehari-hari. Jika sedikit saja mau memberi contoh baik, misalnya menghormati hukum, tidak korup, tampil sederhana, pasti konstituennya akan meniru, terutama generasi muda. Hal itu dapat dilihat dari sosok almarhum Sophan Sophiaan.

Saya termasuk tidak khawatir dengan artis. Mereka juga punya hak untuk mencalonkan, dan yang memilih

juga berhak untuk mencontreng nama mereka. Bahkan politikus kawakan Taufik Kiemas di Jawa Barat kalah telak dengan artis Rieke Diah Pitaloka. Jadi siapa yang bisa protes, karena kualitas Rieke juga tidak buruk. Reike memiliki pengalaman di LSM perempuan dan sekolah S2 di Universitas Indonesia.

Selain karena Pemilu sudah lewat, dan hasilnya tidak menunggu perhitungan. Kita tidak bisa lagi menjadikan selebriti sebagai variabel penentu kualitas caleg di Senayan. Hal ini tidak adil, sebab ada juga artis yang berkualitas, atau setidaknya perilakunya jauh dari gosip buruk. Atau, jangan-jangan para artis ini membuat koalisi sendiri untuk mengubah citra DPR. Bisa saja seusai Pemilu 2009 justru kaum selebriti-artis-lah membentuk kelompok untuk mengubah Senayan menjadi rumah rakyat yang bersih.

Kita berharap semoga pilihan rakyat Indonesia sudah benar. Lebih baik kursi DPR diisi artis sesungguhnya, daripada terdiri dari pada politikus yang kerja hanya bersandiwara menipu rakyat. Jangan lupa, pada zaman orde baru, konon Srimulat yang manggung di Taman Ria Senayan gulung tikar karena sepi penonton, karena katanya kalah lucu dengan dengan tetangganya di Senayan.(*)

16 april 2009

Kartini

Skandal korupsi yang terbongkar di negara ini sepertinya tak pernah habis-habisnya. Belum usai dengan cerita kebobrokan Bank Century, publik kembali dikejutkan dengan munculnya kasus yang melibatkan oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagai rakyat kecil, kita hanya bisa mengelus dada. Di tengah carut-marut penegakan hukum dan masih banyak penduduk kelaparan, ternyata masih banyak manusia Indonesia yang tega berbuat nista mengkhianati kepercayaan sebagai penyelenggara negara. Memang, seberapa pun besar gaji dan kesejahteraan yang mereka terima akan merasa kurang dan kurang.

Tanpa ingin mereduksi peran perempuan dengan mengurai peran ibu dan istri dengan tugas utama dan pertama-tama adalah sebagai pendamping suami dan

mengurus anak-anak penerus bangsa, Kartini-kartini zaman sekarang bisa mengatasi krisis korupsi yang dihadapi bangsa ini. Yakni memperkuat kembali peran perempuan dalam keluarga karena dalam satu keluarga penuh itu sosok seorang ibu memiliki peran yang begitu mendalam dan begitu suci. Kita boleh saja begitu sayang dengan mainan atau pacar kita, tetapi tidak satu pun yang dapat menandingi kasih seorang ibu kepada anak-anaknya.

Kalau kita mengingat perjuangan Kartini untuk perempuan Pribumi, maka kita selalu bertanya-tanya, masih relevankah perjuangan Kartini untuk perempuan Indonesia zaman sekarang? Jawaban orang yang mengerti perjuangan Kartini yang tersirat dari surat-suratnya, tentu masih sangat relevan. Jika bicara masalah mengatasi persoalan bangsa saat ini, maka salah satu isi surat Kartini sangat relevan untuk menuntut perempuan mendidik anak-anaknya untuk berbakti kepada negara dan bangsa dan menjaga amanah yang diemban.

Salah satu kutipan surat itu adalah, “Tangan ibulah yang dapat meletakkan dalam hati sanubari manusia, unsur pertama kebaikan kejahatan, yang nantinya akan sangat berarti pada kehidupan selanjutnya. Tidak tanpa alasan orang mengatakan, bahwa kebaikan atau kejahatan itu diminum bersama air susu ibu. Dan bagaimana ibu-ibu Jawa dapat mendidik anak, kalau ia sendiri tidak berpendidikan.”

Jadi kalau ingin memperingati Hari Kartini dan meneladani sikap Kartini, maka bukanlah memujajujinya sebagai dewi, melainkan meneladaninya sebagaimana ia melintasi kepahitan hidupnya sebagai perempuan. Terutama dalam gagasan sebagai seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya untuk berbuat kebaikan, dan menjauhi segala tindakan kejahatan.

Perempuan sekarang memang harus terus berjuang untuk sejajar dengan laki-laki seperti perjuangan Kartini. Namun perjuangan “Kartini” sekarang bisa dikatakan bukan lagi untuk membebaskan perempuan dari “belenggu” untuk menikmati kebebasan dalam arti fisik dan psikis. Melainkan yang masih sangat relevan adalah membebaskan bangsa ini dari kebodohan dan kemiskinan. Salah satu caranya adalah melawan korupsi yang nyata-nyata telah menyebabkan negara kehilangan kemampuan menghapus kemiskinan.

Selain berperan dalam keluarga, perempuan juga bisa terlibat langsung untuk mencegah korupsi di pemerintahan sebab korupsi tidak selalu berarti mencuri uang secara langsung. Korupsi juga dapat dilakukan melalui desain anggaran publik yang tidak memihak pada kepentingan publik, melainkan lebih menguntungkan para penyusun anggaran. Misalnya salah satu temuan ICW mengenai praktik penyusunan anggaran di daerah adalah rendahnya anggaran kesehatan di beberapa daerah di Jawa Barat dan Jawa Timur, yaitu sekitar 4 persen, sementara anggaran untuk ormas 16 persen.

ICW juga mencatat lemahnya kebijakan penggunaan anggaran dalam isu gender akibat rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Padahal, perempuan berkepentingan langsung dengan penyusunan anggaran belanja, terutama untuk bidang kesehatan dan pendidikan yang sering disebut lekat dengan perempuan.

Memang tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat menghilangkan korupsi 100 persen. Tetapi harapan mengurangi praktik korupsi tetap ada dengan perubahan perilaku dan menginstitutionalkan kekuatan untuk melawan korupsi dan dukungan pada akuntabilitas. Perempuan sebagai warga negara, dapat terlibat di dalamnya dalam mengontrol dan mengakses alokasi anggaran. (*)

22 April 2009

Koalisi Feminin dan Maskulin

Setelah pemilu legislatif, partai yang masuk 10 besar mulai sibuk untuk melakukan koalisi dengan lobi panjang. Semua berencana melakukan koalisi untuk menjalin pemerintahan kuat dengan menentukan pembagian porsi kekuasaan. Meskipun idealnya koalisi adalah mengedepankan penyatuan visi dan misi untuk mensejahterakan rakyat.

Bagi caleg perempuan yang lolos ke DPR juga memerlukan hal sama kelak di Senayan dengan melakukan koalisi sesama perempuan, bahkan dengan kelompok laki-laki di DPR. Tentu koalisi kaum feminin dan maskulin ini bisa dilakukan secara adil karena posisi tawar anggota DPR perempuan semakin baik seiring peningkatan kuantitas dan kualitas mereka di DPR.

Apalagi peran perempuan Indonesia dalam dunia politik di tanah air pada saat ini, boleh dikatakan relatif mulai membaik. Meskipun ada yang pesimis menunggu bukti peran perempuan di parlemen, namun setidaknya tidaknya dari kuantitas jumlah anggota legislatif dari kalangan perempuan dipastikan akan bertambah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, dari Sulawesi Selatan diperkirakan akan mengirim sedikitnya lima perempuan atau 25 persen dari total wakil rakyat ke Senayan. Antara lain A Timo Pangerang yang akan masuk ke arena sesungguhnya dan membuktikan perempuan juga mempunyai kemampuan untuk berkiprah di dunia politik.

Tentu jumlah keanggotaan di DPR menjadi sumber kekuatan, dan untuk bisa mempengaruhi pengambilan keputusan perempuan di parlemen harus semakin intensif melakukan advokasi dengan tindakan strategis yang mendorong para *stakeholders* yaitu anggota parpol dan parlemen membuat proses yang lebih terbuka dan lebih partisipatif. Padahal, perempuan di parlemen harus memperjuangkan isu gender *budget*, yaitu memasukkan isu gender ke dalam ekonomi makro anggaran belanja. Misalnya anggaran untuk tindakan khusus sementara dalam pendidikan dan kesehatan.

Tentu sebagian di antaranya sudah punya pengalaman di parlemen dan telah membentuk kelompok yang disebut Kaukus Perempuan untuk memperkuat posisi politik dari kelompok minoritas ini. Dengan

bertambahnya jumlah mereka di parlemen saat ini, tentu bentuk koalisi haruslah diperluas dengan tujuan memperjuangkan pembentukan undang-undang yang memihak kaum perempuan.

Kita harus menyadari, perempuan masuk ke parlemen tentu tak akan bekerja sendirian, melainkan akan mendapat dukungan dari masyarakat dengan saling melengkapi. Dan yang terpenting harus mendapat dukung dari kolega mereka di DPR, terutama dari kelompok maskulin. Sebab kehadiran perempuan di ranah politik sangat dipengaruhi pembentukan persepsi masyarakat tentang peran sosial perempuan dan laki-laki.

Hampir semua masyarakat di dunia adalah masyarakat patriarki, yang didominasi nilai-nilai maskulin yang menganggap nilai-nilai feminin lebih rendah dibandingkan yang maskulin. Akibatnya, perempuan sebagai kelompok yang diidentikkan dengan pemilik sifat-sifat feminin, dianggap tidak setara dengan laki-laki, lebih pantas berada di ranah domestik mengurus hal-hal yang bersifat reproduktif daripada yang produktif. Demi keadilan kelompok feminin harus kuat secara kualitas meskipun jumlahnya tidak banyak, supaya kepentingan dan aspirasi perempuan terwakili. Argumen lain adalah bahwa perempuan memiliki pengalaman berbeda dari laki-laki, karena itu perempuan harus disertakan dalam politik sebagai wujud adanya masyarakat yang demokratis.

Jadi dengan menjalin koalisi dengan kaum maskulin, perempuan bisa mengejar ketertinggalan dan bukan untuk memusuhi laki-laki untuk merebut pengaruh masing-masing. Dalam laporan Bank Dunia tentang *Gender and Development* disebutkan bahwa membangun kesetaraan dan keadilan gender pada akhirnya adalah menguntungkan kedua belah pihak antara kaum *feminism* dan maskulin. Alasan untuk berkoalisi cukup kuat karena bila perempuan memiliki peran lebih banyak, mereka akan lebih baik dan berdaya untuk memberi sumbangan pemikiran yang lebih baik, tentu untuk rakyat, khususnya kelompok perempuan.

Selain itu, hingga saat ini, gerakan perempuan dalam kepemimpinan nasional belum begitu kuat. Padahal kepemimpinan nasional adalah masalah sensitif yang akan sangat mempengaruhi nasib ekonomi sosial politik perempuan ke depan. Jika perempuan tidak mampu menyuarakan ide bersama tentang kepemimpinan ke depan, niscaya posisi perempuan tidak akan banyak berubah. Semoga dalam lima tahun ke depan, kekuatan perempuan akan lebih besar dan terorganisasi untuk memperjuangkan kepentingan politiknya.

23 april 2009

Mimpi Jupe

Pemain film dan juga penyanyi Julia Perez tidak lagi terkenal hanya karena profesinya, tetapi saat ini karena niatnya untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil bupati Pacitan dalam ajang Pemilihan Umum Kepala Daerah 2010-2015. Artis bernama asli Yuli Rachmawati yang sering disorot karena kerap berpenampilan seksi ini sudah menyesuaikan gaya berpakaian dengan mengenakan kerudung. Terutama saat mengunjungi Kabupaten Pacitan beberapa waktu lalu. Tidak tanggung-tanggung untuk pencitraan, dia menyempatkan diri mengunjungi pondok pesantren dan berdialog dengan santri.

Meskipun artis yang populer dengan nama Jupe optimis bisa menerima amanah sebagai wakil kepala daerah, namun tidak sedikit yang meragukan ke-

mampuannya. Bahkan tak secara langsung, kehadirannya dalam kancah politik pilkada, memancing reaksi pemerintah yang merespons dengan mengusulkan macam-macam persyaratan jika seseorang ingin ikut serta dalam pemilukada, seperti syarat pengalaman atau tidak cacat moral segala. Syarat-syarat tersebut terkesan akan mencekal Jupe, dan mungkin “Jupe-Jupe” lainnya. Secara umum, mungkin perempuan-perempuan yang populer dan dipercaya rakyat tetapi dianggap lemah karena persepsi peraturan yang tidak seragam.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah mengusulkan syarat pengalaman di bidang pemerintahan bagi calon kepala daerah yang maju dalam pemilukada. Padahal kalau dihitung-hitung, dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah ada 16 syarat panjang. Syarat akan ditambah karena pemerintah menilai seorang kepala daerah adalah representasi dari wilayah dan motor penggerak kemajuan daerah. Sebab jika syarat terlalu mudah, maka semua orang akan bisa menjadi kepala daerah. Padahal pemerintah menganggap tidak ada orang yang bisa dengan tiba-tiba jadi pemimpin. Para calon yang dinilai sama sekali tak berpengalaman harus ditolak karena dipastikan belum mengerti APBD, tidak tahu bagaimana pemerintahan, bagaimana birokrasi, bagaimana perencanaan, atau bagaimana hubungan suatu wilayah dengan wilayah lain.

Satu syarat yang juga akan diajukan pemerintah yang menimbulkan kontroversial adalah tidak cacat moral. Alasan pemerintah mengusulkan syarat tersebut karena kondisi sosial masyarakat di Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat sebagai negara demokrat. Di Indonesia dibutuhkan peran pemerintah untuk mengatur syarat-syarat pemimpin daerah. Namun selain kemampuan Jupe untuk maju, sebenarnya masyarakat sadar bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memanfaatkan popularitas sebenarnya tidak baik dan tidak layak untuk dipilih. Tetapi rakyat mungkin tidak memiliki pilihan lain karena partai politik sebagai pengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memang tidak memberikan pilihan calon yang berkualitas untuk dipilih. Apalagi para calon kepala daerah selalu mengklaim bahwa mereka sudah mengumpulkan dukungan suara dari publik.

Jadi, seharusnya partai politik mempunyai tanggung jawab moral untuk menyeleksi calon kepala daerah. Sebab tujuan utama dari demokrasi adalah kesejahteraan. Jika partai politik ingin memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya dalam pemilukada, maka parpol diharapkan menyaring calon-calon yang akan diajukan sebagai pemimpin daerah. Jika kondisinya seperti sekarang ini, banyak artis yang akan maju dalam pemilukada karena modal popularitas tanpa kemampuan yang sudah teruji, maka itu adalah kesalahan parpol yang terbentuk tanpa ideologi yang jelas. Akibat-

nya, demokrasi yang terbentuk adalah demokrasi prosedural, bukan substansinya. Setiap kebijakan parpol juga hanya berdasarkan keputusan transaksional.

Jika tidak ada penyaringan berdasarkan kemampuan memimpin suatu daerah, maka fenomena artis yang menjadi calon kepala daerah bisa membahayakan perkembangan demokrasi di Indonesia. Bangsa ini, terutama tingkat daerah tak bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Sebagai artis yang mencalonkan diri, sebaiknya memiliki integritas, kapasitas, dan elektabilitas. Jadi jangan mengutamakan popularitas dalam memilih calon kepala daerah.

Popularitas dinilai tidak menjamin seseorang bisa terpilih dan mampu memimpin. Tetapi sekarang zamannya demokrasi, siapa pun boleh mencalonkan sebagai bupati dan wakil bupati, termasuk Jupe. Apalagi kalau artis seperti Jupe yang menguasai tiga bahasa asing; Inggris, Prancis, dan Belanda. Tetapi kita berharap pemilih bisa kritis melihat apakah Jupe bisa memimpin jika dipilih, karena sebuah amanah tidak pernah mudah untuk dipegang.

29 april 2009

Korban atau Inspirasi

Perempuan dalam menghadapi kemiskinan, penindasan, atau kekerasan, selalu dipandang sebagai korban. Padahal tak sedikit dari kelompok perempuan yang memiliki kekuatan untuk bertahan yang dapat menjadi motivator untuk menghilangkan masalah yang dihadapi perempuan. Pengalaman mereka yang bertahan, mampu menjadi inspirasi bagi siapapun yang berjuang untuk keadilan di seluruh dunia.

Hal ini tergambar dalam buku *Half Sky: Mengubah Penindasan menjadi Peluang untuk Perempuan di Seluruh Dunia*. Karya suami-istri pemenang hadiah Pulitzer, Nicholas Kristof dan Sheryl WuDunn, ini menunjukkan bahwa tantangan yang tak terbayangkan sering bertemu dengan keberanian hati. Cerita-cerita dalam buku tersebut menunjukkan sebuah ketidak-

berdayaan bisa menjadi sebuah keberhasilan. Lebih lanjut, silakan mengunjungi *www.halfthesky-movement.org*.

Bahkan, lebih ekstrem lagi, buku ini hendak menuntun kita ke pemikiran bahwa kunci untuk kemajuan ekonomi di dunia sesungguhnya terletak pada tangan perempuan. Terutama jika potensi yang ada dalam setiap perempuan benar-benar dimanfaatkan dengan berbagai cara. Misalnya dengan aksi membuat perempuan menjadi lebih cerdas, seperti banyak ibu hamil yang hidup dalam kemiskinan tidak mendapatkan yodium dengan jumlah yang cukup sehingga otak janin mereka tidak berkembang dengan baik. Rata-rata anak-anak mereka kehilangan 15 poin IQ, khususnya gadis-gadis dengan alasan yang sebenarnya sepele hanya akibat ketidaktahuan dan solusinya tidak memakan biaya tinggi karena hanya perlu sedikit garam setiap tahun.

Dalam buku tersebut juga menggambarkan bagaimana masalah ekonomi bisa diatasi dengan memberikan sedikit dukungan usaha kepada perempuan. Misalnya dengan pinjaman mikro kredit sebesar Rp 500.000, seorang wanita dapat memulai usaha untuk mendapatkan pendapatan yang bisa digunakan untuk memberi makan anak-anaknya dan mengirimnya ke sekolah.

Bisa juga dengan dukungan pemerintah memastikan setiap perempuan untuk tetap bersekolah. Asumsinya,

seorang perempuan yang mendapat pendidikan akan memiliki anak lebih sedikit, mendapatkan penghasilan lebih banyak, dan bisa membantu adik-adiknya. Salah satu program dukungan yang sangat baik dilaksanakan di Kamboja, di mana perempuan tidak berpendidikan lebih berisiko menjadi korban *trafficking* ke rumah bordil. Tetapi dengan hanya Rp 100.000 per bulan, kita bisa memastikan seorang perempuan tetap di bangku sekolah, atau kalau lebih banyak dana maka dapat membangun seluruh sekolah yang akan merevolusi hidup di desa selamanya.

Mungkin sebagian dari kita tidak menyadari bagaimana perempuan sangat kreatif dan kuat. Meskipun sehari-hari kita melihat bagaimana mereka memang kerap mengeluh, tetapi mereka dapat menggunakan uang belanja yang terbatas dengan cara mereka dalam krisis apapun. Perempuan juga tahu bagaimana untuk membesarkan anak-anak, mengenali dokter yang baik, dan apapun yang terbaik bagi anaknya.

6 Mei 2009

Generasi Baru

Kita pasti percaya dengan credo bahwa generasi yang baik tentu hanya akan diperoleh dari orang tua-orang tua yang baik. Jika anak-anak yang tumbuh menjadi penerus generasi tua diibaratkan bibit, maka yang menyemai adalah para orang tua di rumah agar kelak tumbuh menjadi pohon yang kuat dengan hasil yang maksimal.

Jadi kalau kita kecewa dengan kondisi saat ini yang masih serba penuh dengan berita-berita korupsi, maka rumahlah satu-satunya tempat untuk mengubah keadaan tersebut. Sehingga tidak ada lagi kasus korupsi saling bergantian muncul.

Bukan hanya masalah korupsi, tetapi kita juga resah dengan aksi menyatakan pendapat yang selalu berakhir dengan tindakan brutal, merusak, dan

merugikan orang lain karena tak bisa mengendalikan amarah. Entahlah salah siapa, tetapi penyebab yang mendasar adalah buntunya komunikasi dan tidak ada kesantunan untuk berdialog.

Apalagi mengajarkan ilmu untuk tidak korupsi atau santun dalam menyatakan pendapat memang sulit diajarkan di bangku sekolah atau kuliah. Bahkan ilmu yang diperoleh dari lembaga formal disalahgunakan justru untuk melanggar peraturan yang baku untuk korupsi. Misalnya Gayus yang sudah dibiayai dan digaji saat belajar, ternyata kini mendekam di penjara atas dugaan kasus menumpuk kekayaan dengan memanipulasi kasus-kasus pajak yang ditangani.

Nilai-nilai hidup positif yaitu *sipakataui, sipakalebbi, sipakainge, mabbulo sibatang* serta karakter seorang mulia yaitu jika dipercaya tidak khianat, jika diharapkan tidak membuat kecewa, jika berjanji tidak ingkar, jika diberi amanah bertanggung jawab perlu diajarkan sejak anak usia dini. Pembentukan karakter individu dimulai sejak dalam kandungan sampai usia 5 tahun adalah masa paling tepat.

Kesuksesan mendidik anak tak pernah lepas dari orang tua. Imam Hasan Al-Banna berkata: "Asas kebaikan bangsa adalah kebaikan keluarga." Anak-anak yang nantinya akan menggantikan posisi orang tua mereka dididik dengan penuh kejujuran untuk mengabdikan kepada rakyat dan negara.

Oleh karena itu, orang tua, ayah dan ibu, laki-laki dan perempuan haruslah memberikan contoh sebagai pasangan pemimpin di rumah yang akur. Tidak ada kekerasan di rumah, sehingga mendidik anak sekaligus menjadi teladan. (*)

13 Mei 2009

Koalisi Tanpa Perempuan

Partai Demokrat hampir pasti memilih Boediono sebagai calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pemilu Presiden 2009. Meski baru diumumkan 15 Mei nanti, tetapi pilihan itu sudah membuat gerah sejumlah partai pendukung yang sebelumnya mencalonkan kadernya sebagai pendamping SBY. Alasannya bukan soal kursi melainkan karena alasan etika berkomunikasi yang tidak jalan. PKS, PAN, dan PPP merasa perlu diajak duduk bersama untuk membicarakan alasan memilih Boediono.

Mengapa kemudian muncul ribut-ribut mengenai persoalan komunikasi, sebenarnya tak lepas dari komitmen partai untuk berkoalisi dengan alasan memperkuat posisi di parlemen. Dasarnya, tidak ada

partai mayoritas tunggal dalam pemilu legislatif sehingga mau tidak mau harus “kawin” dengan partai lain. Walau kesamaan platform disebut-sebut sebagai dasar koalisi, namun tujuan yang paling mudah ditebak adalah bagi-bagi kekuasaan. Jika bukan karena kursi capres, cawapres, atau nanti menteri, bahkan nanti di parlemen, maka akan ada lagi pembagian kursi pimpinan MPR, DPR, pimpinan fraksi, dan ketua komisi. Jadi platform sebenarnya bisa disamakan, yang berbeda adalah kepentingan sehingga perlu dinegosiasikan pembagian kursi-kursi kekuasaan.

Namun dari semua proses koalisi bagi semua partai di media cetak dan televisi, kita tak pernah melihat politikus perempuan yang dilibatkan. Bahkan tak satu pun dari anggota legislatif yang terpilih ikut dalam pembicaraan koalisi antar-partai politik. Apakah mereka tidak punya suara untuk menolak koalisi jika melihat partai A dianggap tidak memperhatikan hak perempuan selama ini. Lalu bagaimana mereka bisa memperjuangkan hak-hak khusus perempuan atau anggaran yang sadar gender kalau koalisi untuk mendukung pemerintah sudah diteken jauh-jauh hari sebelum mereka bekerja.

Tetapi apakah koalisi tidak penting? Tentu memang harus dilakukan koalisi untuk mencapai persyaratan. Jadi bukan koalisi untuk menjadi mayoritas di parlemen dan melindungi pemerintah agar bisa bekerja tenang tanpa diganggu. Jika hal ini terjadi, sama saja orang-

orang di parlemen tidak punya kontrol, apalagi mau mengusulkan program kepada pemerintah. Termasuk, bagaimana bila kelompok perempuan menyuarakan kepentingannya sebagai wakil perempuan.

Jika koalisi menafikan peran perempuan di parlemen yang sebenarnya jumlahnya tidak banyak bertambah dari pemilu ke pemilu, maka kesepakatan *affirmative* menjadi tidak berarti. Kondisi ini sama saja menjadikan perempuan tak terwakili di lembaga legislatif, meskipun secara fisik mereka ada di Senayan. Padahal, perjuangan perempuan untuk masuk ke parlemen sangat berat dan butuh waktu panjang karena pola partisipasi dan rekrutmen politikus perempuan yang belum baku; pola sosialisasi serta pendidikan politik perempuan yang belum mengakar; dan adanya dominasi laki-laki atas perempuan, maka sekarang karena *deal-deal* politik dari induk partainya.

Koalisi partai politik yang terlalu gemuk dan kuat di parlemen, juga akan membuat politikus perempuan menjadi mandul untuk membawa aspirasi dan memperbaiki nasib rakyat yang diwakilinya. Sebab mereka akhirnya akan tunduk pada keputusan koalisi dan rakyat terpaksa diabaikan. Padahal, seorang politikus harus tetap konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat untuk dibawa ke arena politik. Apalagi bagi politikus perempuan, pasti akan semakin sulit memengaruhi sikap partainya. Padahal, perempuan berjuang agar bisa terjun ke dunia politik dan masuk partai politik sebagai

kendaraan untuk membawa misi pembelaan secara khusus kepada kelompok perempuan. Sebab di negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat, termasuk perempuan, memiliki dasar ideologis bahwa seluruh rakyat berhak ikut serta menentukan pemimpin dan kebijakan publik.

Prof Miriam Budiardjo dalam buku “Dasar- Dasar Ilmu Politik” mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Tentu dengan cara konstitusional agar dapat menjalankan kebijakan partai.

Sementara kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang mencakup semua kegiatan sukarela, di mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan, dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Jika sudah memiliki kursi di parlemen atau kekuasaan di pemerintahan, wajib memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

Saat ini, rakyat sedang menunggu kiprah para politikus perempuan di DPR. Rakyat berharap, mereka tidak sekadar mengikuti kebijakan partai, atau keputusan koalisi pendukung pemerintah, tetapi juga mendengar dan memperjuangkan suara rakyat, khususnya kepentingan perempuan. Semoga proses koalisi

tidak mempengaruhi perjuangan koalisi perempuan di parlemen. (*)

14 Mei 2009

Belajar dari Kesalahan

Akhir-akhir ini di media massa, misalnya di televisi dan koran, ramai diberitakan adu kekuatan, salah menyalahkan, individu yang satu merasa lebih baik dari yang lain, sehingga pemirsa atau pembaca menyimpulkan bahwa terjadi konflik antara mereka. Diakui atau tidak, ada kepentingan terselubung di balik itu. Entah itu suatu proses membangun opini atau pembunuhan karakter atau sebuah usaha untuk menggagalkan program kerja atau melempar isu bernuansa provokasi.

Padahal, kalau kita masih menganggap diri kita manusia biasa, tentu kita semua tak ada yang luput dari berbuat kesalahan. Dan tentu kita semua tidak suka membuat kesalahan. Jadi yang paling baik dan bijak, adalah belajar dari kesalahan kita atau orang lain untuk masa depan.

Semua kita percaya bahwa kesalahan adalah pengalaman yang paling berharga. Justru dengan kesalahan yang berulang, terkadang membuat seseorang meraih kesuksesan. Apalagi kalau membangun sesuatu, tentu tidak pernah selesai. Selalu ada kekurangan, yang harus ditambah sesuai kebutuhan dan keinginan. Seperti membangun sebuah rumah, terkadang kita selalu melihat ada yang salah dan segera memperbaiki sehingga bangunannya semakin nyaman dihuni dan elok dipandang.

Kita juga harus menyadari bahwa kesalahan adalah bagian penting dari perbaikan diri. Bagi individu yang terzalimi oleh proses pembunuhan karakter, janganlah terjebak dengan perasaan bersalah dan menyesal. Tetapi perlu menganalisis bagaimana kesalahan itu terjadi. Kita dapat belajar dari kesalahan tersebut.

Jika takut membuat kesalahan dalam kehidupan ini, maka kita akan sulit bergerak untuk maju. Akhirnya kita akan menghabiskan sebagian besar hidup tanpa mencoba melakukan apa pun.

Jadi, tidak ada salahnya membuat kesalahan. Itu adalah bagian penting untuk maju. Semakin banyak tanggung jawab yang kita ambil, maka semakin besar kemungkinan akan melakukan kesalahan. Jika selalu merasa perlu untuk menghindari kesalahan maka akan menjadi penghalang psikologis untuk mengambil risiko. Jika kita membuat kesalahan, jangan mundur ke belakang tetapi tetap maju. Apalagi kalau menjadi

pemimpin, maka selalu harus siap untuk menghadapi risiko.

Bila kita percaya manusia diciptakan memiliki sisi baik dan buruk, maka kita pasti tidak cepat menyalahkan, tidak langsung memojokkan, dan tidak cepat kehilangan kepercayaan. Oleh karena itu, tatkala jadi penonton, jangan merasa lebih pintar, lebih adil, atau lebih baik. Meskipun tetap saja, ada manusia yang menonjol buruknya, tetapi tentu memiliki juga kebaikan. Ada kata bijak, seseorang yang baik, bisa melihat sisi kebaikan dari musuhnya. Sehingga dari seorang musuh pun dapat bekerja sama untuk berkarya bagi banyak orang.

Jadi, yang penting adalah mengakui kesalahan, berjanji tidak mengulang, dan memperbaiki kesalahan itu. Tetapi kalau membuat kesalahan yang mencelakai orang lain, adalah penting untuk mengajukan permintaan maaf. Mungkin kita perlu menjelaskan bahwa itu adalah insiden yang sangat disayangkan terjadi. Dan tak lupa berkomitmen untuk tidak mengulang kembali. Sebuah permintaan maaf yang baik dapat mendatangkan kepercayaan kembali. Jika kita masih sulit untuk meminta maaf karena malu atau enggan, maka kita akan kehilangan dukungan. Sebaliknya, jika permintaan maaf kita tulus, orang lain mungkin akan mengampuni dan memberikan penghormatan. (*)

20 Mei 2009

Obama dan JK

Ketika sudah memastikan siap menjadi calon presiden (capres), HM Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa kemutlakan pasangan presiden dan wakil presiden dari Jawa dan nonJawa hanyalah sebuah mitos. Dalam masyarakat yang makin rasional, seorang pemimpin ditentukan oleh kapabilitas dan elektabilitasnya. Jadi tidak ada lagi urusan apakah dia bukan Jawa atau orang Jawa, tetap bisa menjadi orang nomor satu di negeri ini.

Meskipun pernyataan itu bertolak belakang dari pernyataan awalnya yang memastikan bahwa tidak mungkin orang non Jawa menjadi presiden, banyak yang mengartikan pernyataan tersebut sebagai penolakan terhadap sejumlah pihak yang waktu itu sudah melihat bahwa mantan saudagar Bugis ini mampu

memimpin bangsa Indonesia. Lalu mengapa masalah Jawa-nonJawa menjadi persoalan?

Jika melihat potensi pemilih di Indonesia maka kecenderungan pemenang dalam pemilu adalah yang menguasai Pulau Jawa, maka hal ini menjadi logis jika banyak kalangan beranggapan bahwa pemimpin di negeri ini haruslah orang Jawa. Dan untuk mewakili kelompok di luar Jawa, sehingga belakangan memunculkan wacana memasang capres dan cawapres dengan pasangan nonJawa, seperti Soekarno-Hatta atau SBY-JK.

Hal ini juga yang memunculkan sikap pesimistis bahwa capres dari luarJawa akan sulit menang karena dukungan akan sedikit jika melihat kenyataan bahwa 60 persen pemilih di Indonesia berada di Jawa. Belum ada jaminan, apakah kelompok pemilih yang berada di Jawa akan menerima dipimpin orang luar Jawa. Itu bukan persoalan etnis semata, melainkan belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya.

Lagi pula, figur presiden selama 63 tahun merdeka, lima dari enam presiden RI, hanya BJ Habibie yang bukan dari Jawa. Itupun, BJ Habibie menjabat hanya pada masa transisi pasca pengunduran diri Soeharto. Selain itu, posisi tertinggi bagi orang luar Jawa adalah wakil presiden. Diawali Mohammad Hatta asal Sumatera Barat hingga JK dari Sulawesi Selatan.

Berkaca pada dominasi kepemimpinan ini, pengamat politik William Liddle menyebutnya sebagai

“kekuasaan yang sangat dipengaruhi oleh konsep kekuasaan Jawa” karena kuatnya dominasi orang Jawa tertanam dalam politik dan kekuasaan. Bahkan, ada kecenderungan etnis nonJawa mengikuti nilai-nilai kejawaan dalam kehidupan berpolitik mereka. Terutama dalam kehidupan sosial atau budaya di lingkungan kerja.

Namun keberadaan JK di puncak percaturan politik tanah air, menjadikan pemilu kali ini kembali membuktikan bagaimana kekuatan politik Jawa atau bukan Jawa bisa bersaing. Di masa sekarang, kombinasi presiden dan wakil presiden mutlak memperhitungkan calon yang mewakili atau dapat diterima oleh masyarakat di luar Jawa.

Hal itu karena dalam pemilihan langsung, capres yang bukan Jawa pun sangat berpeluang terpilih. Apalagi dengan terpilihnya Barack Hussein Obama sebagai Presiden Amerika Serikat yang sebelumnya dianggap tidak mungkin, dipastikan akan memberikan dorongan bagi calon dari luar Jawa bahwa segalanya mungkin terjadi, bergantung kemampuannya memimpin.

Sekarang antara Obama dan JK memiliki latar belakang dalam perjuangan menuju kursi nomor satu di negara masing-masing. Hal yang membedakan saat ini, Obama sudah membuat sejarah orang kulit hitam pertama yang terpilih menjadi presiden AS, sedangkan JK masih berjuang menjadi orang pertama nonJawa yang menjadi presiden di Indonesia.

Namun tentu Obama bukan terpilih karena dia berkulit hitam tetapi karena pemilih di AS percaya kemampuannya. Seperti halnya JK, jika saat ini banyak menuai dukungan, tentu bukan karena faktor luar Jawa melainkan karena *track record* dia dalam membuat program pemerintah selama menjadi wapres, dan keberhasilannya menyelesaikan konflik berkepanjangan di Ambon, Poso, dan Aceh.

Sekarang pilihan ada pada bangsa Indonesia, apakah “Obama” akan muncul juga di Indonesia? Kita lihat saja tanggal 8 Juli nanti. (*)

4 Juni 2009

Petani Mempertanyakan Pemimpin

Dalam forum petani dari puluhan organisasi yang berkumpul di Roma Italia awal Juni tahun lalu, telah muncul keresahan terhadap kondisi pangan dunia. Para petani yang bertemu dalam ajang yang merupakan pertemuan paralel dari konferensi mengenai krisis pangan yang diikuti para pemimpin dunia tersebut, cemas karena bukan hanya pangan saja yang sulit didapat saat ini, tetapi juga kesepakatan dari para pemimpin negara untuk mengatasi masalah krisis pangan.

Situasi pangan dunia saat itu memang paling parah dihadapi dunia sejak tahun 1970-an dan berpotensi memberi dampak pada sosial ekonomi dan politik di banyak negara. Kebijakan perdagangan bebas telah merusak sistem pangan dalam jangka waktu lama, dan

menyebabkan krisis pangan yang kita hadapi sekarang ini. Oleh karenanya, petani mengajak pemimpin melindungi dan mempertahankan sistem pertanian yang telah memberi makan penduduk dunia.

Keresahan petani cukup beralasan, sebab World Food Program (WFP) atau Program Pangan Dunia PBB memperkirakan sudah ada 20 juta orang yang terpuak krisis pangan. Sekitar 100 juta orang lagi kini sudah memasuki kategori kelaparan.

Salah satu lembaga pangan di Inggris mengeluarkan data lebih parah lagi, setidaknya ada 290 juta orang yang terancam karena krisis pangan. Mereka juga memperkirakan diperlukan dana ekstra sebesar USD14,5 miliar agar dapat memberikan bantuan dengan secepatnya.

Mengenai krisis ini, Direktur Jenderal Food and Agriculture Organization (FAO) Jacques Diouf mendesak bantuan negara maju harus dinaikkan sepuluh kali lipat per tahun untuk membantu negara berkembang meningkatkan kapasitas produksinya. Sebab, satu-satunya jalan untuk keluar dari krisis pangan ini adalah peningkatan produksi, khususnya di negara-negara miskin.

Harga pangan yang melonjak tinggi memang harus segera diatasi dengan cepat karena menjadi alasan kerusakan di mana-mana. Kenaikan harga pangan di mana-mana sangat memprihatinkan. Solusi sementara yang ada saat ini adalah modifikasi genetika bibit untuk perbanyak produksi pangan, mengakhiri penimbunan pangan serta penjualan pangan murah di pasar.

Kita percaya, kekacauan akibat krisis pangan dunia tidak akan terjadi di bumi Indonesia. Apalagi ancaman kematian massal, sangat kecil kemungkinannya mengancam bumi Nusantara. Tetapi Indonesia tak boleh lengah. Harus senantiasa meningkatkan pertumbuhan produksi berasnya. Beruntung Indonesia pada tahun 2007 berhasil meningkatkan produksi beras. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan angka tahun 2007 terbaik selama 10 tahun terakhir. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) juga telah mencanangkan produksi 2 juta ton.

Dengan tren lonjakan harga komoditas pangan dan meningkatnya konsumsi domestik, Sulsel yang sejak dulu terkenal sebagai lumbung padi, terus berupaya menggenjot produksi dan memperkuat ketahanan pangan di dalam negeri. Pemerintah Provinsi Sulsel telah mencanangkan kembali gerakan intensifikasi dan ekstensifikasi di daerah ini dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investor untuk masuk ke Sulsel. Sebuah gebrakan untuk meningkatkan produksi beras di tengah kondisi harga beras yang relatif baik untuk petani. Hal ini juga dimaksudkan untuk mensejahterakan rakyat Sulsel yang sebagian besar adalah petani. Semoga itu bisa terwujud.(*)

2 Juli 2009

Menuntut Ilmu Pengetahuan Gratis

Di tengah hiruk pikuk tahun ajaran baru, ada baiknya kita mengingat sebuah hadis “*Uthlubul ilma walaw bishshiin*”, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Banyak ulama yang mengutip dalam khutbah-khutbahnya karena hadis tersebut memiliki makna bahwa tuntunlah Ilmu Sampai ke Negeri China adalah baik. Kata “China” bisa jadi hanya sekadar kiasan untuk mengingatkan umat akan pentingnya mencari ilmu/ pengetahuan yang mana perlu diupayakan secara luas, bila perlu hingga ke negeri-negeri seberang.

Dan bisa dibayangkan, mengejar ilmu hingga ke negeri China membutuhkan waktu, tenaga, dan tentunya fulus. Oleh karena itu, tentu hadis ini bukan sekadar menyadarkan kita pentingnya menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga mengingatkan kita

gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lainnya. Biaya inilah yang diharapkan gratis, tidak ditarik dari siswa. Sedangkan biaya personal yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik untuk bisa teratur mengikuti proses pembelajaran dan berkelanjutan; misalnya pakaian, transportasi dari rumah ke sekolah, buku pribadi, konsumsi, dan akomodasi.

Indonesia termasuk negara yang telah mengesahkan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*. Dalam kovenan tersebut, secara eksplisit disebutkan, negara pihak (negara yang mengesahkan kovenan) wajib menyediakan pendidikan dasar bagi semua orang secara cuma-cuma. Pendidikan adalah kebutuhan dasar yang harus disediakan negara untuk rakyatnya. (*)

16 Juli 2009

Virgin Queen

Ratu Elizabeth I yang lahir tanggal 7 September 1533 punya cerita patriotis seorang pemimpin sebelum meninggal 24 Maret 1603. Yakni ketika seluruh pemerintahannya dibuat panik oleh serangan pasukan dari Spanyol yang jumlahnya terbilang besar kala itu. Nyaris tidak ada lagi rasa percaya diri dari seluruh kekuatan Inggris untuk bisa menahan serangan tentara Spanyol yang diangkut dengan kapal yang tak lama lagi akan mencapai Inggris.

Namun mujur bagi sang ratu, dia mendapatkan nasehat yang sangat tepat pada saat genting dari penasihat kerajaan. Ketika sang Ratu betul-betul terlihat putus asa karena tidak ada lagi peluang untuk mencegah kekalahan dan harus siap hidup dan mati dalam pembuangan, penasihat utama kerajaan, William Cecil

Tak mudah bagi ratu muda yang masih berusia 25 tahun kala itu, karena langsung berhadapan dengan berbagai masalah negara. Di antaranya peperangan melawan Prancis, hubungan tegang dengan Skotlandia dan Spanyol, kondisi moneter pemerintah, dan perpecahan agama waktu itu.

Namun semua masalah yang dihadapi Elizabeth I adalah juga yang membuat dia masyhur dan patut dikenang oleh pemimpin-pemimpin dunia lainnya. Termasuk bagi kita semua, bahkan dalam memimpin di mana pun, bahkan di rumah sebaiknya mampu mengambil tindakan yang tepat ketika badai datang. (*)

23 Juli 2009

Laura dan Euna

Dua wartawati AS, Laura Ling (32) dan Euna Lee (36) yang dijatuhi hukuman 12 tahun kerja paksa di penjara karena tuduhan memasuki wilayah Korea Utara tanpa izin, sangat bangga sebagai warga Negara Amerika Serikat. Mereka berterima kasih kepada pemerintahan Barack Obama yang setia mengurus warganya hingga mencapai hasil, dan mantan Presiden Clinton yang bersedia menjalankan misi tersebut.

Pemerintah AS memang sejak awal menjadikan masalah yang dihadapi kedua warga Negara AS berdarah China ini sebagai persoalan serius. Apalagi bagi keluarga Laura dan Euna, dan juga bagi warga AS, penahanan di Korea Utara yang hubungannya dengan AS tidak begitu hangat soal senjata nuklir, tentu merupakan pengalaman yang sangat mengerikan.

Kedua jurnalis televisi ini menghilang pada 17 Maret di dekat perbatasan China-Korea Utara saat meliput perdagangan manusia. Saat melaksanakan tugasnya, penjaga perbatasan Korut menangkap Ling dan Lee dan langsung dibawa ke Pyongyang dengan tuduhan kriminal. Keluarga mereka selama berbulan-bulan terus menanti kabar mengenai keduanya.

Selepas penangkapan kedua wartawan tersebut, kakak, orangtua, dan suami Laura Ling muncul di acara acara "Today Show" stasiun televisi NBC bersama suami dan putri Euna Lee yang berusia 4 tahun. Kedua suami itu memohon pengampunan kepada Korea Utara dan mendesak Pyongyang dan Washington agar tidak membuat kedua perempuan itu dilibatkan dalam permainan geopolitik yang semakin tegang. Permintaan itu, terkait dengan sensitivitas pertarungan diplomatik untuk mengekang Korea Utara dari program nuklir yang makin meruncing.

Mantan Presiden AS, Clinton akhirnya berhasil membawa pulang dua wartawan itu pada Rabu 5 Agustus setelah pembicaraan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Il, yang memaafkan dua perempuan jurnalis yang dihukum kerja paksa dengan dakwaan memasuki negara itu secara ilegal dan melakukan tindakan yang bermusuhan.

Laura dan Euna saat ini tentu sudah tiba di AS bersama Clinton yang memimpin perjalanan kemanusiaan untuk menjamin pelepasan kedua warga

Negara AS tersebut. Ini juga berarti bahwa negara langsung mengambil tanggung jawab membebaskan keduanya, melalui jalur perundingan setelah proses hukum terlaksana dengan mengajukan permintaan maaf.

Sebelumnya, bulan lalu, Hillary Rodham Clinton telah mengimbau Korea Utara untuk mengabulkan permohonan pengampunan kepada kedua jurnalis tersebut, dan menyampaikan penyesalan yang sungguh-sungguh dari keluarga mereka.

Dunia saat ini tentu melihat peristiwa pembebasan yang disiarkan berulang-ulang, bukan hanya sebagai peristiwa perlindungan yang dilakukan oleh negara terhadap warganya. Tetapi sekaligus melihat bagaimana Korea Utara juga bisa diajak berbicara oleh komunitas internasional sehingga memberikan harapan dalam perundingan senjata nuklir Korea Utara dengan komunitas internasional.

Bangsa Indonesia yang warganya banyak mencari kehidupan sebagai tenaga kerja kasar di luar negeri tentu harus banyak belajar dengan masalah ini. Pada saat ini, diperkirakan sebanyak 4 juta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berada di luar negeri. Dan selama ini, berita di Indonesia hampir tidak pernah putus mengenai perlakuan yang tidak adil, bahkan keji bagi mereka.

Bukan cuma karena terancam hukuman mati akibat perbuatan kriminal, bahkan di antara mereka menjadi

korban kekerasan dari majikan. Belum lagi generasi pilihan yang memiliki keberuntungan bersekolah di luar negeri, juga tak lepas dari masalah hukum, dan butuh perlindungan negara.

Saat ini, lebih dari 10.000 TKI telah dicambuk rotan yang menimbulkan bekas luka dan trauma mendalam. Ratusan meninggal dunia, ribuan tidak dibayar gaji, puluhan ribu dipenjara dan mengalami berbagai penderitaan. Apalagi, TKI memberikan sumbangan ekonomi yang relatif besar bagi negara. Di Malaysia saja, TKI berjumlah 1,2 juta orang (belum termasuk TKI ilegal) menyumbang devisa negara dari rata-rata gaji mereka berkisar antara RM 400 - RM 1.250 per bulan. Bila diasumsikan setiap TKI mengirim uang RM 400 per bulan x 1,2 juta orang, maka setiap bulannya remitensi dari TKI Malaysia sebesar RM 480.000.000,- (jika kurs 1 RM = Rp 2.600) maka berarti menyumbang Rp 14,976 triliun per tahun.

Belajar dari apa yang dilakukan terhadap dua jurnalis AS, pemerintah Indonesia harus memaksimalkan perlindungan bagi warganya yang tengah belajar atau bekerja di luar negeri. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak dasar WNI di negara manapun selalu terpenuhi.

Untungnya, sikap pemerintah saat ini sepertinya sudah cepat tanggap atas upaya perlindungan maupun pemberian hak-hak dasar di bidang hukum, serta jaminan kehidupan lebih baik kepada WNI di luar

negeri. Terutama terkait berbagai kasus yang menimpa para pekerja, pelajar, dan mahasiswa Indonesia di sejumlah negara. (*)

6 Agustus 2009

Belajar dari Guangzhou

Ada dua kehebatan yang dapat disaksikan dari negeri Cina, pertama kejayaan masa lalu dan kemajuan saat ini. Cina, tepatnya di Kota Guangzhou, ibukota Provinsi Guangdong, tak henti-hentinya memamerkan kehebatan mereka di abad ke-21. Guangzhou bisa memberikan harapan kepada kita bahwa kota yang otonomi bisa besar dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Siapa pun yang datang ke Kota Guangzhou akan terkagum-kagum melihat bagaimana mereka berkembang pesat mengikuti perputaran ekonomi global saat ini. Terlebih lagi bila mendengar sejarah awal lahirnya kota yang berada di sebelah Selatan Cina ini.

Guangzhou dahulu hanyalah sebuah daerah yang sangat miskin. Kemajuannya berawal dari kedatangan

seseorang pengembara dengan membawa lima ekor kambing sebagai modal untuk menggerakkan perekonomian di daerah tersebut. Sang pengembara memberikan kambing tersebut kepada warga karena umumnya mereka sangat miskin dan banyak yang mati kelaparan.

Dengan perasaan suka cita, warga Guangzhou menerima kambing tersebut. Nah, di sinilah terlihat bukti keuletan dan semangat warga Cina yang umumnya sangat kreatif. Meski mereka terkenal suka memakan apa saja, mereka tidak menyembelih lebih awal kambing pemberian tersebut, tetapi membiarkannya untuk berkembang biak terlebih dahulu sambil mulai membuka lahan semak menjadi lahan pertanian. Ternyata lahan sangat subur dan modal lima ekor kambing berkembang pesat dan selanjutnya menjadi peternakan semua jenis hewan.

Kesabaran dan kreatifitas adalah dua hal yang memang menjadi ciri masyarakat Cina, khususnya warga Guangzhou. Andai mereka tak memiliki kedua hal tersebut, maka dipastikan bahwa kambing pemberian itu sudah disembelih dan kisah tentang kota Guangzhou tidak akan seperti sekarang ini. Tetapi tentu bukan hanya semata karena kambing tersebut, mereka lantas tumbuh menjadi besar, tetapi diikuti dengan kerja keras untuk mencapai harapan.

Pada saat ini, Guangdong atau yang sebelumnya bernama Kwangtung dikenal sebagai provinsi paling

maju dalam tingkat pertumbuhan di Cina. Dari data yang ada, di tengah geliat pertumbuhan raksasa Cina rata-rata 7,3 persen per tahun, Guangdong sudah mencapai pertumbuhan 9,5 persen. Bila pendapatan rata-rata di Cina mencapai 789 dolar AS, Guangdong melejit di urutan pertama dengan pendapatan sebesar USD 2.003 per kapita.

Guangdong merupakan provinsi ke-5 terbesar yang berpenduduk 86,4 juta jiwa atau 6,7 persen dari total penduduk Cina. Namun, wilayah ini mampu menggerakkan 10 persen dari seluruh kegiatan ekonomi Cina. Kapasitas ekspor mencapai 30 persen dan menyerap investasi asing terbesar di Cina sebesar 28 persen. Sumber pendapatan terbesar Guangdong diperoleh dari Kota Guangzhou dan Shenzhen.

Guangzhou yang merupakan ibukota Provinsi Guangdong memiliki luas wilayahnya mencapai 7.434 kilometer per segi dengan penduduk sekitar 10 juta jiwa. Pertumbuhan ekonomi Guangzhou pada tahun 2001 saja sudah mencapai 12,7 persen dengan GDP sebesar Rp 268 triliun.

Guangzhou, kota yang sudah berusia di atas 2.000 tahun itu tidak tampak sebagai sebuah kota tua. Bangunan beton berdiri kokoh mengelilingi segenap kota. Namun penataan Guangzhou tidak kaku dengan tembok beton saja karena pemerintahnya juga sadar akan lingkungan. Pemerintahnya membangun ratusan taman di seluruh pelosok penjuru kota untuk keseim-

bangan alam dan menambah asri pemandangan. Kini di saat melakukan pengembangan kota, keasrian lingkungan sudah menjadi nomor satu. Guangzhou sudah bertekad untuk menjadi kota taman internasional.

Guangdong terletak di bagian Cina Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Hunan dan Jiangxi di sebelah utara. Berbatasan dengan Provinsi Fujian di Timur Laut. Berbatasan dengan daerah otonom suku Guangxi di Timur dan Laut Cina Selatan dan Provinsi Hainan di Selatan.

Perkembangan Cina secara keseluruhan yang sangat fundamental terjadi ketika dipimpin oleh Deng Xiaoping. Deng yang melanjutkan reformasi ekonomi melihat bahwa Cina perlu bergabung dalam pasar dunia. Untuk itu harus ditingkatkan perdagangan internasional dan membuka diri bagi masuknya investasi ke Cina. Pada tahun 1988 mulai dilakukan pembukaan investasi asing.

Melihat kemampuan Kota Guangzhou berkembang menjadi sangat pesat dalam perekonomian, kita akan bertanya-tanya mengapa tak bisa memiliki kemajuan seperti bangsa Cina. Namun kalau kita mau melaksanakan tekad tersebut, tentu kita dapat keluar dari jeratan kemiskinan.

13 Agustus 2009

Berdaulat secara politik, Berdikari secara ekonomi, dan Berkepribadian secara sosial budaya. Negara yang berhasil membangun kemandiriannya akan menumbuhkan kebanggaan pada warganya dan mendorong mereka berprestasi maksimal bagi kemajuan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Jadi, dengan kemandirian itulah eksistensi suatu bangsa dan standar kesejahteraan yang tinggi bagi setiap warganya akan terjamin. Membangun kemandirian bangsa di era sekarang juga berarti meningkatkan integritas dan kapabilitas bangsa untuk dapat secara cerdas menentukan pilihan dan mewujudkan cita-cita membangun negara modern yang bertumpu pada kemampuannya sendiri, dengan memanfaatkan dinamika dunia yang semakin didorong maju oleh proses globalisasi.

Oleh karena itu, kita perlu kerja keras yang cerdas dan kembali pada karakter bangsa pejuang yang ulet dan intelektual. Kerja cerdas yang akan mengantarkan kita pada kemandirian bangsa dan kemerdekaan yang sejati. Seluruh rakyat harus meningkatkan kemampuan diri. Bangsa Indonesia harus melakukan pembangunan besar atas kemampuan bangsa sendiri. Seperti kemandirian yang dirintis Wapres HM Jusuf Kalla, proyek besar seperti pembangunan bandar udara yang wajib dilaksanakan oleh bangsa sendiri. Dimulai dari pembangunan Bandara Sultan Hasanuddin (Makassar) yang dibangun oleh putra-putri Indonesia. Ternyata mereka

mampu dengan biaya yang jauh lebih murah dan pesawat pun tetap bisa mendarat dengan selamat.

Kuncinya, peningkatan kemampuan bangsa tidak bisa lain kecuali melalui pendidikan. Bangsa Indonesia harus mau bekerja keras, mau bersusah payah mengenyam pendidikan, bukan justru bersantai-santai dan mau mudahnya saja. Ada empat langkah dalam aktivitas hidup yang bisa saya bagi yaitu *pertama* tentukan impian atau cita-cita, lalu fokus kerjanya, lalu evaluasi dan analisa, lalu perbaiki. Cari solusi, jangan fokus pada kendala, lakukan terus, kerja terus, jangan pernah berhenti. Artinya, *never give up*. "Selamat menikmati kemerdekaan." (*)

20 Agustus 2009

Perempuan Xiao

Di kota Guangzhou, bila kita berkeliling berjalan kaki dari pagi hingga sore, sampai tengah malam bahkan sampai subuh, tidak perlu takut sebab selalu ramai seperti suasana pasar malam. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak sesak. Semua kelihatan santai. Bahkan kegiatan jogging 85 persen didominasi perempuan.

Mengapa demikian? Ternyata sebagian besar perempuan di China sudah lama menyiapkan diri untuk selalu bekerja keras. Kondisi ini menunjukkan sisi positif dari peran perempuan dalam kemajuan negeri tirai bambu tersebut.

Perempuan China sama sekali tak lepas dari keberhasilan negara yang telah membuktikan keunggulan kepada dunia internasional dalam berbagai

bidang. China selalu berusaha berada di garis terdepan dalam bidang ekonomi, teknologi, kesehatan, bahkan olahraga pada Olimpiade lalu.

Penelitian menunjukkan bahwa dari 27 ribu pengguna internet di 16 negara, ternyata ibu rumah tangga di China terbanyak yang mengakses internet dalam kehidupan sehari-hari. Pada rentan usia 15-55 tahun, misalnya, 44 persen di antara ibu rumah tangga di China mengakses internet. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan Denmark.

Sementara dari segi waktu yang digunakan, ibu rumah tangga di China menghabiskan 50 persen waktunya di dunia maya. Bandingkan dengan negara lain yang hanya rata-rata 35 persen. Meskipun umumnya hanya mengobrol, namun tetap saja memberikan tambahan wawasan kepada mereka untuk lebih meningkatkan peran dalam masyarakat.

Hal menarik dari perempuan di China, berdasarkan catatan bisnis di negara tersebut, ternyata perempuan adalah pengumpul kekayaan terbesar. Sebagian dari mereka adalah pengusaha yang mendapat warisan dari orangtua yang sebelumnya memang sangat kaya raya. Tetapi ada juga yang tumbuh dari kegiatan ekonomi berskala kecil.

Bahkan, *The International Herald Tribune* dalam sebuah laporannya, memastikan bahwa pengatur aset terbesar di negara tersebut, bahkan di dunia adalah tiga

Fitri

Alkisah, di suatu pagi seorang perempuan membuka pintu rumahnya. Di depan pintu ada tiga pria asing. Lalu perempuan tersebut mempersilakan ketiga orang tersebut masuk, tetapi mereka bertanya lebih dulu, “adakah suamimu?” Ia menjawab, “tidak ada.” Ketiga orang tersebut mengatakan bahwa mereka mengurungkan niat masuk karena sang suami tidak ada di rumah.

Akhirnya ketika suaminya datang di sore hari, perempuan tersebut memberi tahu ada tiga orang laki-laki yang mencarinya. Sang suami berkata kepada istrinya, “panggillah, persilakan masuk ketiga orang tersebut.” Perempuan tersebut mempersilakan masuk ketiganya tetapi ketiga orang tersebut bertanya, “Siapakah di antara kami yang dipersilakan, nama kami

masing-masing: Sukses, Kekayaan dan Cinta.” Lalu perempuan tersebut masuk ke rumah dan bertanya pada suami yang mana yang dipersilakan: apakah Sukses, Kekayaan atau Cinta? Maka sang suami mengatakan Kekayaan saja. Istri mengusulkan kenapa bukan Sukses. Sedang berembuk, sang anak yang kebetulan keluar dari kamar mengusulkan undang saja Cinta. Akhirnya, sepakatlah yang diundang adalah Cinta.

Perempuan itu lalu mempersilakan Cinta masuk, yang ternyata diikuti masuknya Sukses dan Kekayaan. Si perempuan bingung dan heran kenapa mereka masuk ketiga-tiganya. Maka ketiganya menjelaskan bahwa seandainya yang diundang masuk adalah Sukses maka Kekayaan dan Cinta tidak ikut masuk. Begitupun kalau yang diundang Kekayaan, Cinta dan Sukses tidak masuk.

Inti dari cerita di atas adalah jiwa yang dipenuhi Cinta akan mengundang Kesuksesan dan Kekayaan. Cinta perlu ada dalam diri individu pada setiap aktivitas kesehariannya. *Hablum minallah* dan *hablum minannas* serta pada sumber daya alam.

Cinta akan terasah dalam setiap individu jika selalu berusaha menghargai orang lain, sekecil apapun perlu diberikan penghargaan. Hakikat hidup manusia tertinggi adalah Penghargaan dan Harapan. Selain itu, setiap individu juga diharapkan melakoni sabar dan tawakkal dalam hidup ini. Makanya muncul nasihat yang berbunyi *hidup ini hanya panggung sandiwara*. Tujuannya untuk mengingatkan kepada kita sebagai

manusia agar menerima dan senantiasa memahami nasib atau takdir selama hidup di dunia. Untuk itu kita patut bersyukur karena dalam setahun ada bulan puasa. Bulan pembelajaran. Bulan melatih diri untuk sabar, mengasah rasa cinta, menjauhkan diri dari segala nafsu serakah dan angkara murka.

Puasa sebenarnya bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Artinya, menjalankan puasa selain sebagai bentuk *personal piety* (saleh) sekaligus juga sebagai *social piety*. Sebulan cukup lama untuk melatih individu atas kesabaran, menumbuhkembangkan rasa cinta, membersihkan jiwa dari dosa, benci, diskriminatif, dan amarah.

Individu diharapkan selalu memperhatikan aspek duniawi, peduli pada kesejahteraan keluarganya bahkan masyarakat umumnya. Apabila semua itu dapat dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka yang akan tertampilkan adalah sebuah wajah masyarakat yang bertanggung jawab. Tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakatnya.

Penutup ibadah Ramadan adalah pembayaran zakat yang tidak hanya merupakan ritual simbolik, yang bermanfaat sesaat —meringankan beban orang miskin pada hari fitri— tetapi lebih dari itu. Puasa dan zakat fitrah menjadi simbol perekat sosial, yang merupakan bagian terpenting dari humanisasi ibadah. Jika fitri untuk bermasyarakat kita sudah dijalankan, niscaya kita

akan menjadi pribadi, masyarakat, dan bangsa yang maju. Jika setiap saat kita menumbuhkan dan merawat cinta kasih dalam diri kita, maka kesuksesan dan kekayaan akan datang. Itu artinya kejayaan dan kemakmuran bangsa akan segera terwujud. *Minal aidin wal faizin*. Selamat fitri kembali. (*)

17 September 2009

Wakil Rakyat

Para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah dilantik tentu sudah siap bekerja, bertekad untuk memperjuangkan aspirasi konstituennya. Sebagian orang menilai, kinerja DPR hingga saat ini relatif sudah baik. Diharapkan wakil rakyat tidak terjebak pada kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga tidak mengabaikan kondisi rakyat yang masih terpuruk dalam masalah ekonomi sosial.

Soal kepentingan kelompok, atau bahkan pribadilah yang menyebabkan munculnya berbagai macam skandal di lembaga wakil rakyat yang terhormat. Sampai-sampai banyak pihak yang memaklumi perilaku buruk anggota DPR dengan mengatakan bahwa wakil rakyat juga “manusia” yang juga memiliki segudang kebutuhan yang tak pernah terpuaskan.

Pakar sosial Abraham Maslow mencatat, ada lima tingkatan kebutuhan seorang manusia. Pertama, kebutuhan fisiologis (fisik). Kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan (*safety and security needs*). Ketiga, kebutuhan sosial (*belonging needs*). Keempat, kebutuhan pengakuan diri (*esteem needs*). Kelima, kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization needs*).

Maslow memastikan, tiap orang akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan apa pun yang paling kuat (prepotent) dari antara ke lima tingkat kebutuhan itu pada suatu waktu tertentu. Jika kebutuhan di tingkat lebih bawah sudah terpenuhi maka yang bersangkutan akan mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat lebih tinggi.

Wakil rakyat, siapakah mereka? Mereka tak lain dan tak bukan adalah manusia-manusia biasa yang menurut Maslow memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Manusia yang memiliki mutu hidup dan tingkat pendidikan formalnya terkadang baik, kurang baik, atau memprihatinkan sebagai pejabat publik.

Bahkan jauh sebelum menjadi anggota Dewan, ada di antara mereka yang mungkin berwatak baik, kurang baik, bahkan tidak baik! Konon, ada wakil rakyat yang berpendidikan rendah, pernah menjadi “kepala preman”. Masih ada wakil rakyat yang belum mengenal *job-description* dengan baik dan ada yang belum sanggup menyelami aspirasi rakyat yang sebenarnya.

Krisis Listrik

Setiap kali terjadi pemadaman bergilir, siapa sebenarnya yang paling menderita di rumah? Tak lain adalah para ibu rumah tangga. Pemadaman yang bahkan sampai empat kali dalam sehari itu membuat para ibu kerepotan bila mereka hendak menyeterika baju seragam anak-anak mereka. Mereka juga harus berupaya agar makanan di kulkas tidak basi, dan memastikan putra-putri di rumah bisa belajar.

Ketergantungan pada listrik menyebabkan perempuan menjadi korban paling menderita dari krisis listrik, sementara laki-laki seringkali hanya meluangkan waktu di luar rumah bermain domino saat listrik padam. Apalagi jika listrik padam pada pukul 18.00-21.00 dan lilin hanya sebatang. Bila di saat bersamaan ada undangan perkawinan yang harus dihadiri, maka para

ibu akan hadir di pesta tersebut dengan tidak percaya diri karena sulitnya menemukan warna serasi antara pakaian, tas, dan sepatu. Ditambah bedak, sisir serta gincu yang entah terselip di mana. Lengkaplah sudah penderitaan sang ibu yang ingin tampil cantik.

Listrik yang mulai sering padam pertanda terjadinya krisis energi. Celaknya, hingga saat ini seperti tidak ada solusi yang diberikan pemerintah, kecuali mencoba mengundang investor yang tak kunjung bergairah membangun pembangkit listrik di negara ini. Menyikapi realitas itu, tidak ada jalan lain, kecuali semua pelanggan berhemat secara ekstra dalam penggunaan listrik agar dapat berbagi dengan seluruh pelanggan.

Pembangunan infrastruktur listrik di Indonesia tampaknya terbengkalai setelah kita memasuki krisis perekonomian tahun 1997 hingga 1998. Pada periode sebelum krisis, pertumbuhan kapasitas pembangkit terpasang mampu mencapai level yang relatif tinggi setiap tahun. Pada tahun 1997, pertumbuhan kapasitas terpasang bahkan mencapai 17,6 persen. Tingkat pertumbuhan tersebut cenderung menurun pada periode setelah krisis sampai tahun 2004. Saat ini, pemerintah mengupayakan penambahan 10.000 MW, namun hal ini juga tidak mulus, tetapi lumayan untuk menghindari *black out* atau lampu padam total.

Jadi, saat ini kita tidak boleh lagi mengatakan hidup di bumi yang kaya sumber energi, karena kita tidak mampu mengelola karunia berupa minyak, gas, batu-

bara, dan panas bumi yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Kita tidak bisa lagi mengandalkan untuk menikmati harga minyak murah dan boros energi. Semua sudah sirna dan kita harus memulai lembar baru kehidupan dengan berhemat, berhemat, dan berhemat. Zaman sudah berubah.

Dalam struktur ekonomi makro, ada istilah yang dikenal dengan "*hidden economy*" atau pertumbuhan ekonomi yang tidak terdata. Kenyataan *hidden economy* ini terjadi di Indonesia, bahkan bisa menambah pertumbuhan riil sebesar dua persen. Hal ini membuat laju permintaan dan pasokan listrik tidak berjalan seimbang dan bergerak tidak normal.

Pada statistik sebelum krisis ekonomi tahun 1997, diketahui bahwa setiap satu persen pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan konsumsi listrik sebesar 2 persen. Persisnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen waktu itu meningkatkan penjualan listrik hingga 14 persen. Namun kenyataannya, tahun 1997 saat krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5 persen tetapi meningkatkan penjualan listrik hingga 9 persen. Artinya, ada pemakaian listrik yang tidak berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Ini menjelaskan tingginya tingkat konsumsi listrik meskipun daya beli diyakini merosot. Orang masih memadati pusat perbelanjaan, walaupun daya beli masyarakat diberitakan terpuruk. Konon, pembelian peralatan elektronik yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan informasi

resmi. Semua ini mendorong pemakaian listrik yang jauh dari pasokan yang tersedia.

Di tengah situasi yang demikian itu, sudah seharusnya jika pemerintah tanggap. Caranya, harus menciptakan iklim investasi yang sehat bagi investor karena terbatasnya dana pemerintah untuk memodali PLN dalam membangun pembangkit listrik. Harus ada solusi, tidak boleh berdiam diri untuk mengimbangi kebutuhan listrik rakyatnya. (*)

8 Oktober 2009

Gusur

Dilema yang dihadapi pemerintah kota di seluruh Indonesia sepertinya nyaris sama, yakni tanggung jawab memastikan warganya bisa menikmati kota yang nyaman tetapi dengan berbagai ekses yang sama sekali tak disukai, seperti penggusuran paksa terhadap pedagang, atau mereka yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Paling sering menjadi korbannya adalah pedagang kaki lima yang selama ini disebut sebagai sektor informal untuk menjadi pelampung bagi tingkat kemiskinan kota.

Penggusuran selalu memakai alasan kepentingan umum sebagai dalih yang selalu membuat keraguan tentang ada tidaknya komitmen tegas pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak seluruh rakyatnya untuk mendapat akses rumah tinggal, mencari nafkah,

dan tentu dilayani. Dalam kaitannya kasus penggusuran pedagang kaki lima, justru sering menciptakan persoalan kemiskinan baru karena tak dibarengi dengan solusi yang lebih baik.

Jika melihat tayangan televisi yang memperlihatkan bagaimana sebuah peristiwa penggusuran terjadi, maka kita bisa menyaksikan bagaimana penggusuran tidak hanya menghilangkan lokasi berdagang atau hak mencari nafkah, tetapi juga memunculkan permukiman miskin baru yang kondisinya lebih memprihatinkan. Juga menimbulkan trauma fisik, psikologis, dan berbagai masalah kesehatan, pendidikan, serta sosial bagi orang-orang yang tergusur. Padahal sebagai sektor informal, jasa pedagang kaki lima harus diakui sangat besar dalam menyerap surplus angkatan kerja terutama untuk tenaga kerja dengan pendidikan relatif rendah.

Namun, sektor informal tetap menjadi sektor terpinggirkan, dianaktirikan, dan tidak jarang dianggap sebagai “penyakit” dalam menata perkotaan. Mereka akan dengan mudah tergusur saat sebuah lahan dibutuhkan oleh pemerintah kota. Padahal pedagang kaki lima juga punya hak sebagai rakyat Indonesia.

Pada setiap pengembangan kota, sektor informal harusnya terakomodasi dalam kebijakan perencanaan dan penataan ulang kota. Aksi penertiban atau penggusuran tempat usaha sektor informal, seperti pedagang kaki lima oleh aparat Satpol PP sudah menjadi

menu rutin dan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kota-kota besar di Indonesia dalam rangka membuat wajah kota lebih ramah untuk penghuninya.

Kalau melihat kehidupan sektor informal, maka seharusnya kita memihak kepada mereka yang bisa bertahan tanpa menuntut perhatian pemerintah seperti yang dilakukan oleh banyak pengusaha besar melalui asosiasi atau organisasi yang mereka bentuk. Sektor informal dan pekerja informal yang menghidupi diri sendiri-bahkan tidak jarang menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Boleh saja dipandang seperti penyakit karena dianggap identik dengan kesemrawutan, biang kemacetan, dan sumber kerawanan sosial, tetapi pedagang kaki lima banyak memberikan kontribusi dalam menggerakkan perekonomian, terutama pada akar rumput.

Tetapi kalau saya bertanya kepada tetangga saya yang menjadi pedagang kaki lima di salah satu pasar di Makassar, apakah mereka menyadari kalau melanggar hukum saat berdagang di tempat umum? Mereka dengan enteng akan mengatakan kalau penegakan hukum juga menyeret birokrat yang melakukan korupsi di kalangan birokrasi, atau yang sering mengumpulkan uang hasil pungutan liar, mungkin dia akan merasa telah melanggar hukum. Namun karena pungutan liar tetap berjalan, dia tidak merasa melanggar hukum, bahkan sebaliknya bertanya-tanya, apakah pemerintah kota benar-benar akan menegakkan hukum, atau sekadar

ingin menghabiskan orang-orang miskin yang selalu dianggap sampah di kota metropolitan.

Apakah keadaan mereka yang tidak sedap dipandang mata itu harus ditanggulangi secara hukum? Pendekatan *law enforcement* untuk mengentaskan kemiskinan adalah pekerjaan sia-sia, dan justru akan membuat keadaan semakin buruk sebab konsekuensi logis bagi pengayuh becak, atau pedagang asongan yang ditertibkan adalah hilangnya pekerjaan, dan modal kerja.

Apa pemerintah kota menyadari, ada kemungkinan mereka akan menjalankan pekerjaan yang lebih buruk, atau bahkan melakukan tindak kriminal? Tetapi pada akhirnya kita harus mengacu pada hukum bahwa dalam setiap hak kita, terkait hak orang lain. Misalnya hak sebagai warga kota bisa menikmati kelancaran lalu lintas, ternyata berbenturan dengan hak pedagang kaki lima mencari makan. Oleh karena itu, ada baiknya hukum ditegakkan. Tetapi penegakan hukum harus secara adil bagi semua warga, termasuk mereka yang miskin. (*)

15 Oktober 2009

Menteri Perempuan

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II memiliki kemajuan dari sisi jumlah menteri perempuan. Jika sebelumnya hanya empat menteri, maka sekarang ada lima calon perempuan yang sudah dipanggil ke kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas. Mereka yang hampir pasti jadi menteri itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Maria Elka Pangestu, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, Menteri Pemberdayaan Perempuan Linda Agum Gumelar, dan Menteri PPN/Bappenas Armida Alisjabana.

Namun harus diakui, menteri perempuan yang diprediksikan pada kabinet SBY ini sebenarnya adalah bidang-bidang yang sebelumnya sudah pernah diduduki oleh perempuan. Terutama bidang yang secara

tradisional selalu dianggap domain menteri perempuan seperti pemberdayaan perempuan, dan bidang teknis yang sudah pernah diduduki perempuan Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kesehatan. Sementara Sri Mulyani dan Maria Elka Pangestu tetap pada posisi sebelumnya.

Perlu dicatat, latar belakang akademis, kemampuan, serta kompetensi keempat menteri perempuan tersebut tidak perlu diragukan. Setidaknya melihat dari gelar akademis dan pengalaman mereka selama ini. Kita berharap, pemberian posisi kepada mereka adalah karena kapabilitas yang dimiliki, bukannya hal-hal lain, meskipun nuansa politik maupun tarik-menarik kepentingan sangat kental dalam penentuan pejabat menteri.

Terlepas dari sedikitnya jumlah kursi dibandingkan jumlah laki-laki dalam kabinet, namun jatah posisi menteri untuk perempuan menunjukkan bahwa keterlibatan dan partisipasi politik perempuan membuat kualitas demokrasi secara keseluruhan agak lebih mending. Representasi perempuan dalam kehidupan politik yang adil merupakan salah satu indikator demokrasi partisipatoris. Meskipun tidak signifikan, namun komposisi yang ada setidaknya sudah menunjukkan ada upaya untuk memperkuat demokrasi.

Namun yang terpenting sebenarnya bukan jumlahnya, tetapi apakah perempuan yang duduk dalam jabatan politik termasuk di kabinet akan merumuskan

Sumpah Orang-orang Muda

Rumusan keputusan yang dibuat Moehammad Yamin seusai rapat pemuda-pemuda Indonesia yang diikuti perkumpulan pemuda, di antaranya Jong Java, Jong Soematra (Pemuda Soematra), Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Islamieten Bond, Jong Bataksbond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi, dan Perhimpoean Pelajar-pelajar Indonesia pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta, berbunyi sebagai berikut:

“Pertama, Kami Poetera dan Poeteri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, Tanah Indone-sia. Kedoea, Kami Poetera dan Poeteri Indonesia mengakoe berbangsa yang satoe, Bangsa Indonesia. Ketiga, Kami Poetera dan Poeteri Indonesia mendjoen-djoeng bahasa persatoean, Bahasa Indonesia.”

Sudah 81 tahun kita melewati Sumpah Pemuda yang sakral, diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Pada hari itu, kita mengenang pemuda “heroic” zaman doeloe yang notabene adalah orang-orang tua kita. Tetapi saat ini kita masih berusaha meyakinkan diri untuk dapat mencetuskan sesuatu yang spektakuler dan berskala nasional dengan misi yang berat, yakni mempersatukan seluruh komponen bangsa Indonesia.

Memang harus diakui bahwa menjaga persatuan bukan hal mudah. Indonesia adalah negara yang sangat plural, bahkan negara yang paling plural di dunia. Negara kita memiliki lebih dari 600 etnis dengan berbagai bahasa, budaya, agama, dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pluralisme bisa menjadi potensi, sekaligus menjadi ancaman, tergantung kita mengelolanya.

Namun, banyak fenomena dan peristiwa yang telah mewarnai kehidupan bangsa kita akhir-akhir ini yang memudarkan semangat peduli dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Contoh paling mengemuka di depan kita, adalah mudanya tawuran sesama pemuda di kampus hanya karena persoalan sepele. Bahkan tawuran di lembaga pendidikan sudah terlalu sering kita baca di koran, atau lihat di televisi. Belum lagi perkelahian antarkampung yang sepertinya menjadi trend yang sudah tentu melibatkan pemuda Indonesia di dalamnya.

pemuda sekarang harus membuat sumpah yang baru,
yakni bergerak untuk memperbaiki nasib rakyat. (*)

28 Oktober 2009

Sayap-Sayap Patah

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuka kepada publik rekaman pembicaraan telepon sepanjang 4,5 jam yang diduga berisi rekayasa perkara Bibit-Chandra, menjadi awal dari merupakan puncak “drama” perseteruan antara kepolisian dan KPK. Dua unsur pimpinan nonaktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah, akhirnya dibebaskan dari tahanan polisi.

MK benar-benar tepat mengambil risiko dianggap melakukan intervensi dalam penanganan kasus hukum dengan membuat sidang pleno terbuka untuk umum. Sehingga kasus yang memicu gerakan publik yang mendukung KPK bisa benar-benar diketahui oleh masyarakat luas tanpa tudingan mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung. Tentu kita tidak perlu

repot-repot membayangkan bagaimana kalau rekaman itu disita satu lembaga dan tak pernah dibuka kepada publik, tentu sangkaan akan beredar secara terus-menerus.

Namun sesungguhnya, menurut Ketua MK Mahfud MD, membuka rekaman tersebut bukanlah hal yang luar biasa karena dasar hukum memutuskan pemutaran rekaman pembicaraan dalam sidang pleno terbuka untuk umum adalah mengacu pada ketentuan Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 40 UU Mahkamah Konstitusi terkait sifat sidang pengadilan yang terbuka. Namun yang paling penting adalah alasan penegakan dan perlindungan HAM lebih tinggi dari segalanya. Jadi hak masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga penegakan hukum tetap berjalan melawan korupsi jauh lebih penting dibandingkan kerahasiaan barang bukti rekaman tersebut.

Terbukti, setelah MK siang harinya membuka rekaman yang diduga berisi rekayasa perkara Bibit-Chandra, yang bersangkutan tersenyum dan kembali ke keluarga masing-masing. Mereka tentu memiliki keluarga, istri dan anak-anak yang menunggu di rumah. HAM merekalah yang paling pertama terlanggar kalau suami atau orang tua mereka ditahan tanpa berbuat kesalahan. Dalam hukum dikenal, lebih baik membebaskan banyak orang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.

Tetapi yang menarik dari Anggodo yang dalam rekaman terkesan sangat dominan mengatur-ngatur

proses hukum dalam satu wawancara di salah satu stasiun TV sebelum ditangkap polisi, juga mengaku sangat tertekan setelah kakaknya Anggoro dijadikan tersangka oleh KPK. Dia mengutarakan, kakaknya yang kini buron di luar negeri sekarang hidup terlunta-lunta, istrinya mengalami gagal ginjal, dan anaknya bahkan gila karena stres.

Dalam wawancara tersebut, Anggodo sangat membuat berang sebagian besar pemirsa, bahkan Ketua Tim Pencari Fakta Adnan Buyung Nasution malah langsung menelepon Kapolri untuk segera menangkap adik Anggoro tersebut. Alasannya, Anggodo terlihat berbicara di mana seolah-olah ingin mempengaruhi opini. Dan memang apa yang dilakukan Anggodo memang terkesan seperti keluarga yang teraniaya oleh KPK, sehingga begitu KPK dipersulit maka dia ikut gembira seperti dalam satu pembicaraan telepon yang disadap.

Jika kita melihat dari Chandra-Bibit dan Anggoro-Anggodo, maka semuanya memperlihatkan bahwa yang paling menderita dalam kasus tersebut adalah perempuan sebagai istri dan anak-anak yang sangat bergantung kepada mereka masing-masing (Chandra-bibit dan Anggoro-Anggodo). Jika mereka sakit atau tertimpa musibah maka perempuan tersebut pasti seperti burung-burung yang patah sayapnya. Tetapi terlepas dari sayap mereka yang lepas tersebut, perempuan jugalah berperan untuk menjaga seluruh

anggota agar tidak berbuat salah. Setidak-tidaknya perempuan juga harus bicara dan didengar di dalam rumah, sehingga rumah bisa utuh selama-lamanya. Perempuan berada di sisi sebagai pendamping, bukan di belakang, agar mudah membimbing, mengarahkan dan memberi semangat tentu dibutuhkan dorongan ke arah positif menguntungkan bagi keluarga dan lingkungan masyarakat tidak merugikan orang lain.

Kita mungkin masih teringat dengan sosok Michelle Obama yang diyakini ikut membantu suaminya menjadi Presiden kulit hitam pertama Amerika Serikat. Bahkan first lady yang tidak mau disebut penasihat politik Obama, malah mengatakan dengan rendah hati bahwa lebih suka menjadi *Mom in Chief* (Ibu yang sesungguhnya). Tentu menjaga keluarga dengan sebaik-baiknya, termasuk karier suaminya agar berjalan di jalan yang lurus. (*)

5 Nopember 2009

Rajin di Kantor dan Rumah

Sebagai kota bersih, aman, dan hijau, Kota Singapura tak pernah diragukan lagi kehebatannya. Makanya, tak heran jika warga Indonesia tak bosan-bosannya mengunjungi negara pulau tersebut. Tetapi yang juga menarik dari tetangga tersebut adalah semangat kerja dari rakyatnya.

Sudah banyak yang mengakui bahwa 1,87 juta tenaga kerja yang dimiliki sebagai salah satu yang paling rajin di dunia, berdasarkan faktor-faktor termasuk produktivitas pekerja, sikap dan keterampilan teknis.

Mengapa para pekerja di Singapura menjadi yang terbaik? Itu tak lepas dari kebijakan pemerintah Singapura yang percaya bahwa satu-satunya cara agar dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya

adalah melalui investasi di bidang pendidikan dan tenaga kerja. Sehingga mereka secara terus-menerus meningkatkan keterampilan melalui program pelatihan dan pengembangan.

Setiap tahun, pemerintah Singapura mengeluarkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan hingga 20 persen dari pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Sebanyak 93 persen anak-anak usia antara 6 dan 17 yang terdaftar di sekolah gratis. Melek huruf orang dewasa pada tahun 1997 mencapai 92,8 persen. Selain itu, kebanyakan warga Singapura menguasai bahasa Inggris yang merupakan bahasa bisnis dan pemerintah. Sebagian besar warga menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau ketiga setelah bahasa Mandarin dan bahasa-bahasa Asia lainnya. Bahkan, banyak orang muda juga belajar bahasa Prancis, Jerman dan Jepang.

Namun yang patut ditiru oleh pembuat kebijakan di Indonesia adalah, pemerintah Singapura berusaha menemukan cara bagaimana mendamaikan antara kebutuhan untuk bekerja lebih baik bagi perempuan dan keinginan pemerintah untuk mendorong perkawinan, melahirkan anak dan menjaga nilai-nilai keluarga tradisional. Oleh karena itu, pemerintah mendorong perusahaan untuk mengadopsi jadwal kerja yang fleksibel sehingga perempuan bekerja masih dapat mengasuh anak-anak mereka. Apalagi perusahaan di Singapura yang umumnya terbuka untuk mempekerjakan perempuan, ternyata masih menghadapi

hambatan untuk maju dalam lingkungan kerja yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki.

Makanya pemerintah Singapura membatasi waktu kerja, di mana undang-undang tenaga kerja mengatur batas jam kerja normal hingga 44 jam per minggu. Biasanya, staf administrasi bekerja rata-rata 40-42 jam per minggu, tidak termasuk lembur. Lembur lebih dari 44 jam per minggu harus dibayar satu setengah kali tarif per jam dasar. Sementara untuk waktu bekerja pada hari libur dan hari libur normal adalah dua setengah kali tarif normal. Tetapi secara teori, lembur tidak boleh melebihi 72 jam per bulan.

Sementara soal cuti, pemerintah Singapura mengatur bahwa semua pekerja berhak untuk cuti selama tujuh hari setiap tahun yang dibayar selama tahun pertama layanan. Dan tambahan cuti hari untuk setiap tahun setelah itu. Hal ini berlaku untuk maksimum tambahan 14 hari, atau 21 hari total.

Seorang karyawan perempuan di Singapura berhak untuk cuti hamil empat minggu sebelum melahirkan dan empat minggu setelahnya, dengan ketentuan bahwa ia telah berada di perusahaan yang sama selama sedikitnya 180 hari sebelum mengambil cuti. Kebijakan ini berlaku hanya untuk seorang wanita yang hamil sampai anak kedua. Majikan membayar untuk pemeriksaan medis selama cuti sakit dan cuti melahirkan. Beberapa perusahaan memperluas manfaat kepada anggota karyawan keluarga dekat.

Lalu bagaimana di Indonesia, atau di Makassar? Tentu tidak perlu dibandingkan antara negara yang sudah mapan seperti Singapura dan di sini. Namun kita perlu melihat bagaimana di Singapura para pekerja, berupaya dan diupayakan untuk sukses di kantor maupun di rumah. Jadi dalam pekerjaan betul-betul profesional berkarya, tetapi di rumah betul-betul untuk mengabdikan.

Jika melihat waktu kerja lima hari di Makassar (Senin-Jumat), tetapi hari Sabtu dan Minggu pun pekerjaan sering terpaksa dibawa ke rumah masing-masing atau membuat kegiatan pelatihan pada hari Sabtu dan Minggu, bahkan tugas untuk perjalanan dinas. Hal ini yang membuat pekerja atau pegawai akan mengingat rumah saat menghadapi pekerjaan, mengingat pekerjaan saat berada di rumah. Pekerjaan rumah dalam keluarga terbengkalai, hubungan komunikasi antar anggota keluarga tidak terjalin dengan baik. (*)

12 Nopember 2009

Berkurban

Seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia merayakan Idul Adha yang sering juga disebut Hari Raya Kurban pada 10 Dzulhijah. Di negeri kita, hari raya ini juga populer sebagai Hari Raya Haji. Sedangkan di banyak negara memiliki sebutan yang lain, seperti di negara-negara Arab dikenal sebagai *Id Al-Nahar dan Id Al-Kabir*, sementara di India disebut *Bakra Id*, dan di Turki sebagai *Buyuk Bayram* atau *Qurban Bayram*.

Tetapi semua diidentifikasi berkurban dengan penyembelihan hewan kurban dan pelaksanaan ibadah haji, sekaligus juga bahwa ia merupakan “hari raya besar” (*id al-kabir*). Memang, di banyak wilayah Muslim lainnya, Idul Adha lebih “besar” atau tepatnya lebih semarak dirayakan umat Islam, dibandingkan Idul Fitri yang justru di Indonesia lebih besar syiarnya.

Namun inti dari semua perayaan Idul Adha di mana pun juga adalah pengorbanan dan persembahan (*sacrifice and offering*). Pengorbanan adalah keseriusan kita mendahulukan kepentingan orang banyak di satu pihak dan kesadaran bahwa tindakan destruktif bukan sebagai pilihan pertama, adalah sebuah persembahan. Persembahan memiliki makna besar justru ketika disampaikan secara tulus; begitu juga sebaliknya. Terutama bagi pemimpin yang sebagian besar rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan harus menempatkan kepentingan umum (*bonum commune*) sebagai nilai pertama dalam menjalankan amanah.

Namun apakah dalam kehidupan sehari-hari, kita menyadari dan melakukan semua itu? Apakah kita peduli dengan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya? Padahal dalam setiap perayaan hari raya keagamaan, kita selalu diingatkan mengenai pesan moral yang terkandung di dalamnya. Kita diingatkan untuk selalu mengagungkan nama-Nya, membagi kasih sayang terhadap sesama, dan kita diingatkan untuk selalu menjauhi larangan-Nya.

Jika jujur, peringatan hari-hari besar keagamaan lebih sering dijadikan sebagai kegiatan rutin biasa. Sehingga yang terjadi kemudian adalah, perilaku kita sama sekali tidak berubah dan tetap berjalan seperti hari-hari biasanya. Kita tidak peduli terhadap sesama, kita tidak takut kepada peringatan-Nya. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pejabat yang mengambil tindakan

yang merugikan orang banyak. Buktinya, korupsi bukannya semakin berkurang, tetapi semakin menjadi-jadi. Bahkan dapat dikatakan semakin bermasa bodoh.

Pola hidup sebagian dari kita juga banyak yang menghambur-hamburkan uang, meskipun masih banyak saudara-saudara di sekitar kita yang hidup dalam kemiskinan, serba kekurangan dalam tekanan hidup yang semakin berat. Seharusnya korupsi dan kemiskinan menjadi musuh utama bangsa Indonesia. Sudah sepantasnya kalau seluruh potensi umat Islam dan seluruh bangsa ini bersatu padu menghadapi musuh utama ini.

Harus disadari bahwa kemiskinan telah semakin menjepit masyarakat, karena itu harus pandai menentukan prioritas. Meskipun, sebenarnya bukan hanya umat Islam, tetapi semua warga negara harus ikut bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan ini, apalagi para pemimpinnya. Semua potensi dan tenaga harus disatupadukan untuk menghadapi kemiskinan itu.

Allah SWT sudah menegaskan dalam Al-Quran: *"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka, celakalah orang-orang yang shalat, mereka yang lalai dalam shalat, yaitu yang suka pamrih kepada sesama, dan enggan memberikan pertolongan. (QS Al-Ma'un; 1-7).*

Jadi peringatan hari kurban haruslah berdampak sosial, karena Allah swt akan dekat dengan hambanya jika dia mendekati saudara-saudaranya. Jadi kurban yang kita persembahkan setiap hari raya Idul Adha haruslah menumbuhkan sikap dan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga, individu dan kelompok sosial dalam masyarakat terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dari kemiskinan. Tentu karena pemimpinnya rela berkorban tanpa menipu rakyatnya dan rakyatnya memiliki kepedulian yang tinggi sesama manusia.(*)

26 Nopember 2009

Century

Menteri Keuangan Sri Mulyani, beberapa tahun terakhir menjadi salah satu simbol perempuan yang tangguh, terutama dalam bidang keuangan dalam pemerintahan. Bahkan pada masa pemerintahan SBY-JK, tokoh perempuan yang sukses ini bahkan sempat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan Boediono yang waktu itu terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia. Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani memperoleh penghargaan sebagai menteri keuangan terbaik di Asia atau *The Best Finance Minister in Asia* dari Emerging Market Forum pada tahun 2006. Dalam waktu bersamaan, Euromoney juga menganugerahi Sri Mulyani sebagai *The Finance Minister of the Year in the World*.

Namun saat ini, Sri Mulyani dapat dipastikan mengalami tekanan luar biasa terkait dengan merebaknya kasus Bank Century. Apalagi setelah DPR menyepakati hak angket terkait Bank Century. Sri Mulyani menjadi salah satu tokoh penting yang mengambil keputusan dalam pemberian dana bantuan kepada Bank Century, sehingga bakal disibukkan dengan urusan klarifikasi kepada panitia khusus hak angket tersebut. Pasti tidak akan mudah untuk mengatasi tekanan dari DPR, termasuk pemberitaan yang sepertinya sudah menyudutkan dirinya ke pojok khusus “pesakitan”.

Saat menjadi Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian, Sri Mulyani berusaha meyakinkan bahwa seluruh keputusan penyelamatan Bank Century pada 21 November 2008 merupakan kebijakan yang sah karena didukung dua produk hukum sekaligus dan berdasarkan hasil penilaian Bank Indonesia, lembaga yang berwenang penuh atas pengawasan dan penanganan perbankan. Seluruh putusan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan didasarkan pada landasan hukum yang jelas, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Namun belakangan, banyak pihak berpendapat penyelamatan Bank Century dengan suntikan dana sampai Rp 6,7 triliun berpotensi merugikan negara. Proses penyelamatan yang diawali pernyataan BI bahwa Bank Century sebagai bank gagal dan berpotensi sistemik dipertanyakan. Intinya, banyak yang tidak percaya bank kecil yang manajemennya bobrok dibantu dengan dana yang sangat besar. Dan banyak juga yang tidak yakin bank kecil bisa mengguncang sistem keuangan jika ditutup. Apakah orang-orang akan menarik dananya di bank besar jika satu bank kecil ditutup?

Sri Mulyani juga sudah memastikan, dirinya telah melaporkan perkembangan kondisi Bank Century kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu berada di luar negeri karena menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Washington, Amerika Serikat. Namun seperti kata orang bijak, setiap krisis melahirkan tokoh baik dan buruk, maka dalam kasus ini kita diingatkan kembali peran Jusuf Kalla sebagai tokoh yang baik, karena berusaha mencegah suntikan dana ke Bank Century yang dia anggap telah dirampok oleh pemiliknya. Secara gamblang dalam debat Calon Presiden, Jusuf Kalla bahkan mengungkapkan bahwa dirinya tidak setuju karena alasan keadilan bagi rakyat dalam penggunaan dana negara, tetapi akhirnya dia mengiyakan dengan syarat hanya Rp 1,3 triliun.

Namun Sri Mulyani juga manusia yang setiap saat

bisa keliru meskipun segudang ilmu dan pengalaman, sehingga biarlah masalah ini bergulir hingga menuju ke titik akhir kebenaran. Karena rakyat butuh keadilan berupa kepastian mengenai benar tidaknya bantuan dana sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. Jika keliru, siapa saja yang harus bertanggung jawab atau bila perlu dihukum sehingga ada keadilan yang dirasakan oleh rakyat. Sebab kalau rakyat kecil butuh bantuan dana usaha Rp 1 juta pun tidak akan mudah, bahkan mungkin terjerat utang pada lintah darat.

Semoga keterlibatan Sri Mulyani dalam kasus ini tidak mengubah kepercayaan publik terhadap kemampuan perempuan sebagai pengambil kebijakan. Sebab selama ini kita mempercayai bahwa perempuan jauh lebih bersih jika mengambil sebuah keputusan. Sebab kita selalu berharap, makin banyak tokoh-tokoh perempuan yang bisa berperan dalam pemerintah, termasuk memperbanyak kursi perempuan di kabinet.
(*)

3 Desember 2009

Hari Anti Korupsi

Setiap orang memiliki peranan untuk terlibat, tidak hanya pemerintah, tetapi juga anggota parlemen, pebisnis, masyarakat sipil, media massa dan orang awam. Korupsi menyakitkan kita semua, sehingga pertempuran itu merupakan tanggung jawab bersama.” (Antonio Maria Costa, Direktur Eksekutif UNODC)

Kalimat yang sangat kuat maknanya untuk melawan korupsi tersebut diutarakan Antonio di Indonesia, tepatnya dalam Konferensi Bali terhadap Korupsi yang diselenggarakan pada bulan Januari 2008. Korupsi adalah kejahatan terhadap upaya pencapaian MDGs (Millennium Development Goals). UNODC sendiri adalah United Nations Office on Drugs and Crime yang merupakan salah satu lembaga di bawah Perserikatan

Bangsa-Bangsa yang mengurus pengurangan kejahatan obat-obatan, mempromosikan kesehatan, keadilan dan keamanan.

Antonio memang benar, tindakan korupsi adalah kejahatan serius yang dapat merusak pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Negara kesulitan memenuhi kebutuhan dasar warganya, seperti kesehatan dan pendidikan karena uang rakyat dikorupsi. Dan lebih parah lagi, tidak ada satu negara pun di dunia, kawasan atau masyarakat yang kebal terhadap penyakit korupsi.

Buruknya dampak yang ditimbulkan para koruptor mendorong UNODC mengembangkan kampanye global bersama UNDP melawan tindakan korupsi. Yakni dengan berfokus pada bagaimana korupsi menghalangi upaya-upaya untuk mencapai tujuan yang disepakati secara internasional, yaitu Millenium Development Goals dan dampak pendidikan, kesehatan, keadilan, demokrasi, kemakmuran dan pembangunan. Salah satunya adalah ajakan memperingati hari anti korupsi pada 9 Desember 2009 .

Tema pelaksanaan Internasional Hari Anti Korupsi tahun ini adalah "Jangan membiarkan korupsi mematikan pembangunan". Ketika uang publik dicuri untuk kepentingan pribadi, itu berarti akan lebih sedikit sumber daya untuk membangun sekolah-sekolah, rumah sakit, jalan dan fasilitas pengolahan air bersih. Korupsi memungkinkan obat-obatan di bawah standar, bahkan palsu akan masuk ke pasar.

Korupsi akan merusak aturan hukum, semuanya dapat membahayakan keamanan. Namun korupsi bukanlah suatu kekuatan impersonal luas. Ini adalah hasil dari keputusan pribadi, didorong oleh sifat keserakahan. Untungnya ada Konvensi PBB melawan Korupsi sebagai upaya terkuat dunia untuk membangun integritas dan memerangi korupsi.

Sektor swasta dan pebisnis harus mencegah korupsi dengan mencegah penyuapan dalam proses tender dan pengadaan. Prinsipnya, semua orang bisa berperan melawan korupsi. Setidaknya pada Hari AntiKorupsi Internasional 2009, untuk bergabung dengan PBB dalam kampanye anti-korupsi. Selain itu, berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah menawarkan atau menerima suap. Hidup dengan moto “dunia akan menjadi tempat yang lebih baik dengan kejujuran”.

Hari Anti Korupsi diperingati di seluruh dunia pada bulan Desember ini adalah contoh kegiatan yang direncanakan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif korupsi terhadap masyarakat. Memerangi korupsi merupakan masalah global karena korupsi dapat terjadi di negara kaya atau miskin. Dana haram hasil korupsi terbukti telah menyumbang ketidakstabilan, kemiskinan dan merupakan faktor dominan terhadap kegagalan negara. Sekali lagi, mari kita berlomba-lomba memerangi korupsi, mulai dari diri kita sendiri. (*)

10 Desember 2009

Ibu yang Terbaik di Dunia

Memperingati hari ibu, selalu saja ada kontes mencari ibu yang terbaik. Tetapi seperti kata seorang teman, semua perempuan yang melakukan pekerjaan menakjubkan sebagai ibu, pantas mendapatkan gelar terbaik. Apalagi menjadi ibu, bukanlah pekerjaan mudah.

Namun penilaian yang *fair* adalah pendapat dari seorang *user* tentunya. Dalam hal ini adalah anak-anak kita. Seperti dalam jejaring sosial Facebook, sejumlah sahabat menuliskan penghargaan dan penilaian setinggi-tingginya kepada ibunya. Namun saran saya, bertemu langsung dengan ibu jauh lebih baik, paling tidak menelepon kalau memiliki jarak. Apalagi seorang ibu kita selalu menunjukkan cintanya melalui kata-kata dan tindakan. Misalnya dengan memberikan pelukan,

membuat makanan favorit, memberikan kejutan, dan bila perlu mengucapkan kata cinta mereka setiap hari.

Seorang ibu selalu menjadikan anak-anaknya sebagai prioritas sehingga putra-putrinya selalu di bagian atas daftar seorang perempuan. Contohnya, jika seorang perempuan berada di depan komputer dan anak-anak mereka membutuhkan sesuatu, maka secara otomatis kegiatan tersebut dihentikan. Paling tidak, menoleh dan memandang mereka ketika mereka sedang berbicara.

Seorang ibu juga mendidik anak-anak dengan kebaikan, bahkan jika putra-putrinya mencoba berbuat yang tidak sopan atau melanggar tatakrama. Seorang ibu selalu menjaga agar tidak kehilangan kendali atas dirinya, terutama saat marah dengan anak-anak. Hal itu tidak mudah dilakukan sepanjang waktu, sehingga ada tips untuk ibu-ibu, sebelum meledak, perlu mengambil langkah mundur dari situasi, ambil napas panjang dan menghitung sampai sepuluh. Jika Anda terlalu marah, biarkan anak-anak tahu bahwa akan ada konsekuensi tindakan mereka, tetapi mengambil beberapa waktu untuk berpikir tentang hal ini secara rasional sebelum anda berteriak.

Tetapi kalau mau bersabar, sebaiknya mengambil *time out* karena penting bagi anda untuk mengambil waktu keluar saat marah, kewalahan, stres atau hampir kehabisan kesabaran akibat mengurus banyak orang. Pastikan bahwa anda punya waktu untuk diri sendiri

buat anak anda, sedikitnya sekali seminggu. Dengan cara ini anda dapat mengisi ulang dan mengurus diri sendiri, sehingga dapat kembali menjadi ibu yang lebih baik. Saat berbicara, dengarkan anak Anda, jadi bukan bagaimana mereka mengatakannya. Berbicara dengan mereka seperti Anda akan menghormati orang dewasa dan ide-ide cerdas mereka.

Respek adalah dua arah. Jika ingin anak-anak menghormati anda, maka anda harus menghormati mereka. Jangan berpikir Anda bisa menjadi bos, mengamuk, ibu cerewet yang selalu berteriak-teriak dan menjerit dan mendapatkan rasa hormat dari anak-anak. Pokoknya, jangan biarkan berteriak-teriak atau menjerit-jerit menjadi satu-satunya cara dalam berkomunikasi dengan anak-anak. *The golden rule* yang berlaku bagi ibu dan anak-anak adalah memperlakukan orang lain seperti bagaimana anda ingin diperlakukan.

Ada tips untuk seorang ibu, jangan mempertahankan *perfect house* atau rumah yang sempurna. Ada pepatah yang mengatakan “jika Anda berjalan ke sebuah rumah yang terlihat seperti *show room* atau majalah maka hal itu lebih penting daripada manusia. Namun, jika Anda masuk ke sebuah rumah yang berantakan dan seperti bencana di mana-mana, maka anda berpikir tidak ada yang peduli soal itu. Padahal yang harus dilakukan adalah mencari medium untuk menemukan kebahagiaan. Menciptakan lingkungan di mana anak-anak bisa bermain dengan aman tanpa khawatir mendapat

kesulitan dari menyentuh dekorasi mewah. Jadi nikmati rumah saat anak-anak Anda sudah masuk ke perguruan tinggi, saat itu bisa mencari rumah yang sempurna.

Bagi yang punya anak sudah beranjak remaja, sebaiknya membiasakan menerima anak Anda. Tidak peduli apa ide atau tren mereka anut saat tumbuh menjadi remaja dan dewasa. Kita hanya cukup mengingatkan mereka bahwa anda mengasihi dan tahu betul apa yang dibutuhkan anak-anak. Bahkan jika mereka tampak konyol, membiarkan memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka dan menunjukkan mereka bahwa anda masih melihat mereka sama seperti biasa. Semakin besar campur tangan anda terhadap pilihan pakaian mereka, semakin mereka akan melekat pada gaya dan memberontak terhadap anda. Jadi, selama kepentingan mereka/gaya hidup tidak menyakiti mereka atau orang lain, sebaiknya ibu tetap di luar sambil mengawasi.

Mengapa menjadi ibu yang terbaik sangat penting, karena pendidikan di rumah yang menentukan masa depan anak-anak. Meskipun terkadang, anak-anak juga mencari bentuk sendiri di luar. Tetapi sebagai ibu, jangan pernah putus asa mendidik anak agar berguna bagi orangtua dan bangsanya. (*)

24 Desember 2009

Mimpi Anak Kita

Jika menyaksikan film Sang Pemimpi yang merupakan film dari kisah novel karya Andrea Hirata (pemuda asal Gantung, Belitung Timur), maka pasti kita akan mengatakan karya ini sangat layak untuk ditonton. Bukan hanya pantas menjadi film dengan penonton yang jumlahnya sangat dahsyat, tetapi juga sangat layak mendapat pujian sebagai karya seni yang dapat memberikan energi positif. Terutama bagi anak-anak muda yang memiliki kesempatan sebesar lubang jarum, tetapi semangat setinggi langit.

Bayangkan tiga anak muda yang menjadi tokoh utama dalam film ini, Ikal bersama Arai sepupunya, dan Jimbron sahabatnya. Mereka merantau ke Manggar, kota pelabuhan berjarak puluhan kilometer dari tempat kelahiran mereka di Gantung, Belitung. Tetapi yang luar

biasa, mereka punya cita-cita meraih beasiswa untuk kuliah di Paris, Perancis. Dalam akhir kisah, mereka dapat menginjakkan kaki di Eropa setelah melewati masa-masa yang sangat keras dan sulit untuk anak muda zaman sekarang.

Inti dari pesan film karya sutradara Riri Riza tersebut adalah “tanpa mimpi dan harapan, orang-orang macam kita akan mati”. Kata-kata itu merupakan petikan dialog antara Arai yang menjadi “Sang Pemimpi” kepada Ikal yang sempat goyah dalam mimpinya karena putus asa, merasa nasib miskin menakdirkan posisinya hanya orang melayu yang tak bisa meraih sekolah tinggi di Eropa.

Tetapi yang menarik tatkala orang asyik membicarakan energi dari film Sang Pemimpi yang dinilai bisa memberikan motivasi bagi generasi muda Indonesia, kita harus mempertanyakan apakah mimpi-mimpi anak-anak kita, atau lebih luas lagi mimpi-mimpi anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu di bangku kuliah di Makassar, khususnya dalam konteks kekinian. Terutama kalau kita masih dibuat miris jika muncul pemberitaan mengenai tawuran, perusakan gedung kampus, atau aksi rusuh yang melibatkan mahasiswa. Atau yang tak kalah membuat prihatin adalah tawuran pelajar, apalagi jika mendatangkan korban.

Kalau masih ada tawuran atau rusuh, tentu kita boleh saja meragukan mimpi-mimpi mereka. Bayangkan bagaimana beratnya kehidupan di dunia, sementara

energi dan waktu hanya dihabiskan untuk saling benci dan tawuran jika bertemu. Dalam film ini juga, Kepala Sekolah SMA Manggar, Mustar, yang diperankan oleh seniman teater asal Yogyakarta, Landung Simatupang, memastikan bahwa kehidupan yang dihadapi untuk mencapai cita-cita tidaklah gampang, makanya dirinya sangat keras menghadapi tiga pemuda yang selalu disebut “berandal”. Mustar, guru yang dianggap super-galak, justru mengasah mental serta daya tahan Arai dan Ikal dalam menghadapi tantangan hidup.

Selain itu, mimpi anak-anak kita, ternyata juga didorong dari luar. Misalnya dalam film Sang Pemimpi, cita-cita ke Perancis didapat setelah bertemu dengan seorang guru muda, Julian Balia, yang diperankan oleh Nugie. Balia berhasil menanamkan keyakinan Arai dan Ikal bahwa yang terpenting bukan seberapa besar mimpi kita, melainkan seberapa besar upaya kalian mewujudkan mimpi itu.

Semoga banyak orangtua dan anak-anak muda yang menyaksikan film ini, dan betul-betul menghayati karya tersebut sebagai sebuah motivasi untuk membuat suatu target dan fokus dalam hidupnya. Sehingga tawuran yang sudah begitu biasa terjadi di Makassar tidak terulang. Saking seringnya, bahkan kita nyaris tak bisa menebak apa penyebabnya. Kalau pun bisa mengetahui, sebab sangat sepele.

Memang ada yang berpendapat bahwa tawuran terjadi akibat kesenjangan sosial dan salah pendidikan

dituding sebagai pemicu. Tetapi film Sang Pemimpi menunjukkan bahwa kesenjangan bukanlah halangan. Bahkan sekolah yang WC-nya super jorok bisa menelorkan siswa yang menembus Universitas Indonesia dan meraih beasiswa ke Perancis. Jadi tak ada lagi alasan untuk tidak punya mimpi besar. Kini kita tinggal menjaga dan membina anak-anak kita untuk menjadi manusia terpelajar atau intelektual. Namun pihak sekolah, kampus, atau pemerintah sebaiknya memformulasikan penyelesaian dengan berdialog rutin serta mewadahi anak-anak muda dalam berbagai kegiatan bersama, misalnya olahraga, musik, atau kursus keterampilan tertentu. (*)

31 Desember 2009

Pahlawan

Sehari setelah KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur wafat, usulan untuk menjadikan almarhum sebagai pahlawan nasional mulai bermunculan. Mantan presiden RI ini dinilai layak bukan hanya dikenal di Indonesia sebagai tokoh terkemuka dalam demokrasi, perdamaian dan pluralisme, tetapi juga diketahui dunia internasional. Dia juga dinilai jauh lebih layak meraih Nobel daripada Perdana Menteri (PM) Timor Leste Ramos Horta, PM Israel Simon Perez, bahkan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama.

Tetapi apakah sesungguhnya definisi pahlawan? Sebab siapapun bisa menjadi pahlawan, minimal untuk diri sendiri. Ibu saya juga adalah pahlawan bagi anak-anaknya. Beliau telah melahirkan, merawat, dan mendidik putra-putrinya.

Di tengah hiruk-pikuk perubahan zaman, sosok pahlawan sangat dibutuhkan oleh generasi muda agar menjadi panutan. Mereka memerlukan pahlawan yang bukan lagi membela negara dalam berperang, tetapi yang mampu memberantas kebodohan, kemiskinan, dan menjauhkan kita dari perang saudara. Jadi, pahlawan bagi anak-anak muda tidak lagi harus yang mengangkat senjata dan membela kemerdekaan negara republik ini. Pahlawan adalah mereka yang mampu mengentaskan bangsa ini dari kemiskinan dengan menghilangkan praktik korupsi dan pelanggaran HAM.

Bagi kalangan buruh, tentu akan memilih Marsinah, buruh wanita yang tewas dalam usia muda secara mengenaskan, sebagai pahlawan. Marsinah adalah seorang buruh wanita yang bekerja pada PT Catur Putra Surya di Porong, Sidoarjo Jawa Timur. Berusia muda dan sangat energik, tak mau mengalah pada nasib, tak henti-hentinya membela rekan-rekannya sesama buruh, yang kerap diperlakukan tidak adil oleh pimpinan perusahaan. Perjuangan Marsinah mencapai puncaknya ketika suatu malam ia diculik dan disiksa oleh lima “algojo” perusahaan.

Tentu ada figur di sekitar kita yang bisa dijadikan pahlawan. Tetapi yang paling penting dari pemberian gelar pahlawan kepada orang-orang yang telah mendahului kita, adalah penghargaan kita terkait dengan apa yang telah mereka persembahkan kepada kita. Adakah kita terinspirasi dan benar-benar bisa

menghayati semangat kepahlawanannya. Jumlah pahlawan nasional yang kita miliki sudah lebih dari 140 orang. Jumlah ini seharusnya jauh lebih dari cukup untuk memotivasi kita semua untuk mengabdikan jauh lebih besar kepada bangsa dan negara. Seharusnya, kita tidak pernah lagi ribut-ribut soal perbedaan, ketidakadilan, atau korupsi.

Meskipun sangat banyak jumlahnya, tetapi untuk menjadikan seseorang jadi “Pahlawan” memang tidak mudah karena ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. UU No 33 tahun 1964 menyebutkan bahwa yang disebut Pahlawan adalah *seseorang yang tindak kepahlawanannya patut diteladani sepanjang masa, karena tindakannya itu dapat menyejahterakan bangsa*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Pusat Bahasa (1988), kata pahlawan berarti *orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran*. Jadi ada tiga aspek kepahlawanan, yakni keberanian, pengorbanan, membela kebenaran.

Suryakusuma dalam sebuah harian berpendapat, sedikitnya ada empat faktor untuk mengukur konsistensi dan kepekatian kepahlawanan seseorang. Yakni visi, ideologi, aksi, dan refleksi. Sementara mengacu pada artinya secara harfiah, maka Pahlawan berarti orang yang gagah berani, pejuang yang gagah berani atau terkemuka, misalnya seorang yang pantang mengalah dan memiliki keberanian.

Semoga kita tidak latah memberikan penghormatan terhadap pahlawan dengan membuat patung, monumen, nama jalan, atau makam yang dikhususkan untuk mereka. Patung-patung pahlawan bertebaran di berbagai sudut kota, monumen-monumen dibangun di tempat sang tokoh meninggalkan jejak sejarah, jalan-jalan dinamai dengan nama para *hero*, dan taman makam pahlawan pasti ada di tiap kota. Tetapi penghormatan yang bisa kita berikan kepada pahlawan kita, adalah dengan menjadikan inspirasi untuk berbuat kebaikan kepada umat manusia. Misalnya penghormatan kepada Gus Dur sebagai Pahlawan adalah dengan menjaga kehidupan pluralisme tetap tumbuh subur. (*)

7 Januari 2010

Produk China

Tahun 2010 ini, kita semua harus bersiap-siap menghadapi serbuan produk impor asal China. Jika tidak kuat, maka usaha kecil hingga raksasa bisa dilibas oleh barang dari negara tersebut. Bukan apa-apa, penetrasi pasar dari produk China sangat beragam, mulai dari peniti hingga mesin-mesin pabrik. Harganya pun jauh lebih murah, dan terkadang tidak masuk akal.

Serbuan produk China ini ditandai dengan berlakunya perjanjian kerja sama perdagangan bebas antara kedua negara ini. Langkah ini dilakukan setelah pada tingkat regional, ASEAN telah menandatangani kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2010. Produk-produk China ini tidak dapat dibendung lagi kecuali kalau kita memang cinta produk Indonesia yang

mungkin harganya lebih mahal tetapi kualitasnya lebih baik.

Bagi warga Kota Makassar, produk China bukanlah barang baru. Pembauran antara warga pribumi dan warga keturunan China telah membuat barang China sudah sejak lama dikenal di Makassar. Terutama obatan-obatan tradisional. Jadi boleh dikatakan, serbuan barang dari China tidak terlalu mengejutkan. Jadi serbuan produk China tidak akan menimbulkan kekhawatiran kepada warga Makassar, atau Sulawesi Selatan sekalipun. Apalagi perekonomian rakyat masih kebanyakan didukung oleh sektor pertanian.

Oleh karena itu, dalam sebuah diskusi publik tentang pluralitas yang diadakan di studio mini redaksi Harian *Fajar*, Yogyakarta, ketua umum Panitia Peringatan Imlek di Makassar mengatakan orang Tionghoa datang hanya untuk berdagang. Mereka tidak pernah punya niat untuk menguasai. Kehadiran orang Tionghoa juga memberi kontribusi bagi negara-negara tempat mereka tinggal khususnya dalam bidang ekonomi.

Sebenarnya, kita memang tidak pernah takut akan dikuasai China. Hanya saja, mungkin sedikit resah kalau dunia usaha, khususnya usaha kecil terganggu akibat kalah bersaing dengan produk impor dari China. Termasuk produk-produk pertanian karena masuknya hasil pertanian dari China. Tetapi dibalik kerisauan serbuan barang dari China, sebenarnya ada hal positif yang dapat dipelajari dari keberhasilan China dalam

Pernikahan

Tujuan paling utama dalam sebuah pernikahan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan dicapai jika tak ada pihak yang dirugikan. Perkawinan diawali dengan perjodohan, pertemuan, pacaran, dan mufakat keluarga untuk menemukan titik kompromi sehingga ketenangan dan kedamaian dapat diwujudkan. Perkawinan adalah sakral.

Karena banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga maka pemerintah terpaksa turun tangan untuk mengatur masalah pernikahan ini. Terutama melindungi perempuan dari laki-laki yang berpoligami agar tidak dirugikan. Seandainya lagi-laki dapat menahan diri atau tidak merugikan perempuan, tentulah peraturan ini tidak perlu dibuat. Bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 sudah mengekang pegawai negeri

sipil untuk tidak berpoligami, tetapi kita juga sering mendengar ada yang melanggar. Jadi ada atau tidak ada aturan sama saja, tergantung bagaimana kesadaran laki-lakinya pada keadilan dalam relasinya dengan istrinya.

Peraturan nikah siri dan sebagainya, memang bisa diartikan meragukan kemampuan pasangan suami istri untuk mengontrol dirinya, lalu mengkhianati tujuan pernikahan yang benar, yakni untuk membentuk sebuah keluarga yang berkualitas. Pernikahan tanpa pencatatan yang kerap disebut pernikahan di bawah tangan ini, kadangkala memenuhi aturan agama dan adat tetapi tidak memenuhi administrasi hukum. Jika terjadi sesuatu di kemudian hari, sering pihak perempuan dirugikan karena tidak ada jaminan masa depan setelah menjanda. Bahkan lebih parah, sering menanggung anak tanpa jaminan dari seorang bapak karena anak dan istri tidak memiliki hak menuntut biaya hidup, apalagi hak waris. Jika pernikahan berakhir demikian dan menimbulkan korban, maka ini sesuatu yang halal akan berubah menjadi haram.

Dengan adanya peraturan sesuai draf Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010, pernikahan di bawah tangan mulai diperketat, sehingga kaum laki-laki dan perempuan sebaiknya mulai berpikir seribu kali bila ingin melakukan pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah atau yang

sering disebut nikah siri dan perkawinan mut'ah atau kontrak. Sebab, pelaku pernikahan tersebut dapat dipidana penjara. Namun keinginan untuk memidanakan ini menjadi perdebatan, terutama bagi mereka yang memegang keyakinan bahwa menikah adalah sebuah ibadah.

Jadi kalau ibadah, mengapa negara mesti menghukum rakyatnya. Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan akan mengatur sanksi bagi warga negara yang melakukan pernikahan siri, kontrak, dan pernikahan campur. Rencana sanksi hukuman penjara dan denda bagi warga yang melakukan pernikahan siri dan kontrak yang diusulkan dalam RUU karena dinilai sebagai pelanggaran administratif karena sah menurut agama, tetapi melanggar administratif dan hukum agama atau syariat.

Sebenarnya di banyak Negara, poligami tidak diperbolehkan. Pelakunya bahkan dihukum oleh negara. Misalnya di Singapura, warga Singapura hanya diizinkan mempunyai satu istri. Pelanggarnya diancam hukuman penjara setinggi-tingginya tujuh tahun, dan juga dijatuhi hukuman denda. Meskipun hukum itu tak berlaku bagi warga Singapura Muslim yang menikah di bawah hukum Islam, tetapi kalau mau berpoligami harus memenuhi syarat finansial tertentu dan mendapat izin istri terdahulu.

Pemerintah Thailand juga melarang warganya berpoligami sejak tahun 1932, meskipun banyak laki-

laki di negara tersebut memiliki istri lebih dari satu. Dari sebuah survei yang pernah dilakukan, diketahui bahwa seperempat dari 80 pria yang diwawancara mengaku punya istri lebih dari satu, dan sebagian besar menyadari hal itu melanggar hukum dan moral. Setengah dari laki-laki tersebut menyatakan bercerai dengan istri keduanya jika ketahuan istri pertama.

Di negara Islam perkawinan lebih dari satu istri diperbolehkan. Di Arab Saudi seorang laki-laki bisa memiliki istri lebih dari tiga orang. Sama halnya di Iran. Namun sangat jarang dijumpai laki-laki yang bisa menikahi banyak perempuan sekaligus karena perempuan sudah semakin cerdas dan tak mau dijadikan istri kedua.

Bila melihat pengalaman di beberapa negara lain, masalah poligami dan nikah siri memang menuntut kesadaran laki-laki untuk berlaku adil dan tidak mengorbankan perempuan. Prinsipnya, sebuah pernikahan harus fokus kepada tujuannya membentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh kasih sayang. Tidak boleh ada dusta di antara pasangan suami istri. (*)

25 Februari 2010

mendapat kesempatan menduduki jabatan publik maka amanah sebagai seorang pemimpin akan melekat pada dirinya. Keberhasilan seorang yang memegang amanah adalah kesanggupan memegang kepercayaan saat menjalankan kepemimpinannya. Kepercayaan tentu terkait dengan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik. Di bawah kepemimpinannya, ia mampu mengayomi dan melayani masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih baik, dan organisasi yang diaturnya menjadi lebih berkembang.

Jadi, seorang pemegang jabatan publik haruslah menjaga amanah atau kepercayaan yang diserahkan kepadanya. Menjaga amanah hanya bisa berjalan jika seseorang menjaga kepercayaan dengan cara bertindak dengan jujur, adil, dan sesuai kata dengan perbuatan.

Kita memang sangat kecewa dengan tindakan oknum pejabat yang mengkhianati kepercayaan masyarakat. Masalah yang terjadi pada Gayus dan mungkin yang lainnya, menunjukkan bahwa reformasi tidak menjamin semua orang menjadi malaikat. Kita masih kesulitan untuk menjamin korupsi tidak akan terjadi lagi. Tetapi kita masih ada kesempatan untuk membongkar kejahatan yang sudah muncul di permukaan sampai ke akarnya.

Sekarang kita bertanya-tanya, apakah selama ini Gayus sebagai petugas pajak memperkaya diri dengan berbuat korupsi? Tentu hanya dapat dijawab dari hasil pemeriksaan penegak hukum dan keputusan hukum

tetap. Tetapi saat ini yang sudah pasti dirasakan rakyat Indonesia, adalah kasus Gayus telah mengganggu rasa keadilan masyarakat yang selama ini setia membayar pajak. (*)

1 April 2010

Freedom Flotilla

Freedom Flotilla atau armada kebebasan, gabungan dua kata dalam bahasa Inggris dan Turki ramai dibicarakan setelah konvoi kapal pembawa bantuan untuk rakyat Palestina diserang serdadu Israel. Dunia langsung mengutuk aksi itu. Fakta yang menarik dibalik insiden itu adalah, ternyata dalam armada itu ikut 700 aktivis kemanusiaan dari 50 negara, yang di antaranya terdapat puluhan anggota parlemen di negaranya.

Armada kapal kebebasan sudah dipersiapkan sejak akhir tahun lalu. Aksi konvoi perjalanan terbesar menuju Jalur Gaza melawan blokade Israel yang melanggar hukum internasional dipersiapkan oleh kelompok loyalis Palestina mancanegara, termasuk dari Indonesia yang bergabung belakangan.

Para aktivis tersebut membawa lebih dari 10 ton bahan medis, bahan bangunan, serta kayu dan rumah jadi. Semua barang-barang tersebut untuk membantu penduduk yang kehilangan rumah akibat invasi tentara Israel ke Jalur Gaza pada 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009. Namun Israel telah mengepung Gaza dan tidak mengizinkan akses untuk misi kemanusiaan ke sana. Inilah tantangan terberat para pendukung Freedom Flotilla.

Penyerangan tentara Israel terhadap pahlawan kemanusiaan di atas kapal Freedom Flotilla mengingatkan pada gadis muda berkebangsaan Amerika Serikat, Rachel Corrie. Gadis muda berusia 23 tahun ini, tewas di Kota Rafah, Palestina, setelah dilindas bulldoser milik tentara Israel yang hendak menghancurkan sebuah rumah keluarga Palestina pada 16 Maret 2003.

Sama seperti alasan penyerangan ke Freedom Flotilla, serdadu Israel menyerbu Rafah untuk mencari "teroris". Tembakan-tembakan dari senapan-senapan diletuskan, sementara tank dan bulldoser bergerak melakukan penghancuran rumah-rumah milik keluarga Palestina. Rachel yang bergabung *International Solidarity Movement* menuju Palestina dengan satu tujuan; menghentikan perang. Dia sambil berlutut mengadang salah satu bulldoser yang hendak meratakan sebuah rumah Palestina. Namun, tentara Israel tidak peduli. Rachel tetap dilindas hingga wafat.

Rachel menjadi pahlawan di Palestina dan juga bagi simpatisan Palestina. Sayangnya, kematian Rachel disambut dingin AS. Di negaranya sendiri dia dianggap salah karena membela pihak yang “salah”; Palestina.

Satu pahlawan bagi rakyat Palestina, yakni Presiden Venezuela, Hugo Chavez yang pasca serangan brutal tentara Israel Januari 2009, langsung mengeluarkan reaksi keras sebagai rasa solidaritas terhadap bangsa Palestina. Begitu terjadi serangan dan melihat agresi brutal Israel di Jalur Gaza, Chavez langsung mengusir dubes Israel di Caracas. Bahkan, Venezuela juga mengirimkan bantuan kemanusiaan dengan menggunakan pesawat terbang sendiri untuk membantu warga Gaza yang kekurangan makanan dan obat-obatan akibat blokade Israel.

Atas sikap simpatinya itu, Chavez sangat dikagumi. Padahal, dia tidak punya hubungan langsung dengan Palestina. Agama dan bahasa saja berbeda. Tetapi dia dianggap bisa merasakan penderitaan rakyat Palestina. Samapai-sampai namanya diabadikan sebagai nama salah satu jalan di kota Lebanon.

Setiap krisis selalu melahirkan tokoh yang menjadi pahlawan, seperti setiap pertandingan olahraga atau drama, selalu menghasilkan bintang. Namun yang harus kita petik dari setiap krisis tersebut, bagaimana bintang tersebut lahir, bagaimana sikap dan keteguhan dalam membela prinsip yang diyakini kebenarannya. Tidak akan ada bintang yang lahir secara kebetulan.

Sekarang mari kita menjadi bintang di tempat kita, di rumah, di tempat kerja, di kampus, atau di mana pun kita berada. Berikan arti atas kehadiran kita untuk membuat suatu perubahan yang lebih baik. Toh kita tidak harus mempertaruhkan nyawa, atau mungkin jabatan politik. Cukup meluangkan waktu untuk berbuat hal-hal yang positif.

Misalnya pegawai pemerintah melayani rakyat dengan lebih baik, guru mengajar lebih giat, dan mahasiswa kuliah lebih tekun. Bersyukurlah beban tanggung jawab atau tujuan kita tidak terlalu berat. Bukan seperti mereka yang memilih perjuangan dalam misi kemanusiaan yang harus jauh dari keluarga dan mempertaruhkan nyawa. Jadi jangan sia-siakan waktu dan peluang untuk berkarya yang ada di tangan kita. Bayangkan bagaimana pusingnya Presiden AS Barrack Obama untuk bersikap terhadap serangan Israel terhadap Freedom Frotilla. Antara kedekatan dengan Israel dan penghargaan Nobel yang dimiliki tentu tidak mudah bagi Obama memilih sikap. (*)

3 Juni 2010

Goal

“All men seek one goal: success or happiness. The only way to achieve true success is to express yourself completely in service to your society.” (Aristoteles)

Kata *goal* atau tujuan mungkin akrab belakangan ini, terutama dalam piala dunia yang ditonton miliaran mata. Semua menunggu laga para tim-tim kelas dunia untuk mencapai goal atau tujuan berupa kemenangan. Pencapaian tujuan tersebut bahkan menjadi kejutan-kejutan Piala Dunia 2010 Afrika Selatan. Namun yang terpenting, apakah kita bisa mengambil pelajaran dari semangat tim-tim Afrika.

Upaya mencapai kemenangan yang paling menarik adalah yang dilakukan tim-tim dari negara-negara

berkembang yang merupakan wakil dari benua Afrika. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana negara-negara yang hingga saat ini terbelit masalah kemiskinan, bahkan belum lama keluar dari masalah kelaparan, ternyata bisa berjuang untuk mengalahkan tim-tim dari negara Eropa.

Bukan hanya masalah finansial, tim asal Benua Afrika juga menghadapi masalah keamanan yang mengancam nyawa mereka. Misalnya yang dihadapi tim nasional Togo di Cabinda, Angola. Saking ngerinya ancaman keamanan yang dihadapi tim Afrika, tim-tim dari luar Afrika seperti dari Eropa dan Amerika membawa pasukan pengamanan khusus ke Afrika Selatan.

Meskipun berat untuk bertahan, tetapi tim-tim Afrika menunjukkan perjuangannya untuk tetap bertahan ke-16 besar. Dalam pertandingan, para pemain sama sekali tidak pernah terlihat loyo. Sama sekali tak pernah tampak seperti dari negara yang sering diguncang kudeta dan perang.

Kita mungkin tak hentinya berpikir, bagaimana mungkin negara yang sering disebut-sebut penuh dengan pertikaian, lantas memiliki prestasi sepak bola yang begitu tinggi. Negara mereka sering diberitakan kacau, terutama dalam bidang politik, juga menghadapi masalah krisis ekonomi. Selain itu, daya dukung lingkungan cenderung melemah akibat eksploitasi ekologi yang luar biasa.

Sepak Bola Perempuan

Semua orang sepertinya tengah dilanda demam Piala Dunia 2010 yang sedang berlangsung di beberapa kota di Afrika Selatan. Bukan hanya laki-laki dan orang dewasa saja, tetapi perempuan dan anak-anak pun ikut menikmati pertandingan di layar televisi. Jumlah penonton melalui layar kaca bisa mencapai miliaran, rekor terbanyak berada di China yang berpenduduk 1,3 miliar, meskipun negara ini tidak lolos ke final.

Tetapi kemeriahan pesta bola seolah-olah melupakan orang-orang bahwa pertandingan ini bukanlah hanya milik laki-laki, tetapi juga dimainkan oleh tim-tim perempuan. Bahkan perempuan juga punya ajang piala dunia. Terakhir, *Women World Cup* diselenggarakan di Shang Hai China yang dimenangkan Tim Jerman.

Saat ini, peringkat tim terkuat tim perempuan dipegang Amerika Serikat, kemudian Jerman dan Brasil.

Federation International de Football Association (FIFA) sendiri memberikan dukungan penuh kepada perkembangan sepak bola perempuan. Alasannya, hal ini memberikan kesetaraan dalam berolahraga, khususnya pada sepak bola yang merupakan olahraga yang bersifat universal dan paling digemari di seluruh dunia. Sehingga dengan adanya sepak bola perempuan, bukan hanya memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menonton, tetapi menjamin kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertandingan.

Mungkin tidak banyak yang tahu, kelompok perempuan pun punya banyak kalender pertandingan hingga tingkat internasional, seperti Piala Dunia U-17, Piala Dunia U-20, Piala Dunia U-23, dan Piala Dunia sendiri. Semua kompetisi yang diadakan memberikan hasil yang sangat memuaskan karena mendapatkan tim yang semakin tangguh. Karena itu, FIFA mengusulkan agar peserta yang lolos ke babak final Piala Dunia perempuan selalu ditambah, paling tidak pada penyelenggaraan berikutnya, dari 16 tim menjadi 24 tim pada tahun 2011.

Lalu bagaimana dengan tim sepak bola perempuan di Indonesia? Meskipun kita tidak pernah mendengar lagi mengenai kompetisi tim perempuan, namun dalam catatan FIFA terdapat 320 pemain perempuan pada tahun 2004. Selanjutnya FIFA tak punya lagi catatan

berapa pemain di Indonesia karena sejak tahun 2005 tidak ada kompetisi yang terpantau oleh FIFA.

Padahal, jangan-jangan perempuan Indonesia justru dapat mengangkat nama Indonesia di kancah persepakbolaan internasional. Ketimbang kita berharap dengan tim nasional Indonesia yang prestasi terakhirnya dikalahkan Myanmar, negara yang jauh lebih kecil dibandingkan negara kita.

Pemerintah tinggal memberikan kesempatan kepada kelompok perempuan, memberikan pelatihan dan pembinaan. Segera menyusun rencana pengembangan sepak bola perempuan dan mengembangkan strategi pendanaan untuk mencapainya. Membuat struktur asosiasi persepakbolaan perempuan untuk mendukung perkembangan sepak bola perempuan.

Jalan yang dapat ditempuh, tentu dengan membuat program-program di sekolah akar rumput, masyarakat, dan klub, sehingga dapat menciptakan lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam sepak bola. Selain itu, membangun atau memperkuat kompetisi sepak bola di nasional dan tingkat daerah untuk memberi kesempatan bagi perempuan muda untuk terus mengembangkan keahlian mereka.

Memang akan sulit untuk langsung masuk ke kancah internasional. Dan memang kita tidak mungkin langsung bisa mencapai kelas dunia, tetapi tidak ada salahnya kalau kita mulai dengan menyaksikan secara antusias pertandingan Piala Dunia perempuan yang

akan berlangsung 26 Juni 2011 di Berlin, Jerman. Mari kita mencoba menyandarkan harapan kepada kaum perempuan Indonesia menjadi tim nasional mewakili Indonesia untuk menggantikan tim sepak bola lelaki yang sulit mendapatkan kesempatan ke Piala Dunia. (*)

8 Juli 2010

Bersiap Puasa

Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semua Korang tentu berharap ada perubahan dalam dirinya setelah sebulan berpuasa berperang melawan hawa nafsu. Sebulan berpuasa diharapkan melahirkan manusia yang lebih mengedepankan perilaku yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan menjaga hubungan positif sesama umat manusia. Artinya, bulan Ramadan ini akan menjaga perilaku kita pada sebelas bulan berikutnya.

Namun, sesungguhnya menahan lapar dan dahaga bukanlah yang membuat manusia terlahir seperti baru keluar dari dalam perut ibunya sebagaimana hadits Rasulullah yang diriwayatkan dari Ali Bin Abi Thalib r.a tentang kelebihan Shalat Tarawih di Bulan Ramadhan. Tetapi karena kita mengalami liminalitas, kembali

merasakan sebagai manusia yang tak memiliki apa-apa dan mengalami refleksi menjadi anggota masyarakat yang baru karena ada perubahan pandangan maupun kedudukan.

Puasa berarti menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik yang bersifat lahir maupun batin. Kita diwajibkan menahan makan, minum, dan nafsu seksual sejak terbit fajar hingga magrib. Juga mencegah nafsu untuk menggunjing, mencaci maki, memperolok-olok, mendengarkan suara kejelekan, dan perbuatan negatif lainnya. Tetapi kalau kita hanya mampu menahan yang bersifat lahir, sebetulnya baru masuk tahap permukaan puasa. Imam Al-Ghazali mengategorikan tiga puasa, yaitu puasa orang awam ('am), puasa khusus (khawas), dan puasa amat khusus (khawasul khawas).

Namun ada yang menarik setiap menjelang Ramadan, karena ditandai dengan kenaikan harga barang pokok seiring kenaikan konsumsi. Konon, karena selama Ramadan, umumnya konsumsi produk, makanan, pakaian, dan kebutuhan meningkat sehingga harganya langsung melonjak.

Peningkatan konsumsi itu, disadari atau tidak, terkait budaya konsumerisme yang mempengaruhi pola keagamaan. Apalagi, iklan dan acara di media cetak dan elektronik setiap hari menjejali pikiran kita.

Seharusnya dari kalangan ibu-ibu yang sudah dilatih berulang kali untuk menahan hawa nafsu (konsumeris-

me) lewat bulan ramadan tahun-tahun yang lalu, sudah semakin arif menjaga para suami agar tak terjebak korupsi. Para “manusia baru” yang ibu-ibu sudah harus paham aturan main sebenarnya sehingga hidup lebih disiplin dan tidak main terabas. Mereka seharusnya sudah memahami makna kerja keras bukan bernafsu meraih kesenangan dengan cara secepatnya, korupsi misalnya. Mereka menempatkan perbedaan sebagai landasan hidup harmonis, bukan pemicu konflik.

Sebab, puasa seharusnya membuat kita menahan diri untuk tidak berbelanja secara berlebihan, dan menumbuhkan rasa solidaritas sosial, berbagi dengan sesama, mengeluarkan sedekah bagi mereka yang miskin papa. Dengan begitu, puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga serta mencari pahala, tetapi berdampak nyata pada lingkungan sekitar.

Kita sebaiknya memanfaatkan bulan puasa sebagai sarana untuk mengurangi budaya konsumerisme yang sudah permisif. Kita hendaknya tidak terjebak dan terjajah iklan yang menggempur dan “menghipnotis” kita.

Jadi kesimpulannya, bulan Ramadan adalah saat tepat untuk berbagi dan peduli. Daripada menuruti hawa nafsu dan keinginan menjadi konsumeris, sebaiknya kita menjadikan bulan puasa sebagai sarana tirakat sosial. *Marhaban ya Ramadhan, minal aidin wal faizin.* (*)

29 Juli 2010

Satu Cabai Seribu Rupiah

Di Kalimantan Tengah, seorang ibu dengan lugasnya mengadukan perihal cabai kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Katanya, harga kebutuhan pokok di pasar sudah tidak masuk akal lagi, sudah gila-gilaan. Bahkan harga sebiji cabai sudah mencapai Rp 1.000!

Atas pengaduan sekaligus curahan hati ibu rumah tangga asal Bumi Borneo itu, Megawati yang juga mantan Ibu Negara, dengan santainya mengatakan terima kasih atas curhatnya. Tapi, kata Mega, sebaiknya jangan hanya tanya saya. Tanya pemerintah, karena sekarang saya bukan lagi presiden.

Minggu lalu di akun sosial *Facebook*, seorang teman di Bogor, menulis bahwa bawang putih tidak ditemukan lagi di pasar. Sebelum saya bertanya kenapa, dia

menyambung tulisannya dengan mengatakan bahwa bawang putih tidak ada karena dibunuh oleh saudara tirinya, yaitu bawang merah. Teman saya itu rupanya sekadar guyon untuk menutupi kekesalan hatinya akibat melambungnya harga-harga kebutuhan pokok.

Cerita tentang cabai atau bawang (merah dan putih), semuanya merupakan bagian dari pangan kita. Jika tidak tersedia di dapur, tentu makanan kita menjadi tidak atau kurang nikmat. Rasanya makanan yang tersaji di meja makan tidak akan menimbulkan selera atau nafsu makan jika tidak tersedia sambal (cabai) dan bawang.

Mudah-mudahan saja semua anggota keluarga dapat sabar menghadapi sajian makanan di meja makan yang disiapkan para ibu rumah tangga. Jika ada yang kurang, tidak buru-buru menggerutu atau menyalahkan ibu. Harus disadari dan dimengerti bahwa sejak beberapa pekan terakhir, harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Sebaliknya, pendapatan rumah tangga masih relatif sama alias tidak bergerak signifikan.

Dalam hal ini, saya mau mengingatkan kita semua bahwa ketersediaan pangan atau makanan di dalam rumah, merupakan tanggung jawab bersama antara ayah, ibu, dan anak serta anggota keluarga lainnya. Karena itu, jika tidak sesuai selera, apalagi hanya karena kurang pedas akibat harga cabai yang melambung tinggi, janganlah mengumbar amarah atau menyalahkan sekaligus kecewa kepada ibu atau perempuan. Berusaha-

lah bersama-sama untuk menyediakan makanan sesuai selera masing-masing agar puasa kita dapat menjadi lebih bernilai.

Kenaikan harga berbagai kebutuhan bahan pokok saat ini memang kelihatannya sedang tren. Banyak faktor yang menyebabkan mengapa bisa begitu. Selain biaya produksi yang meningkat sehingga petani juga menaikkan harga jual, juga karena permintaan yang tinggi sementara di pihak lain produksi menurun. Penurunan produksi juga cukup banyak penyebabnya. Antara lain faktor cuaca atau karena sebab lainnya.

Untuk itu, tidak banyak yang dapat dilakukan kecuali bersabar sambil berharap pemerintah dapat memainkan perannya sebagai “pengelola” negara ini. Paling tidak, pemerintah dapat memberikan solusi dan mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Semoga. (*)

5 Agustus 2010

Perempuan Korban Kriminalitas

Menjelang lebaran kali ini cukup menyedihkan karena banyaknya aksi perampokan bersenjata. Bahkan dalam sehari, terjadi empat perampokan secara bersamaan di beberapa daerah di Indonesia. Memang kita patut bersyukur tidak (belum) satupun perampokan yang mengerikan tersebut terjadi di Makassar atau Sulawesi Selatan.

Tetapi yang menarik dari peristiwa tersebut, secara tidak langsung yang menjadi korban paling berat adalah kaum perempuan. Kejahatan yang memakan korban jiwa tersebut tentu menyebabkan istri jadi janda yang langsung kehilangan tulang punggung keluarga. Seperti anggota Brimob yang tewas dalam perampokan Bank CIMB Niaga di Kota Medan.

Sementara dalam perampokan lain yang berhasil dicegah dan pelaku perampokan berhasil tertangkap, ternyata juga tewas dihakimi massa. Lagi-lagi menyebabkan istri menjadi janda, walaupun tak mengenakan karena jadi janda perampok. Tetapi tetap saja, lagi-lagi kelompok perempuan ikut menjadi korban dari ulah suami yang mencari nafkah di jalan yang salah.

Oleh karena itu, idealnya perlindungan terhadap perempuan oleh pemerintah, juga sebaiknya dilakukan dengan mencegah maraknya tindakan kriminal. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan. Tentu meningkatkan pendidikan masyarakat, sehingga tahu mengenai hukum dan penegakannya. Jika rakyat pintar, dan punya kerjaan sehingga perutnya tidak lapar, tentu tidak akan ada niat untuk berbuat kejahatan, apalagi mengambil hak orang lain.

Mungkin tidak seratus persen benar, tetapi banyak kalangan yang percaya bahwa faktor utama pemicu kejahatan adalah kemiskinan. Bahkan, saat ini, warga miskin pun sering menjadi korbannya.

Faktor ekonomi memang sering disebut sebagai pemicu utama kejahatan. Pemikirannya sederhana, orang yang butuh uang untuk makan bisa nekat membunuh atau merampok. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah meningkatkan kesejahteraan warga. Berdayakan mereka melalui usaha ekonomi riil.

Jika hanya memahami makna generik puasa sebagai ibadah menahan diri dari nafsu makan, dan minum selama sebulan penuh agar sadar akan rasa lapar dan dahaga yang dialami rakyat miskin setiap hari, maka hal tersebut belumlah cukup dan tidak membantu orang miskin sama sekali.

Oleh karena itu, marilah kita berlatih memberi pada bulan Ramadhan ini atau berdagang di jalan Allah SWT. Apakah berdagangan di jalan Allah SWT, antara lain sedekah buat orang miskin, infaq untuk pendidikan, memberi makan orang yang berbuka, menyantuni anak yatim, serta zakat fithrah.

Jangan pernah takut untuk berdagang di Jalan Allah SWT karena pasti akan mendapatkan manfaat yang berlimpah. Dalam fiman Allah SWT, disebutkan bahwa perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al baqarah: 261)

Seperti pada pengalaman Ali bin Abi Thalib, Fathimah, Hasan dan Husain saat kedatangan Alharits di bulan Ramadhan. Alharits mengatakan, kalau perutnya sudah dua hari belum kemasukan apa-apa. Fathimah yang tak punya apa-apa waktu itu, memberikan selebar kain hadiah ayahandanya untuk dijual dan dibelikan roti dan kurma.

Ali berhasil menjual kain tersebut dengan harga enam dirham. Tetapi tak sempat dibelikan makanan, datang seorang fakir meminta sedekah. Ali yang merasa kasihan, langsung memberikan enam dirham sehingga dia pulang dengan tangan kosong.

Tiba-tiba muncullah seseorang dengan seekor unta mencegat Ali dan menawarkan untanya dengan harga seratus dirham. Tetapi karena Ali tak mampu membeli, orang itu meminta agar dibantu menjual dengan harga berapa pun dan dia hanya meminta seratus dirham.

Lagi-lagi karena kasihan, Ali pun berangkat ke pasar. Dalam perjalanan dia dicegat seseorang yang langsung menawar unta tersebut dengan harga seratus enam puluh dirham. Ali kemudian memberikan seratus enam puluh dirham hasil penjualan kepada pemilik unta. Akan tetapi, sesuai kesepakatan, pemilik unta hanya mengambil seratus dirham. Sedangkan sisanya, enam puluh dirham diberikan kepada Ali.

Ali pulang ke rumahnya dan menyerahkan enam puluh dirham kepada istrinya dengan berkata dengan Allah. Kain kamu laku enam dirham tetapi saya sedekahkan, tetapi Allah SWT mengganti dengan kelipatan sepuluh.

Jadi contoh di atas mengajarkan kita tidak boleh khawatir berdagang di jalan Allah SWT. Oleh karena itu, seharusnya kita menyadari mengapa kita perlu dilatih sebulan penuh untuk menjalani hidup sebagai rakyat miskin yang serba tak enak, serba kekurangan dan serba

kelaparan. Terutama, kalau ada di antara kita yang hidupnya kaya dan biasa makan serba enak. Sehingga dalam bulan puasa dan setelahnya, kita semakin peka terhadap derita rakyat miskin dan kemudian melahirkan sikap empatik serta simpatik pada kelompok tersebut.

Jika rasa empati dan simpatik tumbuh, maka berarti seseorang sudah berhasil meraih apa yang disebut sebagai kesalehan sosial (hakikat) bukan sekedar kesalehan personal (syariat) saja. Bagi mereka, puasa telah menyentuh, menyadarkan, sekaligus menumbuhkan semangat dan kewajiban moral-etik-kemanusiaan kita pada rakyat miskin.

2 September 2010

Siti Walidah

Film “Sang Pencerah” yang mengangkat sosok KH Ahmad Dahlan betul-betul memberikan pencerahan dengan pesan moral Islam harus dijalankan sebagai agama yang memberikan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Sang Pencerah menggambarkan peran penting Ahmad Dahlan dalam mengembangkan pemikiran Islam modern dan pendirian Muhammadiyah dengan tujuan mendidik umat Islam agar berpikiran maju sesuai dengan perkembangan zaman.

Tetapi yang perlu menjadi perhatian penonton tak semata Ahmad Dahlan, tetapi tokoh yang selalu mendampingi dan mendukung perjuangan beliau adalah Siti Walidah, sang istri tercinta. Siti Walidah selalu setia menemani dengan memberikan kekuatan dalam menjalankan keyakinan suami. Ia sedikitpun tak

pernah menjadi beban suami, tetapi menjadi penolong di saat Ahmad Dahlan mendapatkan cobaan yang tidak ringan dalam perjuangannya.

Misalnya, ketika KH Ahmad Dahlan dituduh kafir akibat ajarannya yang dianggap modern dan melaju pesat melewati pemikiran zamannya ketika itu, sang istri yang selalu memberikan kesejukan dan kedamaian bagi Ahmad Dahlan. Bahkan, saat paling kritis ketika Ahmad Dahlan harus menerima kekerasan saat langgarnya dirobuhkan oleh umat yang menolaknya karena memprotes arah kiblat yang dinilainya keliru.

KH Ahmad Dahlan menikahi Siti Walidah sepulang berguru dari Makkah. Siti Walidah adalah sepupunya sendiri, anak Kyai Penghulu Haji Fadhil. Siti Walidah, kemudian lebih dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan dikaruniai enam orang anak, yaitu: Djohanah, Siradj Dahlan, Siti Busyro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharah.

Dalam film Sang Pencerah, tokoh Siti Walidah yang diperankan artis Zaskia Adya Mecca, terlihat dengan ikhlas memberikan kotak isi tabungan saat suaminya membangun langgar baru dan ketika mendirikan madrasah. Sama sekali tidak memperlihatkan keresahan karena uang tabungan yang seharusnya milik bersama digunakan sang suami untuk kepentingan perjuangannya.

Keikhlasan dalam hubungan suami istri dapat dirasakan juga saat Siti Walidah tidak pernah menuntut

untuk diikutsertakan dalam berhaji oleh suami. Ia juga tak pernah terlihat menegur suami. Di luar itu, ia juga bisa menangis melihat betapa bertanya perjuangan Ahmad Dahlan. Dan ketika beliau dituduh kafir karena mendirikan Muhammadiyah, Siti Walidah hanya bisa tepekur sedih.

Peran Siti Walidah bukan hanya sebatas mendukung suami, tetapi pada akhirnya juga mendirikan organisasi untuk mengangkat harkat perempuan di Indonesia. Selain menjadi ibu enam orang anak, Siti Walidah juga dikenal sebagai pendiri Aisyiyah yang bertahan hingga kini.

Sebenarnya kehebatan Siti Walidah sebagai tokoh perempuan muslim juga didukung oleh suaminya yang memang sejak mendirikan Muhammadiyah, sangat peduli dengan pembinaan perempuan. Alasan KH Ahmad Dahlan memberikan perhatian kepada kaum perempuan karena dia meyakini bahwa ajaran dalam agama Islam tidak dibolehkan mengabaikan perempuan.

Jadi setelah menyaksikan film sang pencerah, selain mengenal KH Ahmad Dahlan sebagai sosok lelaki yang tangguh, sabar dan penuh semangat, kita juga melihat sisi lain sang tokoh dalam hubungannya dengan perempuan, terutama kepada istrinya Siti Walidah. Jadi bukan hanya KH Ahmad Dahlan saja yang perlu ditauladani, namun sikap istrinya Siti Walidah juga patut untuk dijadikan panutan oleh para kaum perem-

puan. Terutama dalam kehidupan suami istri yang selalu saling menghormati dan mendukung. (*)

21 September 2010

Pinera

Presiden Cile Sebastian Pinera tiba-tiba jadi bintang dalam drama penyelamatan 33 petambang yang terjebak di kedalaman 700 meter di bawah permukaan tanah sejak 5 Agustus 2010. Apalagi, televisi sekelas CNN menyiarkan langsung secara terus menerus ketika para petambang disambut Pinera yang turun langsung ke dalam operasi penyelamatan.

Dia telah menunjukkan keberadaan seorang pemimpin sangat diperlukan rakyatnya, terutama saat warganya yang sedang menderita. Janji untuk menyelamatkan warganya dengan biaya yang tak terbatas, benar-benar direalisasikan meskipun awalnya banyak yang pesimis kesempatan menemukan pekerja tambang hidup-hidup. Pembuatan terowongan dengan biaya

yang relatif mahal terus dilakukan untuk menjangkau petambang.

Sebenarnya kalau semua pemimpin di dunia bertindak sesuai perannya, maka apa yang dilakukan Pinera bukanlah hal yang luar biasa. Sebab semua pemimpin, baik presiden, gubernur, atau bupati dituntut selalu membela, melindungi, dan menolong rakyatnya setulus hati. Jadi seorang pemimpin tidak mesti menunggu ada kecelakaan atau bencana untuk turun langsung ke lapangan.

Seorang pemimpin hanya perlu menyadari kekuasaan yang ada dalam genggamannya dan mengetahui secara benar bagaimana memanfaatkan kekuasaan tersebut. Sehingga dia bisa membuat kebijakan yang dapat membantu rakyatnya yang berada dalam jeratan kesusahan. Misalnya di zaman susah seperti sekarang ini, sebagian masyarakat masih kesulitan secara ekonomi untuk mendapatkan pangan.

Terkait dengan masalah pangan, tentu kebijakan yang dibutuhkan adalah menjaga ketersediaan pangan harus terjaga sehingga tidak terjadi krisis pasokan yang dapat menyebabkan lonjakan harga. Sebab kalau harga beras melonjak karena pasokan langka, berarti rakyat miskin akan kehilangan kemampuan untuk mendapatkan pangan tersebut.

Oleh karena itu kita patut memberikan penghargaan bagi pemimpin yang dapat menyediakan pangan bagi

rakyatnya. Hal itu terbukti ketika Presiden Soeharto mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) karena keberhasilan Indonesia dalam swasembada pangan. Terlepas dari kontroversi pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto, namun kita perlu mengakui bahwa kala itu presiden kita mendapat pengakuan dunia karena bisa menolong rakyatnya dari kelaparan.

Hal yang sama juga terulang dalam skala kecil, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga berhasil mempertahankan swasembada pangan dengan produksi yang diperkirakan mencapai 3,1 juta ton pada tahun ini. Artinya, jika dikurangi kebutuhan beras warga Sulawesi Selatan, maka surplus beras sekitar 2,2 juta ton dapat disumbangkan untuk pemenuhan pangan di Indonesia.

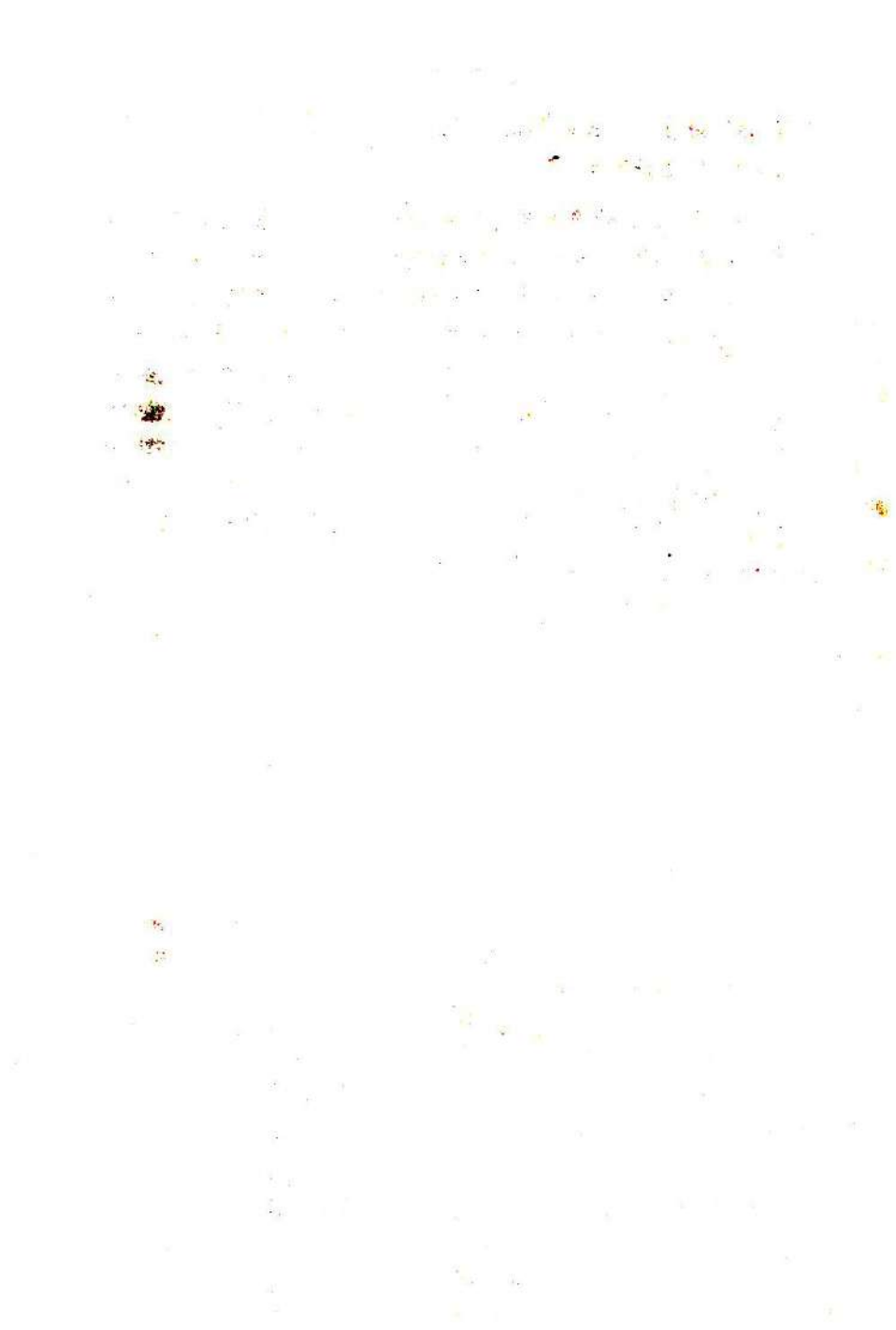
Kita mungkin tidak pernah menyadari peran pemimpin di saat rakyatnya aman dan sejahtera karena pemimpin seolah tidak dibutuhkan. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa situasi yang nyaman dan aman tersebut selalu tercipta dari pemimpin yang kuat, bekerja dan mengabdikan kepada rakyat secara tulus.

Sebab kalau tidak ada pemimpin yang menciptakan ketahanan pangan, maka ke mana wajah bangsa ini mau disembunyikan ketika bermunculan kasus busung lapar. Sebab busung lapar hanya populer di zaman penjajahan Jepang atau Belanda akibat keserakahan penjajah. Namun saat ini, setelah Indonesia merdeka, maka kita

tidak akan memaafkan pemimpin yang membiarkan rakyatnya kelaparan.

Oleh karena itu, kita boleh kagum dengan apa yang dilakukan Presiden Cile Sebastian Pinera, tetapi kita juga perlu memberikan penghargaan kepada pemimpin seperti Gubernur Sulsel, Syahrul Yassin Limpo yang dengan kepercayaan rakyat di tangannya, bisa mempertahankan ketahanan pangan di Sulsel, terutama di ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan. Sebab dengan surplus beras di Sulsel, bukan hanya menyelamatkan rakyat dari kelaparan, tetapi juga memberikan kehidupan bagi petani Sulsel dan keluarganya.(*)

19 Oktober 2010



Tentang Penulis



Prof. Dr. Ir. Hj. Itji Diana Daud, M.S., lahir di Makassar 6 Juni 1960. Bangsa berbintang Gemini karena sama dengan bapak Soekarno dan bapak Soeharto.

Aktif berorganisasi sejak mahasiswi hingga menjadi dosen di fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, antara lain: Ketua KoHati HMI Cab ujungpandang tahun 1982-1983, bendahara umum keluarga

Mahasiswa Penerima Super Semar, Ketua Solidaritas Perempuan Anging Mammiri 1999-2003, Sekertaris Dharma Wanita Prop. SulSel tahun 2005 sampai sekarang. Saat ini masih menjabat wakil ketua BKKKS Sulawesi Selatan, anggota pengurus PMI Sulawesi Selatan.

Training atau workshop yang pernah diikuti, antara lain: Study HAM selama 6 bulan di Monash University Australia, TOT HAM dan Hukum-Hukum Pengungsi sehingga menjadi pengajar 300 Polisi di kabupaten Maros, Magang 6 bulan di IPB Bogor tentang Study Elektroforesis dan Sitogenesis serta Manipulasi Data, Study Biogenetika di Singapura University, Study Pemeliharaan Ulat Sutera dan produk Sutera di China.

Isteri Firdaus Hasan ini pernah menjadi tenaga ahli DPRD prov SulSel selama 2 periode, sekarang sudah berhenti. Saat ini hanya bekerja sebagai dosen dan wakil dekan 3 bidang mahasiswaan. Setiap minggu menulis untuk kolom Swara Setara Harian Fajar yang terbit pada hari Kamis.